

masa kini

ke MERANTAU SYDNEY

Perjalanan Mengejar Mimpi
di Harbour City

Andri Rosadi, Ph.D.



MERANTAU
ke
SYDNEY

**Perjalanan Mengejar Mimpi
di Harbour City**

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta
Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana
Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf l, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Andri Rosadi, Ph.D.

MERANTAU
ke
SYDNEY

**Perjalanan Mengejar Mimpi
di Harbour City**



Merantau Ke Sydney

Perjalanan Mengejar Mimpi di Harbour City

Penulis **Andri Rosadi**

Editor **Yulfira Riza**

Penyelaras Aksara **Athiful Khoiri**

Ilustrasi Sampul **M. Faruqi Abdurrasyid**

Tata Letak Isi **Zuni Fitri S.**

Cetakan pertama, Januari 2024

ISBN 987-6231-5306-09-4

Diterbitkan oleh

Masa Kini

(Anggota IKAPI)

Jl. Sorowajan Baru Gang Muria

Banguntapan, Bantul, DIY 55198

Surel: pustakamasakini@gmail.com

Kontak 0856-0007-7724

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

ISI BUKU



Pengantar Penulis	viii
--------------------------------	-------------

☞Kehidupan ☞Personal

Anak Guru	1
Kilas (sebelum) Balik	4
Studi PhD: Mahasiswa, Suami, dan Ayah.....	7
Abang Sekolah	10
Si Bungsu Mulai Sekolah	12

☞Aussie

Islam di Aussie.....	16
Stasiun Sydenham	17
Australian Day.....	19
Emancipation, Equality dan Freedom.....	23
Palestina dan Imperialisme Israel	27

☞Renungan ☞Keagamaan

Puasa dan Kultur Konsumtif	31
Puasa Sebagai Proses <i>Recalling</i>	35
Agama dan Bencana	39
Hikmah Bencana	44
Ramadhan: Momen Penyucian Diri.....	47
Toleransi	50
Jahiliah	53
Karl Marx.....	56
Otoritas Keagamaan	59

Duka Kepergian Habibie.....	61
Keadilan dan Kezaliman	63
Kaum Muslim dan Hoaks.....	65

Agama dan Radikalisme

Fundamentalisme: Antara Agama dan Identitas...	69
Religion in Violence	73
Believing with Belonging.....	76
Agama dan Fundamentalisme.....	79
Islam yang Sejuk	82
Agama dan Ekstremisme	85
Agama dan Modernitas	88
<i>Wirathu</i> dan Islamofobia	92
Ulama Aktivistis dan Ulama Tradisional	95
Islam dan <i>Others</i>	98
Radikalisme.....	101
Islam Progresif	104
Islam Liberal.....	107
Memahami Sisi Lain Fundamentalisme	109
FPI dan Gerakan Pemberantasan Korupsi	112
Osama, Taliban, dan Fundamentalisme	116
Negara Islam Indonesia dan Paradoksi Sejarah Muslim	119
Islamofobia	122

Islam dan Kebangsaan

Islam sebagai <i>Core</i> Elemen Bangsa	127
Nasionalisme dan Patriotisme	130
Hoaks	134
Multiple Layers of Nationalism.....	137

<i>Man of the Years: HRS dan Ahok</i>	140
Ulama sebagai Legislator dan Interpreter.....	143
Demonstrasi 212 dan Penciptaan Equilibrium Baru ...	147
Demo 212.....	150
Marginalisasi Ulama	154
Pancasila sebagai Ideologi Terbuka	157
UAS sebagai Tokoh Adat Melayu	159
Nalar Melayu.....	162
<i>Trust</i> sebagai <i>Software</i>	166
Yusuf	169
Lebanon.....	173
Profil Penulis	176

PENGANTAR PENULIS



Ketika sedang menjalani studi di Sydney, dari 2015 sampai 2019, saya rutin menulis artikel reflektif pendek, biasanya saya posting di Facebook, atau dimuat di surat kabar dan media online. Pada akhir 2018, Ustadz Nashrullah Zarkasyi, guru saya di Pesantren Gontor menghubungi saya, meminta agar tulisan-tulisan itu dikumpulkan dan diterbitkan. Awalnya, saya agak ragu, namun beliau meyakinkan bahwa tulisan itu layak dan sangat berguna jika diterbitkan. Kompilasi sederhana ini adalah untuk memenuhi harapan beliau, sebagai bagian dari bakti seorang santri kepada gurunya. Isinya mencakup berbagai hal dengan focus utama bertumpu pada isu-isu keislaman, kebangsaan dan modernitas.

Ini bukanlah buku ilmiah akademik, sebab sebagian besar ditulis di sela-sela istirahat siang di kampus ketika lelah menulis disertasi, atau coretan dalam perjalanan yang saya olah kembali ketika tiba di rumah. Oleh sebab itu, rangkaian isu tidak ditulis secara runut, tidak mendalam, dan sebagian adalah respons terhadap perkembangan social politik di tanah air yang saya teropong dari jauh. Mungkin ada beberapa artikel yang kehilangan konteks, namun saya tetap yakin bahwa gagasan yang ada di dalamnya masih relevan untuk direnungkan. Beberapa artikel yang berkaitan dengan sisi personal penulis, sama sekali tidak ditujukan untuk berbangga diri, namun lebih pada bagaimana pengalaman tersebut menjadi pelajaran bagi yang ingin menjalani studi di luar negeri. Ada studi dan keluarga, dan keduanya secara bersamaan adalah prioritas nomor satu.

Saya berharap kumpulan artikel pendek ini bisa memberikan hikmah dan pesan yang positif, baik bagi diri saya sendiri maupun pembaca. Selamat membaca dan hanya kepada Allah saya berserah diri.

Andri Rosadi.

Kehidupan Personal





Anak Guru

ᄁMekkah, 2001.

Aku sedang duduk tafakkur di Masjidil Haram, berzikir medekatkan diri kepada-Nya. Kepasrahan dan ketundukan total kepada-Nya membuatku seakan lebur dalam jagad kosmos, cair dalam keagungan-Nya. Tafakkur selalu menyadarkanku bahwa diri yang hina ini hanya mampu mendekati (*taqarrub*), bukan ‘sampai’ (*wushul*) kepada-Nya.

Allah adalah Al-Haqq (Yang Maha Benar). Perjalanan intelektualku tidak akan pernah mampu mencapai level Maha Kebenaran itu. Batas kemampuanku hanya pada level mendekati (*taqarrub*). Dalam tafakkur-ku itu, tiba tiba aku tersentak. Pundakku ditepuk oleh laki-laki tua berwajah Melayu yang duduk tepat di sampingku. Dengan lirik, ia bertanya, “Anak dari *mane?*” Oh, bapak ini ternyata dari Malaysia, gumamku dalam hati. “Dari Indonesia, Pak”, jawabku. “Bapak *keje* (kerja) ape?” ia kembali bertanya. “Guru,” jawabku singkat. “Oh, anak orang *kaye rupyene*,” gumamnya. Aku agak terkejut dengan komentar laki-laki tua itu. Guru=kaya.

ᄁLondon, 2008.

Aku diundang oleh seorang profesorku ke rumahnya. Ia keturunan Arab, namun sudah malang melintang mengajar di AS, Kanada dan Eropa. Sore itu, aku tiba di rumahnya. Ternyata ia

sudah menyiapkan hidangan khusus buatku yang ia masak sendiri: nasi biryani dan teh hangat yang direbus dengan kayu manis. “Andri, what’s your father’s job?”, ia bertanya mengawali perbincangan kami berdua. “A teacher”, jawabku. “Wow, you are lucky”, komentarnya sambil tersenyum. Guru=lucky.

Menghitung hari menunggu kepulangan, ingatanku kembali melayang pada dua kejadian itu. Benarkah aku anak orang kaya dan lucky? Bangunan pengetahuan bersifat akumulatif. Ia ibarat tembok tinggi yang disusun dari ribuan batu bata yang dimulai dari batu batu yang paling bawah: fondasi. Artinya, studiku saat ini adalah hasil dari akumulasi proses, yang fondasi formalnya dibangun sejak SD di sebuah desa terpencil di pedalaman Riau: Simpang Gaung.

Aku menamatkan SD di desa terpencil itu. Untuk mencapainya, harus naik perahu motor 10 jam dari kota kabupaten, atau 4 jam dari kota kecamatan. Akses jalan darat belum tersedia. Sungai adalah satu-satunya jalur angkutan. Desa itu hijau, bahkan sangat hijau, sejuk, dengan air sungai yang kemerah-merahan karena pengaruh lahan gambut. Hutan gambut yang lebat adalah tempatku mencari damar untuk dibuat dempol, bahan yang digunakan untuk menambal perahu mainanku yang terbuat dari papan. Di hutan itu juga, aku berburu burung, dengan cakang (katapel) yang selalu standby di leher setiap kali aku pulang sekolah. Sungai yang cukup lebar dengan airnya yang merah itu adalah kolam renangku. Kebun kelapa yang membentang luas milik masyarakat desa adalah playground utamaku: memanjat pohon kelapa, jambu air, rambai, manggis dsb. Aku bersyukur tumbuh dan besar di tengah lingkungan alam yang masih sangat asri. I am lucky. Boleh jadi, pernyataan profesorku benar!

Namun, tumbuh dan berkembang di lokasi yang secara geografis terpencil ternyata tak membuatku terisolasi dari dunia luar. Sebabnya: bapakku adalah seorang guru yang rutin sekali sebulan pergi ke kota

kecamatan atau kabupaten untuk mengambil gaji. Oleh-oleh yang selalu kutunggu setiap kali ayahku pulang dari kota adalah majalah Bobo, Ananda, Canang, Si Kuncung dan Estafet. Selain itu, bapakku juga pelanggan setia Majalah Panji Masyarakat dan Kiblat. Inilah yang membuka pikiranku dari isolasi geografis dan membuka mimpi-mimpi baru di kepalaku. Dalam hitungan jam, majalah-majalah itu biasanya habis kubaca. Untuk menunggu bulan depan, biasanya kubaca berulang-ulang sampai bosan. Di banding anak-anak sebayaku saat itu, ternyata aku lebih “beruntung” dan “kaya”. Bukan materi, tapi informasi. Boleh jadi, komentar laki-laki tua dari Malaysia itu juga benar!

Saat ini, aku benar-benar menyadari bahwa aku tak mungkin bisa berada di Sydney tanpa bangunan fondasi awal ketika SD yang telah memungkinkan akar tunggang mimpi dan anganku untuk belajar di berbagai negara tumbuh. Di sinilah keberuntunganku itu: visi bapakku sebagai guru mampu menembus batas dan isolasi geografis tempat aku dibesarkan. Keberuntungan lain, sebagai anak guru, aku mempunyai akses ke perpustakaan sekolah secara tidak terbatas. Bahkan, aku adalah petugas tak resmi yang memberi cap stempel pada setiap paket buku yang datang dalam program Inpres Pak Harto. Satu kebiasaan burukku adalah: buku-buku yang menarik selalu kusimpan dulu di rumah, baru kukembalikan ke sekolah setelah semuanya selesai kubaca. Tradisi baca inilah yang kupertahankan hingga saat ini. Dengan kata lain, tiket untuk studi di Sydney telah kucicil sejak kecil, dari sebuah desa terpencil: Simpang Gaung. Perjalanan ini menyadarkanku bahwa, antara harapan/mimpi dan realitas sebenarnya tak ada jarak. Itu hanya masalah waktu. Berjalanlah terus, maka mimpi itu akan semakin menjauh, diganti oleh realitas yang semakin mendekat.





Kilas (sebelum) Balik

Menjelang akhir 2014, aku dan teman-teman mengikuti *PhD Preparation Program* yang diadakan oleh *Australian Awards* di IAELF Kuningan, Jakarta. Program ini khusus memberikan pembekalan kepada calon mahasiswa doktoral penerima beasiswa AAS, diasuh dengan sangat baik oleh Prof. Bryan Robert, dibantu oleh Mbak Nawang Palupi. Dalam pembekalan itu, Prof. Bryan menjelaskan berbagai sisi akademik dan non akademik kehidupan mahasiswa S3, mulai dari relasi dengan *supervisor*, persiapan *candidature* hingga tips mengatur waktu antara studi dan keluarga. Ada satu saran yang masih berkesan: waktu makan malam, usahakan sebisa mungkin sudah berkumpul dengan keluarga. Artinya, belajar cukup dari pagi sampai sebelum Maghrib, namun konsisten. Mengapa ada *stressing* begini? Bryan menjelaskan suatu survei pernah menunjukkan hasil yang mengejutkan: 40% mahasiswa S3 yang telah berkeluarga berakhir dengan perpisahan ketika studi masih berlangsung. Salah satu penyebabnya, ketidakmampuan menyeimbangkan antara studi dan kehidupan keluarga.

Program yang diampu Prof. Bryan selama hampir 2 minggu ini sangat mengesankan. Tak heran, salah seorang temanku sampai menangis terisak-isak ketika menyampaikan kesan-kesan pada waktu

penutupan Program. Aku memang tidak ikut menangis, namun, tangis temanku itu juga mewakili perasaanku saat itu. Ketulusan, motivasi dan bimbingan seorang guru selalu mampu menembus relung terdalam seorang penuntut ilmu.

Selama studi, kegiatan membaca dan menulis dalam bahasa Inggris untuk *student* dengan kecerdasan minimalis sepertiku bukanlah pekerjaan mudah. Indikasinya: waktu yang kuperlukan untuk membaca satu artikel jurnal jauh lebih lama dibanding seorang *English native*. Oleh sebab itu, belajar dari pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam seringkali terasa belum cukup. Belum lagi virus *procrastinating* yang terkadang datang mendera tanpa belas kasihan. Lengkaplah penderitaanku. Dalam kondisi itu, biasanya aku melanjutkan kerja di rumah hingga larut malam, dengan resiko memakai waktu keluarga. Saat itulah, pengertian dan kesabaran pasangan hidup benar-benar diuji.

Sekedar bercerita. Suatu ketika, komputer sudah lama menyala. Mata melotot tak bergerak menatap layar, namun tak ada gerakan tangan yang menyentuh *keyboard*. Tak ada yang ditambah ataupun dikurangi. Ya...aku sedang *stuck*. Ini adalah penyakit lain yang diidap oleh mahasiswa minimalis sepertiku, selain *thesis in head syndrome*. Terkadang ide muncul silih berganti, namun tak semuanya bisa dikuasai. Semua yang ada dalam pikiran ternyata tak selamanya bisa jadi milikku. Suatu ide terkadang datang tak diundang, pergi pun tak diantar. Lenyap dalam lupa. Jarak pun tak bisa mengukur betapa jauhnya lupa dari pikiran. Dalam kondisi *stuck* itu, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Istriku masuk sambil senyum ngajak ngobrol. Secara reflek, kedua tanganku langsung menutup kedua telinga, pertanda sedang tidak menerima sinyal apapun. Dengan jengkel akhirnya ia keluar, namun masih terdengar sekilas ocehannya: "Aku ngobrol dengan tembok ajalah". Akutersenyum tanpa merasa berdosa sedikit pun.

Perjalanan ini sudah hampir mendekati garis *finish* dengan segala suka dan duka. Sinisme dan ledakan dalam konteks tertentu terkadang justru menambah kedekatan, sebab ia muncul dalam *frame* moral dan keadaan yang sama: hanya dilakukan pada ia yang terdekat, sebagai tanda diterima, walau dengan ekspresi negatif. Ketika sedang menikmati waktu bersama, dengan duduk di tepi pantai, atau menunggu anak-anak bermain di *playground*, sinisme dan kecuekan yang pernah dialami ini ibarat MSG dalam masakan: membuatnya lebih *yummy*. Liburan hanya bermakna bagi orang yang sibuk; ia sama sekali tidak fungsional bagi seorang pengangguran. Kerinduan hanya dirasakan bagi yang berpisah, dan kehangatan keluarga jadi lebih terasa setelah “stress” harian yang mendera. Selamat akhir pekan para sahabat semua. Semoga hari-harimu bermakna bagi yang di bumi dan di langit (Sydney, 25 Januari 2019).





Studi PhD: Mahasiswa, Suami, dan Ayah

Sabtu, Desember 2018. Aku melangkah ringan ke dalam gedung perpustakaan. Suasana sangat hening, karena mahasiswa sedang dalam *semester break*. Ketika melewati *Librarian Desk*, salah seorang dari mereka menyapa, tapi dengan nada yang agak 'ngenyek'. “Hi, good to see you. Welcome for coming during the break time. I hope you have your own life”. Aku langsung tertawa dan kemudian pergi sambil *nyengir*. Inilah kehidupan mahasiswa S3. Walau *semester break* datang silih berganti, namun enggan untuk menghampirinya. Selain itu, mahasiswa S3 juga mengidap penyakit yang ia pilih sendiri: “*thesis in head syndrome*”. Ini adalah penyakit yang tidak ada obatnya kecuali dengan *submission*.

Suasana perpustakaan sangat sepi, dan tentu saja aku sangat menikmatinya. Rumusnya, semakin sepi semakin baik, berbeda dengan pasar. Seorang intelektual harus terbiasa berkawan sepi, menyendiri dengan pemikirannya, dan yang lebih penting, menyendiri dalam *submission* versi lain pada Tuhannya. Kuliah ini, bagiku bukan hanya perjalanan intelektual dan akademik, tapi juga spiritual. Mengapa? Terlalu dalam masuk ke dalam dunia pemikiran sering kali membawa ke Gundahan dalam pikiranku. Ada yang hilang dan

membuatku gelisah. Aku puas tapi tidak bahagia. Aku *confident* tapi juga terasing. Dalam hal inilah, aku menemukan bahwa spiritualitas adalah satu-satunya penyeimbang alami. Studi ini telah mengajarkanku bahwa kuliah bukan hanya bicara tentang gelar yang sangat artifisial, tapi juga tentang menjaga keseimbangan jiwa secara berkelanjutan.

Baru sekitar dua jam membaca, telponku bergetar, tanpa suara, karena memang di-*silent* untuk menghormati tradisi yang telah tertanam di perpustakaan. Ketenangan adalah *software* perpustakaan. Jika ada yang masuk ke perpustakaan sambil mengobrol panjang lebar, yakinlah bahwa *software* ini belum di-*install* di kepalanya. Itulah sebabnya, ia akan *disconnect* karena “prosesornya” tak mampu memproses “data” yang ada.

Kulihat layar ponselku, tampak nomor istriku muncul. Telpon kuangkat dan bicara sangat perlahan. Ternyata si Kecil yang bicara. “Ayah masih lama pulang? Adek mau main sama ayah”, suara beningnya terdengar memelas.

“Ayah nanti sore ya pulangny, sekarang masih belajar”, aku berusaha membujuknya.

“Iyalah”, jawabnya dengan berat. Satu jam kemudian, telepon kembali berdering. Ketika kuangkat, ternyata menelpon lagi, sekedar bertanya: “Ayah kapan pulang, Adek mau main.” Aku termenung. Kuliah bukan hanya menyangkut keseimbangan personal antara pikir dan zikir, tapi juga sosial: sebagai mahasiswa, ayah bagi anak-anak, dan suami bagi sang istri.

Menjelang maghrib, seperti biasa, aku pulang ke rumah. Istri membuka pintu dengan senyum seadanya sambil berkata: “Mas, aku seharian belum makan, laper”.

“Lho, kan ada stok daging dan ikan di kulkas?” kataku keheranan.

“Iya, tapi gak enak kalau tak ada tempe. Aku lebih memilih gak ada ikan dan daging daripada gak ada tempe”, katanya beragumen.

Nasib punya istri orang Jawa. Sudah hampir tiga tahun tinggal di Sydney, konsep lauk pauknya tetap tak berubah: tahu dan tempe harus ada. Aku terbiasa tak makan nasi berminggu-minggu, apalagi tempe, berbeda dengan istriku. Ternyata, ada keseimbangan lain yang harus kujaga: kultural. Definisi makan dan lauk terkadang tak berubah mengikuti perpindahan fisik yang bahkan lintas benua. Dalam memori memang tak ada jarak dan batas. Oleh sebab itu, makan di Sydney tak berbeda dengan makan di kampung. Dalam hal ini, aku menemukan paradoks: aku sedang mempelajari perubahan sosial di kampungku; pada saat yang sama, aku juga menyaksikan kesetiaan pada tradisi di rumah perantauanku. Ketika sedang makan, apa sebenarnya yang dikonsumsi manusia? Makanan itu sendiri, atau juga pengalamannya? (Sydney, 8 Januari 2019).





Abang Sekolah

Suatu ketika, professor pembimbing mengundang seluruh mahasiswa bimbingannya ke rumahnya yang luas di pinggiran kota Sydney. Aku datang full team, dengan seluruh anggota keluarga. Di rumahnya, aku bertemu dan berbincang santai dengan teman-teman bule Aussie. Berbagai topik muncul silih berganti, hingga akhirnya ‘menyerempet’ tentang keluarga. Salah seorang mereka, pria paruh baya, mantan pendeta namun sekarang memilih jalan ‘lain’ bertanya padaku: “apakah membawa keluarga ke Sydney? Aku menjawab iya. “Anak-anakmu pindah sekolah ke sini?” ia bertanya lagi. Kembali kujawab iya. Wajahnya tiba-tiba berubah, penuh simpati: “itu tentu keputusan yang sangat berat buat mereka”, lanjutnya. Aku mengangguk, dan pikiranku langsung melayang pada anakku yang pertama, si Abang yang berumur 8,5 tahun. Saat itu, hari pertama ia harus berangkat ke sekolah. Ia kuantar sampai ke halaman dalam sekolah, sebuah kompleks gedung dengan halaman, play ground dan berbagai fasilitas bermain. Kami berdiri di halaman sekolah yang luas, tampak anak-anak lari berkejar-kejaran dengan teman-temannya penuh riang. Anakku berdiri termangu memandang mereka. Tak ada seorangpun yang ia kenal, warna kulit juga berbeda, bahasapun tak ia pahami. Ini benar-benar lingkungan yang asing baginya. Aku

menatap wajahnya, tak terasa, mataku berkaca-kaca. Ada rasa iba dan bersalah melihat pengorbanan anakku yang begitu besar, mengikuti ayahnya sekolah di negeri yang asing baginya. Di tengah keharuanku, tak kusangka, anakku berkata: 'Ayah pulanglah, Abang bisa'. Aku memeluk dan mencium kedua pipinya dengan sepenuh cinta yang kumiliki. Aku kemudian pulang dengan hati galau. Hari itu, aku benar-benar tidak mampu untuk pergi ke kampus karena tidak sabar untuk menjemputnya pulang dari sekolah dan menebus rasa bersalahku (Sydney, 30 Maret 2017).





Si Bungsu Mulai Sekolah

Februari 2017. Si bungsu, Adek, mulai masuk *Kindergarten*, TK. Ada hal lucu saat pendaftaran dan wawancara: ia selalu menjawab setiap pertanyaan guru sekolah dengan satu jawaban: yes, sambil tersenyum malu-malu. Yah, Adek memang belum mengenal Bahasa Inggris, walau sudah 6 bulan di Sydney. Waktunya lebih banyak dihabiskan bermain dan menonton Upin Ipin daripada kartun di TV Aussie. Sebulan pertama sekolah, aku harus mengantar dan menjemputnya setiap hari sehingga jadwalku ke kampus agak terganggu. Pada tiga hari pertama, ia selalu menangis dan tidak mau ditinggal sehingga terpaksa harus ditunggu cukup lama. Pada hari keempat, aku harus buat keputusan yang agak berat buatnya agar ia bisa keluar dari 'dunia' domestik yang nyaman menuju dunia publik yang lebih ramai dan tentu saja asing baginya. Asing dalam warna kulit, bahasa, lokasi dan yang terpenting, tidak senyaman 'dunianya' yang lama.

Hari itu, ia kuantar seperti biasa. Setelah berbicara dengan gurunya, ia langsung kutinggal di ruang kelas. Pintu kelas ditutup oleh sang guru, dan aku mendengar ia menangis dengan kuat dan menendang pintu berkali-kali. Aku sempat hendak berbalik ke belakang. Namun, sang guru yang lembut dan bijak itu berkata:

“Go...*don't worry, he would be fine*”.

“Dia harus melewati fase ini”, gumamku dalam hati. Ini adalah *psychological break* yang harus ia lalui agar dunia yang ia bayangkan bertambah luas.

Aku pulang ke rumah dan memutuskan untuk tidak ke kampus pada hari itu. Aku khawatir akan ada panggilan telepon dari sekolah karena ia masih menangis. Sampai sore tidak ada dering telepon yang masuk. Aku segera menjemputnya ke sekolah dengan datang lebih awal dari biasanya. Ketika bel berbunyi, anak-anak berjalan dengan teratur menuju *playground* untuk berbaris menunggu jemputan orang tua masing-masing. Mengejutkan! Ia tertawa lebar dan tampak sangat riang. Sang guru datang mendekatiku sambil berkata: ‘*He is so happy today, laughing a lot in the class*’. Aku senang, ia berhasil keluar dari dunia nyamannya dan memasuki dunia baru yang sebenarnya tak kalah nyamannya, hanya saja lebih menantang.

Selama setahun di TK, ia berhasil menyabet medali emas penghargaan dari sekolah. *Gold medal* adalah penghargaan tertinggi hasil dari akumulasi jumlah tertentu dari berbagai *reward card* mingguan. Durasi sekolah per *term* adalah sembilan minggu. Untuk meraih *gold medal*, seorang murid harus mendapatkan delapan *reward* mingguan. Apa dasar penilaiannya? Jangan pernah membayangkan bahwa *reward* itu diberikan karena seorang murid telah berhasil meraih poin atau angka sempurna dalam ujian di kelas. Tidak. Di sekolah tidak pernah ada angka. Yang ada hanyalah penilaian karakter moral dan kaitannya dengan proses belajar. So, dalam *weekly reward*, prestasi anak yang ditulis adalah, “*Always on task during learning time* (selalu belajar dengan baik saat jam belajar); *being safe and respectful learner* (seorang pembelajar yang santun) ; *always showing respect towards teachers and his peers* (selalu menghormati guru dan teman-temannya); *trying his best to learn in the class* (berusaha untuk

memberikan yang terbaik di kelas dalam hal apa pun)”. Pembangunan karakter seperti sikap, kerjasama, disiplin, kesungguhan dalam belajar dan mau berbagi dengan teman jauh lebih penting dari kecerdasan personal yang asosial.



Mid-Desember 2017, ia menyelesaikan Pendidikan TK-nya dan mulai di *Year One* pada Februari 2018. Ada banyak pengalaman dan cerita yang ia ungkapkan. Suatu ketika, ia pulang membawa gelas plastik yang telah ditanami biji kacang hijau. Beberapa pohon tauge tampak telah muncul. Ia meletakkannya di ruang tamu, tepat di depan TV. Tidak ada yang boleh menyentuhnya, apalagi memindahkannya. Ya, ini adalah salah satu materi sains yang ia pelajari di sekolah: ia kerjakan sendiri, rawat sendiri dan amati perkembangannya sendiri setiap hari. Tentu saja, ‘tauge’ ini didiskusikan dengan para teman dan gurunya di kelas. Lain hari, ia harus membuat daftar berbagai serangga yang ada di sekitar rumah, berikut gambar dan namanya. Untuk itu, ia kuantar ke taman terdekat dan kudampingi mengais-ngais rumput mencari berbagai serangga. Sekolah sedang mengajarkannya cara meneliti dan mengenali alam sekitar.

Kemarin, 13 Agustus, Adek ulang tahun. Sebagai orang tua, doa yang tulus selalu kuhaturkan agar ia selalu berada dalam bimbingan Allah dan kelak menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Teruslah belajar, anakku. Tidak sama, dan tidak akan pernah sama antara orang yang berilmu dan tidak berilmu! (Sydney, 14 Agustus 2018).



Lussie





Islam di Aussie

Setiap Sabtu sore, aku bekerja sebagai kasir di sebuah *convenience store* di daerah kota. Seperti biasa, ketika masuk waktu shalat Ashar dan Maghrib, toko selalu kututup selama lebih kurang 10 menit untuk mengerjakan salat. Dinding bagian depan dan samping toko terbuat dari kaca, sehingga aktivitas salat Ashar atau Maghribku bisa diintip dari luar. Sore kemarin, ketika sedang salat Maghrib, pintu toko diketuk berkali-kali. Namun, karena dikunci, pelanggan tidak bisa masuk. Selesai salat, pintu kembali kubuka namun tidak ada seorangpun di luar. Sekitar 30 menit kemudian, masuk seorang pemuda kulit putih, sambil menjinjing dua plastik belanjaan. Ia datang ke arahku yang sedang duduk di meja kasir dan berkata: *"I just want to apologize to you (diulangi 2x), because I knocked the door so many times. I haven't realized that you were praying"* --Maafkan saya, maafkan saya karena tadi mengetuk pintu berulang kali. Saya tidak tahu jika kamu sedang salat.

Dengan tertawa, aku menjawab: *"No worries man, that's fine. Thank you for your great understanding"* – Tidak masalah, Pak. Terima kasih banyak atas pengertian Anda.

Pengalaman ini menunjukkan di tengah kebencian terhadap Muslim yang disuarakan oleh P. Hanson, ada wajah lain Australia yang lebih 'toleran' dan menghormati perbedaan yang ada. (Sydney, 18 September 2016)



Stasiun Sydenham

Suatu ketika, Sabtu pagi pukul 6.00, aku menunggu kereta di Stasiun Sydenham menuju kota untuk bekerja. Suhu 3 derajat celcius, cukup dingin untuk ukuran Sydney. Stasiun cukup ramai. Namun sangat hening. Semuanya bersedekap menahan dingin. Hembusan setiap napas nampak jelas mengeluarkan uap. Dalam keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara musik yang keras menghentak namun dinamis, seperti alunan lagu Ricky Martin, orang Latin itu. Semua mata menoleh ke arah sumber suara, karena memang tidak lazim musik keras terdengar di ruang publik. Benar, banyak orang mendengar musik, namun *via* headset masing-masing. Ada privasi orang lain yang harus dijaga dan dihormati.

Seorang pria, memakai *high visible dress*, bersepatu *boot* tampak berjalan menuruni tangga stasiun. Peron kereta memang terletak di lantai bawah. Dari pakaian, tampaknya ia bekerja di sektor konstruksi; dari fisik, tampaknya ia berasal dari kepulauan di Pasifik. Di ketiak sebelah kirinya, tergantung *loudspeaker* kecil seperti botol. Itulah sumber suara musik menghentak itu. Dengan kalem, pria itu menuruni tangga. Kepalanya nampak digoyang-goyang dengan rileks.

Ada pelanggaran privasi di ruang publik oleh pria itu. Namun, mengejutkan, hampir seluruh penumpang di stasiun tersenyum, mungkin geli, lucu. Beberapa orang bahkan ikut berjoget ringan

menikmati musik itu. Petugas stasiun nampak tak henti tersenyum. Pria itu dan musiknya memang tidak lazim, namun ia hadir di waktu yang pas dan lokasi yang tepat. Ia dan musiknya mencairkan kebekuan, dan menghalau keheningan yang bisu. Ternyata, tak semua yang 'bising' itu mengganggu, dan tak semua keheningan ditunggu. Ada waktu dan konteks yang membuatnya bermakna. Ketulusan menerima dan memahami membuatnya jauh lebih bermakna. Akhirnya, kereta tiba, aku melangkah ringan ke dalamnya, dengan senyum yang masih mengambang (Sydney, 28 Agustus 2018).





Australian Day

The Rock, kawasan kecil nan ramai di pusat kota Sydney adalah saksi hidup kedatangan bangsa kulit putih ke benua Oz. Saat itu, 26 Januari 1788, beberapa armada kapal dari Inggris mendarat dan menandai awal sejarah kolonisasi sekaligus penindasan terhadap Aboriginal. Ribuan penduduk asli dibunuh. Mereka yang masih hidup mengalami diskriminasi ekstrem. Hukum yang melegitimasi terjadinya *stolen generation* terhadap Aboriginal bahkan baru dicabut pada 1979. Saat ini, para tokoh Aboriginal masih mengatakan: “We don’t share equally this country” - kami tidak mendapatkan share yang adil di negara ini.

Untuk mengenang supremasi pendatang, setiap 26 Januari diperingati sebagai ‘*Australian Day*’, namun ternyata festival itu terasa menyakitkan bagi sebagian besar suku asli, Aboriginal, yang menyebutnya sebagai ‘*Invasion Day*’. Ada ketersinggungan yang amat dalam di kalangan Aboriginal: penindasan yang mereka alami dirayakan sebagai festival nasional. Memori Aussie sebagai bangsa ternyata memang tidak sama: ada yang melukai dan ada yang terluka; ada yang menindas dan ada yang tertindas. Namun, ketika sejarah dan kebenaran dibentuk oleh *power relation*, alih-alih bisikan nurani dan fakta historis, narasi-narasi ketimpangan dan penindasan hanya

akan dianggap angin lalu, ditelan oleh narasi supremasi atas kaum tertindas. Menariknya, sejarah relasi yang ‘timpang’ antara *the White* dan Aboriginal ternyata tidak ada di dalam kurikulum sekolah Oz, sebagaimana sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia tidak diajarkan di sekolah Belanda.

Fakta ini, sebenarnya bukanlah milik khas pengalaman Aboriginal. Nun jauh disana, di benua Amerika, bangsa Indian juga mengalami nasib yang sama: dibunuh, ditindas, dan didiskriminasi oleh pelaku yang datang dari negeri leluhur yang sama: Anglo-Saxon. Ratusan ribu bangsa Indian dipaksa meninggalkan wilayah Timur menuju Barat, di bawah undang-undang yang disahkan Kongres pada 1830. Perjalanan pindah itu penuh dengan air mata dan terekam erat dalam memori bangsa Indian.

Di Oz, kedatangan bangsa kulit putih telah mencerabut Aboriginal dari tanah adat mereka. Tanah adat, bagi suku asli itu, adalah ruang tempat *rasa* sebagai manusia dan tanah sebagai ibu menyatu. Bagi Aboriginal, tanah kelahiran mereka layaknya seorang *Ibu*, refleksi dari adanya sakralitas dan hubungan timbal balik yang penuh makna. Namun, ketika para pendatang itu tiba, orang-orang Aboriginal dipaksa hidup dengan hukum *British* di tanah dan kampung halaman mereka sendiri. Komunalisme tiba-tiba diganti dengan kepemilikan pribadi dan individualisme; *rasa* bersatu dengan alam tiba-tiba diganti oleh eksploitasi. Tanah komunal mereka tiba-tiba dikavling-kavling oleh para pendatang sehingga mereka tercerabut dari ruang budaya yang telah mereka jalani selama berabad-abad.

Di negeri yang bernama Indonesia, keterperanjatan yang sama juga dialami oleh masyarakat lokal. Sebuah desa di Riau, sebagai contoh, tiba-tiba tak bisa lagi membuat perahu dan kapal yang menjadi keahlian mereka selama ini. Hutan sebagai sumber kayu yang selama ini mereka anggap milik bersama ternyata habis dikavling

oleh para taipan, dengan batas hampir ke tangga rumah mereka. Penjajahan, dalam hal ini, ternyata tidak berkaitan dengan warna kulit. Ia bukanlah kelakuan khas si mancung yang putih, tapi juga dilakukan oleh si pesek yang sawo matang dan juga kekuningan itu.

Secara historis, memang tidak satupun yang membantah Aboriginal sebagai suku asli Oz. Namun, apakah klaim historis merupakan argumentasi yang valid dalam ranah politik? Dalam kasus Aboriginal, tampaknya tidak. Ketimpangan adalah bukti nyata dari pengingkaran itu. Bagaimana dengan kasus lain? Israel adalah bukti dari pengecualian itu. Atas dasar historis, para Yahudi-Zionis itu mengklaim kepemilikan atas Palestina dan mengusir para penduduknya, merampas rumah dan kebun mereka. Anehnya, Oz, selain US dan Uni Eropa, adalah pendukung setia klaim kosong itu. Namun, karena sejarah dan legitimasi politik dibentuk oleh relasi kuasa, maka klaim Yahudi itu, yang tak lebih dari pembenaran daripada kebenaran, mendapatkan dukungan politik luas dari Oz.

Andai klaim historis ini berlaku universal, maka dunia akan menyaksikan kembalinya para keturunan Anglo-Saxon dari Oz dan New Zealand berlayar menuju Britain, negeri leluhur mereka, sebab Oz adalah milik Aboriginal dan NZ milik Maori; US dan Kanada juga akan kembali ke pangkuan bangsa Indian, sebab Trump dan keluarganya harus kembali ke negeri moyangnya di Inggris sana. Namun, sekali lagi, klaim historis itu hanyalah milik khas Zionis Yahudi di Palestina, bukan bangsa lain walaupun sama-sama manusia.

Lantas, apa yang harus dilakukan? Harus ada penghargaan yang tulus terhadap eksistensi kehidupan tanpa memandang agama dan ras. Tingginya angka kematian para narapidana dari Aboriginal dan banyaknya anak-anak mereka yang menjadi *state children* adalah permasalahan yang menunjukkan memang masih ada permasalahan, setidaknya dalam benak kaum Aboriginal. Oz, sebagai negara modern

tampaknya akan terus melakukan perbaikan, terutama dalam ranah politik. *Green Party*, setidaknya telah menunjukkan simpati dan dukungan yang mendalam terhadap 'luka' kaum Aboriginal. Dalam *rally* pada 26 Januari yang lalu, dan juga diikuti oleh ribuan kulit putih, *Green Party* telah ikut berpartisipasi dan mendukung secara politik penghapusan/ pemindahan tanggal '*Australian Day*' itu. So, selamat (tinggal) *Australian Day*. (Sydney, 27 Januari 2018).





Emancipation, Equality dan Freedom

Ada tiga kata ajaib yang diusung oleh modernitas Barat: *emancipation*, *equality*, dan *freedom*. Mengapa ajaib? Sebab berfungsi sebagai ‘mantra mujarab’ yang bisa menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi nyata. Sebagai contoh, tafsir tradisional perkawinan antara laki-laki dan perempuan dianggap sudah kuno. Agar modern, harus diperluas mencakup *same-sex marriage* (SSM). Oz, di tengah pro-kontra di masyarakat, baru saja mengesahkan UU yang memperbolehkan SSM, mengikuti jejak Selandia Baru, US, dan beberapa negara ‘modern’ lainnya. *Signpost* jejak itu adalah emansipasi, kesetaraan, dan kemerdekaan. Basis pendukung SSM adalah Partai Liberal, sementara penentanginya didominasi oleh dua golongan: imigran Muslim dan penganut Katolik yang sudah berumur, di antaranya adalah mantan PM, John Howard. Penolakan Howard cukup dijawab dengan satu kalimat oleh pendukung LGBT: Howard adalah ‘*yesterday man*’. Ada hal yang bertolak belakang: penolak LGBT adalah masa lalu dan tradisional; pendukungnya adalah masa depan, modern. Para penentang SSM, oleh media Oz juga diberi label: ‘*not real and proper representation of Australia*’, *bigot*, tidak paham HAM, dan *social justice*. Intinya, definisi perkawinan yang hanya mencakup

intersex marriage adalah tradisional. Agar modern, harus mencakup SSM. Klaim sepihak seperti ini ternyata telah menjadi praktik lumrah dalam iklim demokrasi; ia tidak hanya menjadi milik khas kaum radikal fundamentalis.

Para penentang LGBT adalah mereka yang masih berafiliasi pada nilai-nilai tradisional yang bersumber dari agama. Di Sydney, basis penentang SSM adalah kawasan *Western Sydney* yang banyak dihuni oleh kaum imigran Muslim dan Katolik. Media *Oz* menyebutnya sebagai '*Bible and Koran belt*'. Pra-referendum, beberapa kali khatib salat Jumat mengingatkan para pemilih Muslim agar menjawab 'no' dalam voting tersebut, sambil mengingatkan segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Pasangan gay sering menyebut diri mereka 'two-dads family' dengan anak adopsi. Perilaku ini, menurut para imam Muslim, seperti Imam Masjid Punchbowl, sangat egois sebab tidak mempertimbangkan masa depan anak adopsi tersebut. Benar, secara ekonomi anak itu tampaknya akan terjamin, tapi bagaimana dengan kebutuhan psikologisnya? Kebutuhannya pada sosok seorang ibu? Sikap para imam Muslim ini kemudian menjadi headline di harian "The Telegraph", disertai tuduhan bahwa rigiditas ini bertentangan dengan nilai-nilai multikulturalisme *Oz*.

Sekulerisme di Barat bukan diawali dengan pemisahan negara dengan agama, tapi dengan runtuhnya konsep *society*. Legalisasi SSM adalah penyempurna dari proses sekularisasi tersebut, sebab refleksi dari runtuhnya konsep tradisional keluarga inti. Semua proses legalisasi ini bisa berjalan *smooth*, menurut Roy, karena nilai-nilai Kristiani Barat telah mengalami sekularisasi dengan sempurna.

Bagaimana dengan masyarakat Muslim Indonesia? Sekularisasi adalah prasyarat agar nilai-nilai dan perilaku 'modern' Barat bisa diterima. Dalam ungkapan lain, sering dikatakan agar nilai-nilai Islam

kompatibel dengan modernitas. Modernitas Barat adalah ‘model for’ (meminjam istilah Geertz), termasuk bagi Islam Indonesia. Bagaimana sekulerisme itu masuk? Yang paling terasa namun tidak tampak adalah melalui liberalisme pemikiran yang berpotensi meruntuhkan nilai-nilai tradisional masyarakat Indonesia, terutama yang Muslim. Ketika telah berhasil dikonversi menjadi liberal, pada saat itu, masyarakat Muslim pada hakikatnya telah tercerabut dari agamanya sebagai *key-orientating value* dan sumber utama spiritualitas. Selanjutnya, akan berubah peran menjadi satelit budaya Barat yang dengan senang hati mengekor dalam segala segi. Dalam kondisi ini, sikap eklektik dan kritis terhadap Barat tak akan pernah menjadi arus utama dalam masyarakat Muslim, dengan satu alasan: kalangan terdidik Muslim, dengan pengetahuan agama yang mumpuni masih minoritas. Menariknya, dalam kondisi itu, sikap ‘kritis’, atau dalam tataran tertentu, ‘bawel’ terhadap Islam justru menjadi lumrah. Suatu anomali yang sempurna.

Apa ujung dari sekulerisme dan liberalisme? Jawabku hanya satu: *global capitalism*. Jangan lupa, perkembangan sekulerisme dan liberalisme di seluruh dunia tidak ada yang berjalan secara ‘natural’; ada sponsor, agen, dan agenda yang dirancang dengan sangat baik, yang berfungsi untuk merekayasa proses perubahan sosial di berbagai negara. *Once it is done, capitalism* dengan segala perangkat nilainya akan masuk tanpa perlu mengetuk pintu. Setelah itu, kenyataan sebagai bangsa konsumen dan pengekor harus diterima dengan ikhlas. Saat itu, ungkapan populer penganut Poskolonial di Afrika akan berlaku di negeri ini: ketika orang kulit putih datang pertama kali ke negeri kita, mereka punya Bible dan kita punya tanah (sumber daya alam). Ketika mereka kembali ke negaranya, mereka membawa SDA dan meninggalkan Bible untuk kita. Saat itu, baru disadari bahwa para kapitalis ternyata tidak meninggalkan apapun yang bisa dipakai untuk

menghapus air mata penyesalan, walau sekedar kain yang buruk. Entahlah, mungkin aku termasuk *yesterday man* dan terlalu 'kolot' untuk memahami modernitas ini! (Sydney, 22 Desember 2017).





Palestina dan Imperialisme Israel

Laki-laki tua itu berjalan perlahan menuju mimbar. Kulitnya gelap mengkilat, rambutnya sudah memutih, namun suaranya masih jelas: tegas dan bertenaga. *Uncle Leslie*, begitu ia biasa dipanggil. Ia lahir dalam sebuah tenda yang didirikan tepat di halaman suatu rumah sakit. Mengapa tidak di dalamnya? Itulah yang sedang ia ceritakan. Rumah sakit itu, katanya, walau di depan mata, tapi ternyata sangat jauh, karena dipisahkan oleh jarak fase evolusi. Jarak geografis masih bisa ditempuh, namun tidak dengan ‘jarak’ evolusi. Saat itu, di rumah sakit, dan di berbagai fasilitas umum, masih berlaku aturan bahwa orang Aboriginal dan anjing tidak diperbolehkan masuk. Dalam kacamata evolusi, Barat, yang berkulit putih itu, adalah puncak evolusi peradaban manusia. Selain Barat adalah *the rest, primitive*, sama dengan anjing. Keluarga Leslie tidak bisa mengubah takdir: terlahir sebagai Aboriginal. Oleh sebab itu, mereka hanya bisa menerima, tapi tidak meratapi.

Pedih, perih, dan terhina berpadu menjadi satu. Kenyataan bahwa peristiwa itu terjadi di kampung halaman sendiri membuat luka itu bertambah dalam. Ada keanehan yang membuat peristiwa itu sulit diterima. Keadaannya ibarat seseorang yang mati kehausan di

tepi danau yang jernih; ibarat mati kelaparan di tengah lumbung padi. Beranjak remaja, Leslie mulai memahami kenyataan itu. Kemudian, ia transformasikan menjadi bara api untuk menyulut perlawanan menentang ketidakadilan.

Setelah *Uncle* Leslie menuturkan narasi sebagai korban kolonial itu, kami berjalan ke luar ruangan untuk menyusuri setiap sudut kampus yang dikelilingi oleh perumahan kaum kulit putih dan kantor-kantor industri. Tak ada lagi perkampungan Aboriginal. Ketika sedang berjalan, tanganku didekap oleh seorang wanita tua Aboriginal. Mulutnya tak pernah berhenti bercerita, sambil tangannya menunjuk-nunjuk ke beberapa sudut, “Dulu rumahku di sana”. “Itu rumah temanku”. “Dulu di sana ada semak belukar, tempat kami bermain”. Aku membiarkan wanita tua itu ‘bernostalgia’ menceritakan nasib kaumnya. Namun, ingatkanku seketika melayang ke Edward Said, pemikir Palestina itu. Suatu ketika, ia kembali ke Palestina untuk melihat kampung halamannya, sekedar untuk memanen kepedihan: rumahnya, rumah kakeknya, dan rumah kaumnya telah berubah menjadi pemukiman Yahudi. Ada kepedihan yang sama antara apa yang dirasakan Leslie dan Said. Kolonialisme adalah *frame* yang membuat pengalaman itu serupa.

Leslie, bagaimanapun, jauh lebih beruntung. Pemerintah Oz, ketika dipimpin oleh Kevin Rudd telah mengakui hak eksistensial kaum Aboriginal, disertai permintaan maaf yang dalam atas semua yang telah terjadi pada masa lalu. Sejak itu, kaum Aboriginal mendapat berbagai fasilitas dan *privelese* untuk akselerasi perkembangan mereka. Said, hingga dijemput ajalnya, masih menyaksikan nasib bangsanya yang terusir dan tertindas, propertinya dirampas, dan pergerakan mereka dibatasi. Sharabi, pemikir Palestina lainnya, juga mengabadikan kepedihan itu dalam bukunya, *al-Jumar wa al-Romad*: “Kampungku...aku tidak akan pernah bisa lagi kembali kepadamu”.

Kampung itu telah menjelma menjadi pemukiman Yahudi yang asing. Pendudukan itu, bisa terus berlangsung, kata Sharaby dalam *al-Naqd al-Hadlary*, karena bangsa Arab telah berubah menjadi ‘fossil’, membatu, dan kehilangan daya kritis dan juang.

Bayangan nestapa Palestina tidak hanya dekat dalam pikiranku, tapi juga pengalaman personalku. Suatu ketika, di London tahun 2008, aku menemui Direktur Pendidikan Kampus, mengeluhkan perilaku ‘tidak menyenangkan’ seorang dosen yang sangat dingin, murung, dan hampir tidak pernah tertawa. Dengan tatapan tajam, sang profesor menatapku: “Andri, bisakah kamu mengerti, dia adalah korban yang selamat dalam pembantaian di kamp pengungsi Palestina Shubra dan Shatilla. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, keluarganya dibunuh dan bangsanya dibantai Israel”. Seketika diriku tercekat mendengar jawaban itu. Bibirku tak mampu berkata. Ada simpati yang sangat dalam muncul di hati. Tragedi itu telah merenggut hampir seluruh *element of joys* dalam hidupnya.

Penjajahan selalu berjalan seiring dengan duka nestapa. Kita tak perlu belajar untuk mengetahuinya, sebab memori kolektif kita sebagai bangsa masih sangat dekat dengan itu. Oleh sebab itu, bara api (*al-jumar*) dukungan untuk kemerdekaan Palestina harus tetap digaungkan agar terus menyala, menghanguskan ‘kayu bakar’ kolonialisme menjadi *romad, ashes*, abu yang beterbangan. Ya, Israel hanya bisa dipahami dalam kacamata kolonialisme Barat, sebab eksistensinya tak lebih sebagai negara fungsional yang menjalankan fungsi kolonial di kawasan itu. Kita boleh berbeda dalam memandangnya. Namun, seharusnya tetap sepakat dalam mendukung perjuangan Palestina. Jiwa dan semangatku akan terus bersama Palestina demi berulangnya kembali ko-eksistensi yang damai antara Muslim, Yahudi, dan Nasrani di kawasan itu (Sydney, 17 Desember 2017).



Renungan Keagamaan





Puasa dan Kultur Konsumtif

Globalisasi telah menjadikan dunia yang kita huni ini seperti kampung kecil: semua serba terhubung, dan budaya di suatu tempat yang jauh bisa diadopsi oleh kelompok lain tanpa perlu berinteraksi langsung. Perubahan masyarakat dunia menunjukkan semakin pudar dan cairnya batas-batas geografis atau ruang. Ada mobilitas sosial dan intelektual yang semakin intensif; arus orang, barang, informasi, ide, dan nilai semakin intensif dan berkelanjutan. Kita menemukan sebuah *Islamic Center* yang megah di pusat kota London dan Paris. Pada saat yang sama, kita juga melihat warung-warung KFC, Starbuck, dan parfum Paris di sekeliling kita. Arus pertukaran ini telah menyebabkan terjadinya perubahan dalam masing-masing kebudayaan. Dunia semakin terintegrasi ke dalam suatu tatanan yang bersifat global, termasuk kebudayaan.

Namun, globalisasi bukanlah ruang bebas tempat kita semua memiliki posisi dan peran yang sama. Di dalamnya, ada struktur dengan peran yang tentu berbeda antara mereka yang berada di *center* dengan mereka yang berada di pinggiran. Tak bisa dipungkiri bahwa untuk saat ini, pusat struktur itu adalah Barat.

Salah satu wujud globalisasi adalah dunia yang semakin tergantung dalam komersialisasi dengan budaya konsumtifnya. Komersialisasi

membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar yang berakibat pada terjadinya buruh migran (*migratory labour*). Pada saat yang sama, produk-produk teknologi yang dihasilkan juga menyebar sangat cepat ke seluruh dunia. Dunia komersialisasi inilah yang kemudian mengubah wajah dunia, termasuk agama dan kebudayaan.

Bagaimana perubahan itu terjadi? Hal ini diawali dengan perubahan pola produksi yang kemudian mempengaruhi pola konsumsi. Barang-barang terus diproduksi secara masif dengan perubahan teknologi yang sangat cepat. Pada saat yang sama, kebutuhan manusia terhadap barang-barang tersebut relatif telah terpenuhi. Lantas, kemana hasil produksi masif itu akan dipasarkan? Jika pemasaran terhenti, pabrik-pabrik yang menjadi *core* kapitalisme akan tutup. Untuk keperluan inilah, kemudian diperlukan rekayasa kultural: mengupayakan orang-orang yang sudah tercukupi kebutuhannya tersebut mau membeli produk-produk baru yang diproduksi oleh pabrik-pabrik itu. Bujuk agar mereka yang tidak butuh menjadi butuh kembali sehingga mau membeli produk baru tersebut. Pola konsumsi kemudian mengalami pergeseran: dari awalnya untuk memenuhi kebutuhan, kemudian untuk prestise, dan kemudian demi *image*. Ujung tombak perubahan ini dilakukan oleh media melalui iklan dengan menampilkan figur-figur berpengaruh.

Budaya konsumtif kemudian terbentuk. Sebagai ilustrasi, fakta berikut layak dikemukakan sebagai contoh berkembangnya proses kultur ini. Suatu ketika, di salah satu papan reklame kota London, terpampang gambar seorang perempuan muda berkaos putih. Di bagian depan bajunya, tertulis jargon menarik: *born to shop*. Ya, manusia terlahir untuk berbelanja. Oleh sebab itu, pusat perbelanjaan telah berubah menjadi kiblat baru dalam kehidupan sehari-hari. Belanja jadi hobi dan wisata kuliner jadi gaya hidup. Dengan kultur *shopping* ini, manusia benar-benar berubah menjadi makhluk yang sangat berorientasi material. Inilah *software* yang menjadikan

kapitalisme bisa beranak pinak di berbagai kawasan di seluruh dunia. Tanpa roh ini, kapitalisme global tak lebih dari sosok seorang manusia yang kurang gizi: lunglai, kulit keriput, dan wajah muram. *Shopping* adalah manifestasi dari kultur konsumtif yang berkembang dalam masyarakat global tanpa melihat agama dan ras.

Ketika penetrasi kapitalisme global semakin intens yang ditandai dengan kemunculan ruang-ruang konsumen, seperti pasar, mal, bank dan lokasi hiburan yang berorientasi pada uang yang sangat mencolok, peran masjid sebagai pusat ibadah juga mengalami tantangan. Ritual harian dan mingguan bukan lagi ke masjid, tapi ke pasar, mal, dan pusat rekreasi atau hiburan. Dalam hal ini, reproduksi kebudayaan di kalangan Muslim tidak hanya dipengaruhi oleh orang tua dan masjid, tapi juga pasar, media, dan lingkungan. Dalam banyak hal, saya berpendapat bahwa pasar/ pusat komersial lebih berpengaruh daripada keluarga dan masjid. Pasar terus menciptakan kebutuhan baru dan memaksa kita membeli sesuatu yang sebenarnya bukan kebutuhan pokok; kita telah menjelma menjadi masyarakat 'display' (pamer).

Sebagai *way of life*, Islam mengajarkan cara hidup yang sangat kompleks, termasuk dalam cara konsumsi. Ada batas jelas antara kebutuhan dan pemborosan (*tabzir*). Setiap Muslim dituntut untuk selalu menahan diri dari perbuatan mubazir, sebab seluruh harta yang dimiliki akan dihisab pada hari kiamat: dari mana sumbernya dan bagaimana penggunaannya. Akuntansi dan audit Allah sangat canggih. Seluruh *income* dan *expenditure* akan dipertanggungjawabkan dengan sangat *strict*. Oleh sebab itu, dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa yang paling lambat masuk surga adalah orang kaya. Jika kesadaran ini terpatri dalam ke sanubari, maka pola konsumsi kaum Muslim tentu akan sangat hati-hati, bukan berdasarkan nafsu dan gaya hidup. Dalam tataran inilah, moral Islam sebenarnya obat mujarab untuk mengobati kecenderungan agar tidak terjerumus ke dalam kultur konsumtif itu.

Salah satu ritual yang menuntut *refrain* yang kuat adalah puasa. Seorang Muslim dituntut untuk mengonsumsi secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Namun, faktanya, puasa yang dilakukan selama ini tidak terlepas dari kultur konsumtif itu. Lihatlah tradisi kaum *the have* Muslim yang *ifthar* di berbagai restoran dengan menu mahal, dan berbagai acara buka puasa bersama di hotel dan restoran. Tingkat konsumsi yang naik selama Ramadhan seolah berjalan paradoks dengan tujuan puasa: untuk menahan diri. Dalam tataran ini, harus diakui bahwa kaum Muslim sebenarnya juga telah terjebak ke dalam budaya konsumtif itu.

Ramadhan yang datang sepanjang tahun ternyata belum mampu mengerem nafsu konsumtif kita, apalagi menjelang lebaran. Maka bukanlah suatu kebetulan jika Ramadhan tahun ini datang di tengah pandemi: semua itu agar *self restraint* puasa Ramadhan memiliki daya dan efek yang lebih dalam sekaligus menohok. Marilah kita jadikan momen puasa yang bersamaan dengan berjangkitnya wabah Covid-19 ini, untuk kembali kepada pola dasar hidup seorang Muslim yang mengonsumsi sesuatu atas dasar kebutuhan daripada untuk prestise, *image*, apalagi sekedar untuk *display*. Jangan khawatir, bumi mampu untuk mencukupi kebutuhan seluruh umat manusia, namun tidak pernah mampu untuk memenuhi keinginan satu orang saja! Wallahu a'lam.





Puasa Sebagai Proses *Recalling*

Kota pada awalnya direncanakan sebagai tempat orang-orang bermoral dan beradab tinggal. Namun, dalam perkembangannya, kota justru telah menjelma menjadi sesuatu yang disebut oleh Akbar Ahmed, antropolog Muslim yang mengajar di London, sebagai “tempat pemeliharaan setan”. Banyak manusia yang tinggal di dalamnya *neurotic*, tergesa-gesa, tingkat kriminalitas tinggi, narkoba banyak tersebar, pelacuran, kehidupan yang individualistik dan nirempati antara satu sama lain. Sisi negatif kehidupan kota inilah yang kemudian disebut sebagai penyakit masyarakat (pekat). Seorang Muslim yang baik, tentu ia tidak akan pernah menjerumuskan dirinya pada pekat di atas, sebab ia memiliki mekanisme kontrol diri yang kokoh, yaitu ibadah. Ada shalat, sedekah, puasa, haji bagi yang mampu dan berbagai zikir yang jika dikerjakan dengan benar dan tulus akan membawa dampak positif pada diri setiap yang mengamalkannya. Secara internal, zikir akan meningkatkan kualitas positif yang ada pada dirinya. Secara eksternal, zikir tentu akan menjaganya agar tidak terjerumus pada pekat. Untuk menyebut beberapa contoh dalil normatif tentang ini, al-Quran secara eksplisit mengatakan shalat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar (al-Ankabut: 45); seseorang yang telah dewasa namun belum mampu menikah, dianjurkan untuk memperbanyak puasa.

Problem masyarakat modern adalah fungsi sosial agama mengalami penurunan seiring perubahan yang terjadi terus-menerus akibat berbagai hal, terutama mobilitas yang tinggi dalam dunia komersial dan kerja. Orientasi kehidupan mengalami banyak perubahan disebabkan ekonomi industrial modern yang terlalu menghamba pada materi dan miskin spiritualitas. Akibat langsung yang terjadi pada kehidupan keagamaan adalah memori dan koneksi kita pada aspek ketuhanan menjadi tumpul, dangkal, sehingga tidak mampu menyelami kedalaman spiritualitas yang seharusnya menjadi efek logis dari ritual rutin yang dijalankan setiap hari. Sebagai contoh, salat dan ibadah yang dijalankan menjadi tidak berefek terhadap perilaku sehari-hari. Akhirnya, dalam banyak hal, kita gagal menampilkan diri kita dalam perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Inilah yang disebut sebagai amnesia sejati. Orang yang lupa, tidak terhubung dengan apapun dan siapapun, *disconnected* dan *alien*.

Bagaimana caranya untuk kembali terhubung dengan memori keagamaan? Agama setidaknya memiliki dua aspek penting: keyakinan dan praktik (ritual). Keyakinan memberikan dasar-dasar normatif, sementara ritual memberikan momen “merasakan dan mengalami” pada pelakunya. Khusyu’ dalam salat adalah momen untuk merasakan, bukan memikirkan; menahan lapar, dahaga, dan nafsu selama puasa adalah momen untuk merasakan dan kemudian menumbuhkan empati pada nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; memakai ihram adalah momen untuk merasakan keagungan Tuhan, bahwa di mata-Nya, kekayaan, status dan jabatan, suku dan golongan sama sekali tidak berharga. Oleh sebab itu, semua tampil dengan pakaian, cara ibadah dan tempat yang sama.

Bisa dikatakan bahwa ibadah merupakan kondensasi memori keberagamaan. Tanpa itu, beragama jadi sebatas teori. Ibaratnya, seseorang yang belajar renang, sehebat apapun teori yang ia kuasai,

jika tidak pernah praktik, maka ia tidak akan pernah mampu menjadi perenang ulung. Teori, praktik, plus kontinuitas. Untuk menjadi Muslim yang baik, kita juga butuh dua hal itu: teori dan praktik yang kontiniu.

Cara mudah untuk terhubung dengan memori keagamaan dalam Islam adalah dengan kembali pada hal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dengan ini, kita mendapatkan dua hal sekaligus: teori dan praktik (ibadah) yang otoritatif. Oleh sebab itu, kita akan bisa “merasakan dan mengalami” *feeling* keagamaan yang dialami oleh Nabi, walau dengan kedalaman yang sangat minimal.

Ibadah, dengan demikian adalah *wasilah* atau cara untuk merasakan dan mengalami, bukan tujuan. Setiap ibadah di dalam Islam menawarkan “pengalaman” yang berbeda. Contohnya, salat, puasa, dan haji memberikan pengalaman yang berbeda bagi pelakunya. Khusus puasa Ramadhan, dalam banyak hal menawarkan berbagai pengalaman kepada kita. Setidaknya, puasa yang merujuk pada cara puasa Nabi akan memperbaiki pola dan makanan yang kita konsumsi. Jika Nabi berbuka dengan tiga butir kurma dan segelas air putih, kita berbuka dengan semangkok kolak atau es campur ditambah sepiring penuh nasi. Kemudian, karena kekenyangan, salat maghrib terpaksa diundur. Yak inilah, pengalaman berpuasa kita akan sangat jauh berbeda dengan yang dijelaskan oleh Nabi. Jika Nabi banyak berzikir dan tadarus selama Ramadhan, sementara kita memperbanyak tidur dan kerja duniawi, maka yakinlah bahwa pengalaman dan tujuan berpuasa yang dijanjikan Nabi bagi orang yang berpuasa tidak akan pernah kita rasakan dan raih. Selanjutnya, dengan cara puasa seperti ini, bagaimana kita bisa merasakan kedukaan Nabi karena berlalunya Ramadhan, sehingga beliau selalu berdoa agar dipertemukan dengan Ramadhan berikutnya? Akhirnya, taqwa sebagai tujuan akhir puasa hanya ada dalam angan. Di sinilah kita sebenarnya harus benar-benar

berduka. Sebagai penutup, semua ibadah, termasuk puasa, adalah sarana *recalling* pengalaman yang pernah dirasakan Nabi. Dengan itulah, kita akan terhubung dengan alam transenden. Wallahu a'lam.





Agama dan Bencana

Kita hidup di zaman dengan perkembangan teknologi dan sains yang sangat pesat. Tak heran, ada yang kemudian menganut saintisme: kebenaran hanya berdasarkan sains; di luar itu hanyalah mitos, khayalan belaka. Namun, pada sisi lain, kita juga harus mengakui bahwa perkembangan tekno dan sains itu ternyata tetap menyisakan “fenomena” yang berada di luar kontrol kita, seperti badai, banjir, gempa bumi, dan yang paling terbaru, pandemi Covid-19. Jenis bencana mendatangkan respons dan dampak yang berbeda-beda. Badai, sebagai contoh, sudah bisa dideteksi melalui satelit sehingga memungkinkan dilakukannya mitigasi. Fenomenanya nampak jelas sehingga kita bisa ‘escape’ dari bencana itu. Sebaliknya, gempa bumi masih belum mampu diprediksi oleh sains. “Fenomenanya” hanya bisa dirasakan, tapi tidak bisa dilihat. Datang secara tiba-tiba pada suatu waktu, menyisakan reruntuhan dan puing, bahkan mayat yang bergelimpangan.

Sebagai masyarakat modern, kita memiliki perangkat masyarakat maju: pemerintah yang *concern* dengan warganya; organisasi bantuan, infrastruktur yang memadai, dan pengetahuan modern yang memungkinkan kita untuk melakukan mitigasi. Namun, sekali lagi, fakta di lapangan menunjukkan bencana itu tetap mendatangkan

kerusakan dan problem sosial ekonomi, terkadang sampai menimbulkan krisis.

Lantas, apa sebenarnya yang kita sebut dengan bencana alam? Untuk konteks Eropa, hingga Abad Pertengahan, belum ada dikotomi antara bencana alam dan bencana akibat perbuatan manusia. Pada masa itu, gempa bumi dan peperangan berada dalam kategori yang sama: kesengsaraan (*tribulation*). Konsep bencana alam (*natural disaster*) adalah konstruk modern, baru muncul pada pertengahan abad ke-18. Muncul pertama kali dalam sebuah ensiklopedi yang terbit di Leipzig pada tahun 1740 dengan *entry* 'natur ubel', merujuk pada kerusakan yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan manusia. Contohnya: polusi udara, bencana alam, epidemi penyakit, gagal panen, kelaparan, peperangan, kebakaran, pencemaran air, dsb. Walaupun demikian, aspek teologis dan moral tetap menjadi salah satu elemen penting dalam pendefinisian bencana alam itu, terutama di kalangan agamawan dan konservatif. Oleh sebab itu, agama menjadi salah satu elemen penting dalam menghadapi dan menjelaskan bencana alam. Maka, hingga saat ini, dalam setiap bencana, kita bisa melihat komentar para agamawan, keterlibatan organisasi keagamaan dalam proses bantuan, dan bimbingan/ nasihat rohani untuk menenangkan para korban yang selamat.

Bencana seringkali menimbulkan krisis sehingga mendorong masyarakat untuk mencari keamanan ontologis, baik dalam tradisi ataupun agama, dan pada sisi lain, juga menjadikan mereka curiga pada kelompok budaya lain. Di India, persebaran Covid-19 berjalan seiring dengan meningkatnya Islamofobia, dengan tuduhan kaum Muslim adalah biang yang menjadi penyebar penyakit menular tersebut. Dalam tataran tertentu, sikap seperti ini bukanlah hal baru. Di Eropa pada Abad Pertengahan, kaum Yahudi pernah menjadi korban pembakaran karena dituduh menjadi penyebab terjadinya

bencana alam. Pada saat itu, masih jadi pandangan umum bahwa bencana berkaitan erat dengan dosa. Yahudi, dalam pandangan mereka, adalah pendosa dan oleh sebab itu, layak menjadi tertuduh.

Krisis dan konflik sosial di atas adalah efek dari munculnya *fear*, rasa takut, sebagai reaksi atas bencana alam yang dirasakan oleh para korban yang selamat. Kekuatan alam, hingga saat ini adalah sumber ketakutan dominan yang seringkali membawa kepanikan. Lihatlah suasana kota Padang jika terjadi gempa. Walaupun berskala kecil, namun kepanikan tetap terjadi dan terkadang membawa korban. Ketika manusia dihadapkan pada keterbatasannya sendiri, atau bahkan ketidakmampuannya dalam menghadapi bencana yang terjadi, disitulah jalan masuknya pintu agama. Melalui agama, manusia berpaling kembali kepada Tuhan untuk mencari perlindungan diri. Maka, agama menjadi salah satu elemen penting dalam proses *fighting*, *surviving* dan *explaining* bencana.

Bagaimana masyarakat memahami bencana? Berkaitan dengan Covid-19, ada tiga kategori umum yang bisa kita jelaskan: 1) Penjelasan rasional yang murni berdasarkan sains, terlepas dari aspek moral dan keyakinan agama sama sekali; 2) teori konspirasi yang berusaha mencari *scapegoat* yang harus bertanggungjawab terhadap pandemi ini; dan 3) penjelasan teologis yang mengkaitkan persebaran penyakit ini dengan dosa dan kesalahan manusia, seperti abainya manusia terhadap sesuatu yang boleh dan haram untuk dimakan. Pada ujungnya, penjelasan teologis lebih bertujuan untuk menyampaikan pesan moral sehingga berfungsi sebagai tindakan preventif.

Bagaimanapun, tiga kategori di atas tetap menyisakan pandangan dan keyakinan personal yang berbeda antara satu individu dengan yang lain. Kasus Covid-19 saat ini secara jelas menunjukkan cara masyarakat merespons dalam bentuk yang berbeda. Sebagian masih tetap beraktivitas seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa, sebagian

masih ada yang ‘ngopi’ di warung-warung, sebagian lagi membatasi diri di rumah secara ketat. Memahami *feeling* dan pandangan personal masyarakat ini sebenarnya sangat penting, karena berkaitan erat dengan cara mereka merespons bencana itu, sehingga respons berskala kolektif bisa diputuskan dan diterapkan. Sebagai contoh, abainya sebagian kaum Muslim pada maklumat MUI agar mengurangi kontak langsung, termasuk berjemaah di masjid berkaitan erat dengan pandangan dan keyakinan mereka yang berbeda mengenai pandemi ini. Dari media sosial, bisa diketahui bahwa salah satu pandangan berbeda itu berkaitan dengan adanya persepsi bahwa pelarangan shalat berjemaah di masa pandemi Covid-19 ini berkaitan dengan konspirasi Yahudi untuk menjauhkan kaum Muslim dari masjid. Dalam tataran ini, tampak jelas bahwa titik berangkat pemahaman MUI dengan mereka yang menolak fatwa itu berbeda jauh: MUI berangkat dari sains, sementara mereka dari teori konspirasi.

Jikapun berangkat dari *point* yang sama dengan MUI, yaitu sains, kemungkinan perbedaan cara merespons himbuan agar tidak berjemaah di masjid selama pandemi *corona* tetap menyisakan perbedaan. Hal ini berkaitan erat dengan kegagalan mengkombinasikan kesalehan personal dan kolektif. Sebagian kaum Muslim tetap mengedepankan kesalehan personal dengan terus berjemaah ke masjid dan mengabaikan keselamatan kolektif. Bagaimana mentransformasikan kesalehan personal menjadi publik dan kolektif? Salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah agama dengan seluruh institusinya merupakan *element of resilience* penting pada berbagai kelompok budaya. Oleh sebab itu, dalam suasana bencana, yang harus dilakukan adalah revitalisasi peran agama yang dikombinasikan dengan sains secara harmoni. Dalam kasus agama Buddha, sebagai contoh, ketika terjadi bencana Tsunami tahun 2004 di Samudra Hindia, para biksu Buddha di Thailand dan Srilangka,

bekerjasama dengan masyarakat awam memberikan bantuan pasca tsunami dalam kerangka *civil society*. Dalam kelompok Muslim, seharusnya kaum Muslim lebih mengedepankan masalah kolektif daripada kesalahan personal dengan cara lebih aktif dalam *relief work*, *charity* dan *volunteer aid* sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Pada tataran personal, seorang pribadi yang religius akan selalu berpandangan bahwa alam “*is never only natural*”, tapi bagian dari ciptaan Tuhan. Maka, kondisi normal dan bencana juga tidak pernah terlepas dari peran Tuhan. Ini saatnya untuk kembali bagi yang sadar dan untuk merenung bagi yang lalai. Peran penting agama saat ini adalah untuk mereduksi ketakutan dan kepanikan dengan menawarkan penjelasan yang lebih berimbang antara aspek *divinity* dan sains modern. Wallahu a’lam.





Hikmah Bencana

Setiap kali terjadi bencana, selalu ada perdebatan di beberapa kalangan mengenai status bencana itu: apakah murni bencana alam yang bisa dijelaskan secara saintifik? Lalu, adakah kaitannya dengan hal yang dipersepsikan sebagai ‘hukuman’ atas segala kemaksiatan yang terjadi? Atau, inikah azab dari Tuhan?

Ada banyak peristiwa dalam al Quran yang menceritakan cara Allah menurunkan azab pada berbagai bangsa. Umat Nabi Hud dimusnahkan dengan angin topan dahsyat dan dingin menusuk tulang selama 7 malam 8 hari. Mereka beterbangan seperti pelepah kurma kering yang diterpa angin. Bangsa yang digambarkan berpostur tinggi, kokoh dan tegap itu, dengan rumah yang super kuat dari batu di lereng-lereng gunung musnah tanpa sisa. Dalam sejarah Arab, mereka dikenal sebagai bangsa Arab Baidah (musnah), mengikuti jejak dinosaurus yang telah punah lebih dulu. ‘Ad bukan satu-satunya bangsa yang lenyap karena dimusnahkan secara ‘sengaja’ oleh Allah, ada juga bangsa Tsamud, umat Nabi Sholeh yang punah tanpa bersisa satu turunan pun. Sementara umat Nabi Luth yang gemar naik ‘kuda’ itu, negerinya dibalikkan Allah: yang atas jadi ke bawah dan bagian bawah pindah ke atas. Konon, Laut Mati di Jordan adalah negeri Luth yang naas itu. Ada juga umat Nabi Nuh yang dilanda ‘tsunami’ dahsyat

hingga airnya mencapai gunung, sehingga tidak ada lagi benda yang bisa dijadikan tempat berpijak; juga ada Fir'aun dan balatenteranya yang ditenggelamkan karena keingkarnya. Peninggalan arkeologis bangsa yang musnah ini masih ada yang tersisa. Selama di Azhar, aku merasa beruntung belajar di jurusan sejarah, sehingga punya akses belajar tentang berbagai bangsa yang musnah ini, dalam kacamata arkeologi plus religious moral. Jika semata-mata menggunakan pendekatan arkeologis, maka seluruh peristiwa ini tak lebih dari "bencana alam" yang sudah dan sering terjadi. Namun, al Quran memberi makna lebih: itu adalah bencana alam, namun punya kaitan dengan perilaku manusia.

Mengatakan bencana yang terjadi sekedar *natural disaster*, menurutku, terlalu naif, sebab dalam kacamata kaum beriman, tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi di alam semesta dengan sia-sia dan tanpa seizin Allah. Dominasi, atau bahkan monopoli saintisme dalam penjelasan bencana, dalam tataran tertentu, akan men-*detach* alam dari peran Tuhan (Rabb). Dalam tataran ini, kita akan kehilangan sensitivitas moral sehingga men-*detach* segala 'hikmah' dan 'pesan' yang terkandung dalam suatu bencana karena saintisme yang overdosis; sebaliknya, terlalu cepat menghukum disertai *sweeping generalization* bahwa suatu bencana adalah azab dari Allah juga bukan perbuatan bijak yang bisa diterima. Dalam pandanganku, setiap bencana yang terjadi mengandung *multiple messages*: azab bagi pendosa, peringatan bagi yang lalai, dan ujian bagi yang taat. Sementara itu, penjelasan ilmiah bahwa setiap kejadian adalah musibah, merupakan cara Tuhan bekerja di alam; ada sunnatullah.

Seluruh alam (makrokosmos) bertasbih memuji Tuhan, hanya kita saja yang tidak mengerti cara mereka bertasbih. Jika manusia (mikrokosmos) juga taat pada Tuhan secara tulus dan konsisten, maka ia akan berada dalam frekuensi gelombang yang sama dengan

makrokosmos. Dalam tataran itu, tidak akan ada elemen alam yang membahayakan dirinya sebab ia telah bergabung di dalam “gelombang” ketaatan seluruh elemen kosmos kepada Allah. Dalam tataran itulah, seorang individu yang beribadah tidak lagi berkata: “Hanya kepada-Mu aku menyembah, dan hanya kepada-Mu aku meminta pertolongan”, tapi bertansformasi menjadi “kami”, bergabung dengan seluruh elemen alam: “Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan (*iybaka na'budu wa iyyaka nasta'in*)”. Doa dan simpatiku yang tulus untuk semua korban. Semoga mendapat tempat terbaik di sisi-Nya (Sydney, 1 Oktober 2018).





Ramadhan: Momen Penyucian Diri

Ramadhan telah seminggu berlalu. Kepergiannya masih menyisakan duka di hati. Ada *feeling* kehilangan yang susah kuungkap dengan kata, dan itu memaksaku untuk selalu terpekur. Aku menyadari sepenuhnya bahwa Ramadhan pasti akan kembali menyapa setiap Muslim, namun belum tentu untuk menemuiku.

Ramadhan telah membawaku kembali menjadi pribadi yang selalu berusaha menangkap gelombang frekuensi transenden. Ia memberiku semangat hidup dan definisi diri yang lebih sederhana namun komprehensif di tengah kompleksitas identitas manusia modern yang rapuh dan tak berujung. Aku hanyalah seorang hamba Allah, anak dari hamba Allah, tanpa perlu asosiasi dan atribusi pada berbagai identitas sosial budaya. Ramadhan telah membuatku larut dalam kesibukan internal, sehingga membuatku lupa pada berbagai ambisi dan status sosial; aku merasa damai dalam ketakutanku pada Sang Pencipta yang Maha Tahu. Ia Maha Tahu beda antara ketulusan dan ambisi personal mengejar duniawi; Ia Maha Tahu beda antara kritik dan celaan di tengah silat lidah yang fasih dari penuturnya; Ia Maha Tahu beda antara fitnah, *hoaks* dan pencitraan di tengah seribu satu argumen dan motif para penyebabnya. Kesadaran pada

Kemahatahuan itu membuatku lebih banyak terpekur, diam, sebab seribu satu argumen tidak akan mampu menipu penglihatan-Nya. Dalam kondisi itu, ketulusan dan kepasrahan adalah jalan terbaik. Menjadi seorang Muslim, berarti menjadi seorang pribadi yang berserah diri, bukan pada manusia, tapi pada Sang Maha Hidup, yang Maha Pengasih namun juga Maha Pendendam; Maha Penyayang, namun juga sangat pedih azab-Nya.

Dalam riwayat, bisa dikatakan bahwa ketakutan pada Sang Pencipta adalah sumber dinamika, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Suatu ketika, 'Umar, si Amirul Mukminin, rela berpanas-panas memberi makan unta hasil zakat. Ketika para sahabat yang lain bertanya, mengapa tidak menyuruh para budak saja untuk memberi makan unta-unta itu, 'Umar menjawab dengan getir, "Kalian telah memikulkan beban Amirul Mukminin di pundakku, maka adakah orang lain yang lebih budak dariku?" Kesadaran *genuine* seorang pemimpin muncul bukan dari pakta integritas di depan publik melalui inaugurasi meriah namun artifisial, tapi dari kesadaran personal pada kehadiran Tuhan yang Maha Tahu, dan kemudian berdampak pada seluruh aspek kehidupan: perilaku, kebijakan, dan keberpihakan.

Masih tentang 'Umar. Suatu ketika, ia menunggang unta dengan terburu-buru menuju arah luar kota Madinah. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan 'Ali yang langsung mencegatnya, "Ada apa gerangan wahai Amirul Mukminin?" Dengan gelisah, 'Umar menjawab, "Seekor unta zakat lari, aku harus menangkapnya kembali". "Mengapa engkau tidak menyuruh orang lain saja yang menangkapnya?" 'Ali kembali bertanya. 'Umar menjawab, "Aku takut nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah".

Dikisahkan juga, bahwa 'Umar juga selalu ketakutan akan dituntut oleh Allah karena lalai menjaga amanat, walau sekedar seekor kambing yang tewas karena jatuh tercebur ke Sungai Eufrat.

Puncak tanggung jawab, dalam hal ini, bersumber dari *feeling* akan kehadiran Sang Pencipta yang Mahatahu. Berbohong, menebar fitnah, mencaci, pencitraan, pilih kasih, dan berbuat zalim adalah perbuatan yang dilandasi oleh kealpaan pada kehadiran dan pengawasan Tuhan, sebab tertutupi oleh ambisi-ambisi duniawi yang fana. Sebagai ibadah yang sangat privat, kesadaran pada kehadiran Sang Pencipta adalah motivasi terbesar dalam mengontrol pelaksanaan puasa. Tak seorang pun melihatnya, kecuali Dia. Oleh sebab itu, Allah sendiri yang akan membalasnya. Kesadaran itu hendaknya melandasi seluruh tindak tanduk setiap pribadi Muslim, apapun status dan jabatannya. Semoga kesadaran itu tidak ikut lenyap seiring perginya Ramadhan. Dari seorang hamba yang fakir pada 'aun rabbihi'. (Sydney, 22 Juni 2018).





Toleransi

*A*pa makna toleransi? Ungkapan bijak “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”, merefleksikan salah satu *core* toleransi itu: penghargaan pada lokalitas, yang mencakup dimensi ruang, waktu, dan juga manusia. Aku yakin bahwa setiap individu memiliki *feeling* lokalitas dengan segala makna yang terkandung di dalamnya. Sebagai penghargaan pada lokalitas, kita juga mengenal istilah *local wisdom*. Di Oz, toleransi adalah ketika para pendatang mau menerima dominasi norma dan etika kulit putih. Islam, sebagai satu-satunya agama yang memiliki syariat seringkali terbentur dengan kultur lokal bule tersebut. Kontroversi labelisasi halal bisa dipahami dalam konteks ini: ia menohok norma dan standar makanan kultur dominan. Maka, seorang Muslim tidak perlu tersinggung ketika diledek, “Halal itu jenis binatang apa, ya?”.

Orang yang bijak adalah mereka yang mampu memproduksi etika sesuai dengan lokalitas keberadaan mereka. Oleh sebab itu, *localizing* Islam akan selalu menjadi tugas sehari-hari kaum Muslim; proses penempatan identitas keislaman, dengan segala nilai yang mengaturnya, di tengah kultur lokal tempat Islam itu tumbuh. Dalam konteks Oz, menurutku keberhasilan proses ini ditandai dengan lahirnya ‘Australian Muslims’, bukan ‘Muslim in Australia’. Tidak mudah memang, tapi juga tidak mustahil.

Ndeso adalah mereka yang gagal memahami aspek lokalitas ini. Suatu ketika, masyarakat Kristiani London gelisah dan sampai melakukan protes. Apa sebabnya? Dewan Muslim Inggris ingin mendirikan Islamic Center dengan masjid yang besar mampu menampung puluhan ribu Jemaah. Siapa yang *ndeso* disini? Apakah umat Kristiani, yang sebagian besar justru tidak rutin ke gereja? Aku masih ingat ekspresi sahabatku, bule London, yang baru ke gereja ketika usianya sudah berkepala tiga. Dengan lugu, ia bercerita, ternyata gereja itu di dalamnya indah, banyak gambar dan juga terdapat patung :-).

Apakah penolakan *Londoners* merupakan isyarat meningkatnya intoleransi? Nanti dulu. Dalam konteks ini, aku cenderung untuk mengatakan justru kaum Muslim yang *ndeso*, karena ingin mendirikan masjid megah, besar di tengah mayoritas umat Kristiani. Harus diingat bahwa gereja terbesar di London, Katedral St. Paul, hanya mampu menampung 6000 jemaah. Lantas kaum Muslim ingin mendirikan masjid dengan kapasitas puluhan ribu Jemaah. Rencana pendirian masjid tersebut ternyata mengusik identitas kristiani *Londoners*, termasuk mereka yang tidak pernah ke gereja. Ada psikologi dan sentimen sosial yang gagal dipahami apalagi dirasakan oleh kaum Muslim ketika itu. Untunglah, Akbar Ahmed, sebagai seorang antropolog senior dengan terang-terangan mengkritik rencana kaum Muslim tersebut hingga akhirnya rencana itu dibatalkan.

Membangun, meletakkan, dan membuat suatu simbol yang masih dianggap asing, apalagi sangat mencolok, pada suatu lokalitas berpotensi mengusik sentimen sosial. Jangan bermain dengan sentimen ini, karena daya ledaknya sangat eksplosif dengan eskalasi yang terkadang sulit dikontrol. Anehnya, ketika sentimen itu diusik, pihak penguasa dengan gamblangnya menuduh bahwa rakyat telah berubah. Dengan ringan, penguasa berkomentar bahwa toleransi

dan tenggang rasa yang dulu begitu dibanggakan, sekarang telah memudar. Menurutku, bukan rakyat yang berubah semakin sensitif, tapi justru penguasa yang semakin bebal dan mati rasa. Mengelola toleransi, dalam tataran tertentu berarti mengelola sentimen sosial, dengan segala elemen abstrak yang dikandungnya. Membacanya tidak cukup dengan otak politis, tapi dengan hati yang bening. Semoga kita memiliki kemampuan untuk terus membangun simbol dan kultur baru yang 'd disesuaikan' dengan lokalitas. Jika gagal, kita akan menjadi 'alien' dan *deviant* di masyarakat. Wallahu a'lam (Sydney, 16 August 2018).





Jahiliah

Jahiliah adalah era yang disematkan oleh sejarawan Muslim untuk menggambarkan kondisi bangsa Arab pra-kenabian. Ada banyak makna jahiliah yang muncul, di antaranya tidak pandai tulis baca. Buktinya, kuatnya tradisi oral dan minus karya tulis. Makna yang lain adalah bangsa yang tidak memiliki kitab suci, berbeda dengan orang Yahudi yang memiliki Taurat. Apapun maknanya, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa di tengah kondisi ‘jahiliah’ tersebut, masyarakat Arab masih berpegang teguh pada konsep kehormatan diri. Salah satu dasar kehormatan itu adalah kejujuran. Bagi mereka, kejujuran adalah ‘harga mati’. Oleh sebab itu, orang yang ‘*amin*’ (terpercaya) dan ‘*siddiq*’ (benar), akan mendapat status yang tinggi, walau masih belia. Nabi mencapai status tersebut sebelum diangkat menjadi Rasul. Salah seorang sahabat Nabi bahkan bersumpah: ‘Jika Yang di langit membolehkan bohong, demi Allah aku tetap tidak akan berbohong’. Dalam suatu riwayat, juga diceritakan tentang seseorang yang masuk Islam dan bertanya pada Rasul, apa yang tidak boleh ia lakukan? Rasul hanya menjawab: “Jangan bohong”.

Kejujuran adalah substansi kehormatan diri, dan *social trust* terbentuk dari akumulasi individu-individu yang jujur. Kebenaran dan perilaku yang benar biasanya muncul dari orang yang jujur. Dalam

konteks itu, rendahnya *social trust* suatu masyarakat memiliki korelasi positif dengan rendahnya tingkat kejujuran masyarakat tersebut. Maka, jangan pernah bicara demokrasi di negeri ini jika kejujuran masih langka dan *social trust* masih ada di alam mimpi. Orang yang jujur sangat dekat dengan ikhlas, sebab kejujuran pada hakikatnya adalah membenarkan bisikan nurani yang bening ke dalam perbuatan yang nyata. Oleh sebab itu, kejujuran dan keikhlasan selalu melahirkan kebaikan. Kita tidak pernah mendengar orang yang menipu dengan ikhlas dan jujur, sebab keduanya adalah hal yang kontradiktif.

Di masyarakat yang ikhlas, melakukan suatu perbuatan disertai pencitraan dengan tujuan untuk membentuk ‘opini kebenaran’ demi kepentingan pribadi sungguh sangat memalukan. Makanya Khalifah ‘Umar melakukan sidak kondisi rakyatnya di malam hari, tanpa diiringi seorang penyair yang akan menggubah syair tentang betapa ‘merakyatnya’ ‘Umar kepada seluruh penjuru Arabia. Jika ‘Umar melakukan itu, maka ia telah melawan prinsip keikhlasan dan kejujuran dalam dirinya. Secara sosial, ia pasti dicemooh oleh rakyatnya. Pencitraan hanya berfungsi dengan baik dalam masyarakat yang memang penuh pamrih, dangkal keikhlasan atau budak penghasilan.

‘Umar mampu melakukan itu, karena kejujuran dan keikhlasan telah begitu kokoh menjadi fondasi kehormatan dirinya. Oleh sebab itu, perilaku-perilaku orang yang jujur dan ikhlas seperti ‘Umar di atas, selalu melahirkan kebenaran yang *substantive*, bukan hasil relasi kuasa. ‘Merakyatnya’ ‘Umar adalah rakyat yang *substantive*; miskinnya ‘Umar adalah miskin yang lahir dari keteguhan, empati, dan tanggung jawab yang sangat dalam terhadap kondisi rakyat; kebijakan ‘Umar adalah kebijakan yang melahirkan kebenaran yang *substantive*, bukan politis demi pencitraan. Belajar dari sini, aku meyakini bahwa kebaikan-kebaikan semu yang dilakukan dengan tujuan pencitraan

adalah salah satu sumbangan yang paling nyata dalam proses rusaknya bangsa ini, apalagi dilakukan oleh para *public figures*.

Kebenaran hasil pencitraan bukanlah kebenaran *substantive*, tapi lebih dari hasil relasi kuasa, tumbuh subur dalam masyarakat yang memang minus kehormatan dan kejujuran. Kuasa yang paling dominan dalam membentuk kebenaran adalah *state*. Oleh karena itu, membiarkan *state* membentuk *image*, opini, tanpa adanya *balance* akan menciptakan jarak pengetahuan dan kebenaran antara *the mass* dengan elit politik karena tidak adanya *sharing* dalam proses pemaknaan. Elit politik yang begitu akrab dengan kebenaran artifisial hasil pencitraan, dengan kuasa yang mereka miliki, telah berusaha untuk menjadikan kebenaran yang mereka bentuk menjadi *substantive*. Apa dampaknya? Kebenaran yang ambigu. Dalam memahami fakta dan berbagai kasus, kita terjebak pada konsep-konsep yang dalam banyak hal ambigu, karena memang proses terbentuk atau penggunaan konsep tersebut bukan untuk menjelaskan kebenaran yang sesungguhnya, tapi untuk memonopoli kebenaran yang dibentuk melalui relasi kuasa. Elit politik akan semakin leluasa melakukan hal itu jika didukung oleh sebagian masyarakat yang berpikiran ideologis. Penjelasan pola pikir ideologis yang paling gamblang adalah ketika saya berasumsi bahwa '*Whatever I think is a natural process*', dan pada saat yang sama menuduh yang lain tidak natural. Wallahu a'lam. (Sydney, 7 Agustus 2017).



Karl Marx

Saat itu, awal 2009. Aku baru keluar dari ruang kelas dan bergegas menuju lift hendak turun ke lantai dasar. Ketika lift tiba, Profesor pembimbingku keluar dari lift dan tanganku langsung dipegang, diajak ngobrol di ruangnya yang cukup besar tapi penuh buku. Sambil duduk berhadapan, setelah basa-basi, aku memulai percakapan: “Siapa yang paling berpengaruh dalam perjalanan akademik Anda?” “Foucault”, jawabnya tegas. Aku tidak heran, sebab ia meraih gelar doktor di bawah bimbingan pemikir Perancis tersebut. “Apa pemikiran Foucault yang paling berpengaruh pada Anda?” Aku kembali bertanya. “Anti Establishment”, jawabnya singkat.

Dalam perbincangan itu, ada satu cerita yang masih kukenang. Saat itu, ia masih mahasiswa, ia berjalan di kampus membawa salah satu buku Karl Marx. Tak sengaja, ia berpapasan dengan Foucault yang langsung menanyakan buku yang ia bawa. Dengan santai, ia menjawab membawa buku Marx, sebab ia ingin mengkritik pemikirannya. Tak disangka, Foucault berkata: “Kamu tak boleh masuk ke kuliahku sampai kamu membaca seluruh karya Marx”. Akhirnya, selama satu semester penuh, ia tidak kuliah dan menghabiskan waktu di perpustakaan ‘menikmati’ karya Marx. Namun, apa daya, ternyata ia tak mampu mengkritik pemikiran Marx. Kemudian ia datang

menemui Foucault dan berterus terang tidak mampu mengkritik pemikiran Marx. Foucault menjawab: “Jangankan kamu, aku saja tidak mampu, sebab argumen Marx dibangun sangat kokoh tanpa celah dalam mengkritik ideologi kapitalisme”.

Walau argumen Marx sangat kokoh, tapi ternyata realisasinya sangat rapuh. Akhirnya, ideologi kapitalisme-lah yang muncul sebagai jawara. Mengapa? Karena sosialisme Marx hanya punya satu roh, sedangkan kapitalisme punya banyak arwah yang mampu bermutasi ke berbagai bentuk. Bagaimana kapitalisme bermutasi? Dengan memperluas cakupan kuasanya, dan menciptakan domain-domain baru sebagai habitat untuk tumbuh dan berkembang. Sebagai contoh, tubuh biologis perempuan dikonversi menjadi ‘tubuh industri’ yang punya nilai jual secara ekonomi. Maka muncullah industri *fashion* dan seks, dengan legitimasi kuasa pengetahuan, sehingga tubuh industri perempuan tersebut tetap punya nilai ‘seni’ dan ‘kehormatan’. Dan yang terpenting, itu adalah ekspresi ‘kebebasan’! *Feminist discourse* dan segenap turunannya adalah wadah tempat arwah kapitalisme itu bermutasi. Mutasi arwah kapitalisme, dalam hal ini, selalu mensyaratkan hal lain: eksploitasi, baik manusia ataupun alam.

Kapitalisme melakukan ekspansi/mutasi melalui problematisasi dan kemudian datang dengan membawa berbagai resep: pembangunan, pertumbuhan, kesetaraan gender, demokrasi, dsb, namun minus moral. Lihatlah, di negeri ini, kekayaan alam diekstraksi secara masif, namun hasilnya mengalir ke negeri antah berantah. Perusahaan-perusahaan ekstraktif milik kapitalis, baik pribumi maupun asing jauh lebih banyak dari perusahaan negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat (Aku jadi ingat buku Roem Topatimasang, 'Orang-Orang Kalah' yang kubaca puluhan tahun yang lalu). Namun, pemerintahnya masih kokoh mengaku paling Pancasila, karena kehadiran kapitalisme memang tak pernah diakui

dalam *discourse* kita, tapi ia 'sangat hadir' dalam praktik. Ada empat keluarga yang menguasai kekayaan ribuan trilyun, setara dengan jumlah kekayaan 100 juta penduduk. Bagaimana itu bisa muncul? Eksploitasi yang dilegitimasi adalah satu-satunya penjelasan.

Bagaimana cara menghentikan mutasi roh kapitalisme? Jangan sediakan 'makanan' untuknya. Hal itu bisa dilakukan dengan berpegang teguh pada moral agama yang menjadikan manusia sebagai hamba Tuhan, bukan hamba materi. *Born to worship, not to shop!* Tidak mudah, memang, sebab dalam dunia kapitalis, segala sesuatu telah dikomodifikasi: waktu adalah uang; tidak ada makan siang yang gratis. Membantu dengan pamrih, nyata ataupun tersembunyi, adalah refleksi transparan dari roh kapitalisme itu. Oleh sebab itu, keikhlasan adalah racun baginya.

Akhirnya, saat berziarah ke makam Marx, aku harus membayar beberapa poundsterling. Ya, di tempat peristirahatannya yang terakhirpun, Marx dan para pendukungnya harus bertekuk lutut: kuburnya dikapitalisasi! Entah untuk alasan wisata, atau sekedar unjuk kuasa kapitalisme. Mutasi arwah kapitalisme tidak hanya di *shopping centre*, tapi menjalar hingga ke kompleks pemakaman. Makam Marx tidak terkecuali! Apakah aku harus menyerah? Jika ketidakadilan sosial telah *established*, maka anti kemapanan juga harus tetap *established* dalam diri ini (Sydney, 5 Mei 2017).





Otoritas Keagamaan

Dalam hierarki otoritas keberagamaan, Nabi berada pada struktur puncak. Kebenaran perkataan dan perilaku Nabi dilegitimasi oleh wahyu. Oleh sebab itu, ia tak mungkin salah; ia *maksum*. Pada masa hidupnya, Nabi merupakan tempat rujukan ‘hampir’ seluruh persoalan yang dihadapi oleh kaum Muslim saat itu, sehingga tidak ada perselisihan, baik dalam hal *furu’iyyah*, apalagi yang bersifat prinsipil. Dengan status dan peran yang begitu penting dalam otoritas keberagamaan, lantas mengapa Allah menghapus institusi kenabian ini, dengan mengatakan bahwa Muhammad SAW adalah penutup para nabi? Apa hikmah di balik ‘penghapusan’ institusi kenabian ini? Bukankah penghapusan institusi kenabian, berarti juga penghapusan struktur tertinggi otoritas keagamaan yang *maksum*, tidak pernah salah?

Hikmah terpenting dari penghapusan ini adalah Allah melimpahkan otoritas untuk menafsirkan kebenaran kepada setiap individu dengan merujuk pada dua warisan yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW: Kitabullah dan Sunnah. Keberagamaan menjadi bersifat otonom dan egaliter, karena struktur puncak yang dominan, *maksum*, dan dilegitimasi oleh wahyu telah dihapus oleh Allah. Dalam konteks ini, maka sangat relevan mengapa ayat yang pertama turun adalah ‘iqra’,

sebab bertujuan untuk membangun kesadaran dan kemampuan setiap individu; bahwa basis penemuan kebenaran pasca kenabian adalah ilmu. Dengan kultur 'iqra', maka dua warisan Nabi, Kitabullah dan Sunnah akan berfungsi dengan baik.

Dalam konteks di atas, saya selalu bertanya: mengapa struktur keberagamaan yang berbasis pada otoritas yang *maksum*, yang telah dihapus oleh Allah, diciptakan kembali oleh sebagian pengikutnya setelah beliau meninggal? Berdasarkan kultur 'iqra', seharusnya otoritas setiap individu berbasis pada pengetahuan (makanya pewaris para nabi adalah orang yang berpengetahuan/ ulama), tapi mengapa pada suatu kelompok berubah ke basis genealogis? Mengapa juga terjadi *sanctification* pada peristiwa tertentu, yang bertransformasi menjadi salah satu ritual pokok? Apakah ini menandakan kembalinya nilai-nilai politeisme ke dalam monoteisme? Tampaknya, Teori Gerak Pendulum Gellner, yang ia pinjam dari Hume, relevan untuk menjelaskan ini. Menurutny, ada '*Permanent oscillation in religious phenomena: the oscillation between polytheistic and monotheistic views*'. Entahlah, aku tidak ingin mengatakan unsur-unsur politeisme telah menyusup ke dalam monoteisme. Aku menikmati keberagamaanku saat ini, karena kuanggap masih bebas struktur. Jikapun ada perbedaan, lebih bersifat *achieved* daripada *ascribed*; lebih disebabkan oleh perbedaan kualitas 'iqra' daripada aspek yang bersifat askriptif.





Duka Kepergian Habibie

Tidak banyak kematian para tokoh yang membuatku merasa kehilangan dan berduka. Habibie adalah pengecualian dari itu. Beliau pergi menghadap Sang Rafiq al A'la, meninggalkan kesedihan sambil berkali-kali menunduk membaca al-Fatihah untuk almarhum. Kematian adalah suatu hal yang pasti, tidak bisa dimajukan atau dimundurkan, walau hanya sesaat. Ini adalah peristiwa alamiah. Sewajarnya, tidak ada yang merasa perlu kehilangan. Namun, realitas konteks kehidupan berbangsa saat ini membuat diri seorang Habibie benar-benar sangat bermakna. Kepolosan dan kejujurannya adalah mutiara di tengah sifat hipokrit, pencitraan, dan munafik para pemimpin negeri ini; rasa tanggung jawab yang besar yang didasari cinta yang tulus pada negeri meminggirkan seluruh kalkulasi-kalkulasi personal politik dalam kebijakannya; kapasitas kecerdasannya melebihi para elite politik negeri ini yang dulu bersorak dan bahkan bertakbir menolak laporan pertanggungjawaban Beliau. Bahkan, jika para elite politik itu dikumpulkan bersama-pun, kecerdasan mereka tetap tidak sebanding dengan Habibie. Tidurnya seorang Habibie jauh lebih berharga daripada kerja mereka! Negeri ini minus kebaikan dan integritas. Yang kusesali dari kepergian Habibie adalah, kebaikan-kebaikan yang inheren dalam diri dan jiwanya ikut lenyap bersama kepergiannya.

Dalam kedukaan ini, tiba-tiba, imajinasiku melayang jauh ke 14 abad yang lalu. Satu pertanyaan muncul: bagaimana kondisi para Sahabat ketika Nabi wafat? Kesempurnaan kebaikan dan keteladanan dalam diri Nabi meninggalkan kehilangan yang sangat besar di kalangan Sahabat. Kepergian Habibie, pada level yang paling dasar, membantuku untuk bisa membayangkan bagaimana histerisnya ‘Umar ketika mendengar Nabi wafat. Ketika kecintaan dan ketulusan menyatu dalam diri dan jiwa seseorang, maka kecintaan dan ketulusan itu akan merembes ke dalam hati dan jiwa siapapun yang melihat dan merasakannya. Sebab sinyal jiwa dan diri manusia pada hakikatnya sama: ketulusan dan kecintaan. Ketika jiwa yang menebar ketulusan dan kecintaan itu pergi, secara pasti, rasa kehilangan akan muncul, sebab kita sedang menyaksikan kepergian diri kita sendiri. (Padang, 15 Sep 2019).





Keadilan dan Kezaliman

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan ataupun mendengar kata adil dan zalim yang terkadang dikaitkan dengan perilaku penguasa ataupun orang-orang yang telah dipercayai untuk memegang kekuasaan. Adil merupakan kemampuan untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya tanpa mengurangi hak yang lain; sedangkan zalim sebaliknya, ketidakmampuan untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku kita akan selalu berada dalam dua posisi ini: adil atau zalim. Sebagai manusia, saya yakin kita tidak akan mampu berlaku adil seratus persen. Namun ini bukanlah pembenaran bahwa kezaliman yang kita lakukan merupakan suatu hal yang lazim.

Seberapa eratkah hubungan antara keadilan atau kezaliman dengan kekuasaan? Jawabannya: sangat erat. Keadilan merupakan kunci keberlangsungan suatu kekuasaan, dan sebaliknya, kezaliman merupakan virus utama yang menghancurkan kekuasaan tersebut. Al-Ghassani, seorang ahli sejarah Arab klasik mengatakan: *al-mulku qod yadumu ma'a al-kufri, walakin la yadumu ma'a al-zulm* (kekuasaan bisa bertahan dalam kekafiran; tapi tidak akan bertahan dalam kezaliman). Untuk melihat kebenaran kata hikmah ini, ada baiknya kita melihat bukti-bukti sejarah mengenai jaya dan runtuhnya suatu kerajaan atau kekuasaan.

Menjelang jatuhnya kekuasaan 'Abbasiyah di Baghdad, ada beberapa fakta sejarah yang perlu kita renungkan. Pada saat itu, terjadi kesenjangan yang besar antara mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan dengan rakyat jelata yang jauh dari tahta. Kelompok pertama hidup sangat mewah, sedangkan kelompok kedua hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Disebutkan, pada saat itu, ulama yang paling hebat saja hanya berpendapatan 12 dinar per bulan, sedang pendapatan rakyat jelata jauh lebih rendah. Sebaliknya, mereka yang dekat dengan penguasa hidup dalam kemewahan yang luar biasa. 'Alauddin al-Zhahiri, salah seorang staf kerajaan berpendapatan 300 ribu dinar, dan rumahnya termasuk yang paling mewah di Baghdad. Dalam pesta pernikahannya, Khalifah al-Mustanshir memberikan hadiah 100 ribu dinar. Sebuah jumlah yang sangat fantastis jika dibandingkan dengan pendapatan sehari-hari rakyat jelata. Seorang staf lain, Mujahid al-Duwaidar dikatakan memiliki harta yang tak terhitung. Pada saat pesta pernikahannya, Khalifah al-Musta'shim memberinya hadiah 300 ribu dinar. Pendapatannya per tahun mencapai lebih dari 500 ribu dinar.

Bisa dikatakan bahwa pada saat itu, harta negara sebagian besar hanya berputar di kalangan kaum elite saja, entah itu untuk keperluan berbagai macam pesta, hadiah ataupun fasilitas pribadi. Tak perlu diragukan lagi, ini merupakan suatu kezaliman. Berdasarkan kata-kata al-Ghassani di atas, maka kehancuran khilafah Abbasiyah merupakan suatu keharusan. Setiap perilaku yang bertentangan dengan asas keadilan akan tersingkir, sebab dunia ini berjalan berdasarkan asas keadilan. Kita perlu berkaca, betapa banyak pemimpin yang jatuh atau dijatuhkan akibat ketidakadilan mereka dalam menjalankan amanat.





Kaum Muslim dan Hoaks

Ben Nabi, intelektual Aljazair yang belajar di Perancis pernah mendiagnosis bahwa sumber utama kemunduran dan keterbelakangan kaum Muslim sehingga mengalami masa penjajahan yang panjang, lebih banyak dipengaruhi faktor internal daripada eksternal. Apa itu? Ia menyebutnya kelayakan untuk dijajah. Mengapa? Karena memang kita punya potensi besar untuk dijajah. Semakin besar kuantitas kaum Muslim, semakin besar potensi untuk dijajah itu. Mengapa? Karena kuantitas yang besar itu tidak berjalan paralel dengan kualitas; masih ibarat bangunan yang rapuh, *fragile*, karena ditopang oleh fondasi bangunan yang korosif, tidak punya daya resiliensi dan antar pilar tidak terjalin dengan kokoh. Dalam kondisi itu, jangankan hembusan badai, angin sepoi-sepoi saja sudah cukup untuk membuat bangunan itu bergoyang.

Apa potensi yang membuat kita layak untuk dijajah itu? Salah satunya adalah sangat mudah diprovokasi, dihasut, dan diadu domba. Maka, sejarah kaum Muslim tak pernah kosong dari kehadiran para penghasut, dalam berbagai corak dan bentuk, sebab mereka seakan menemukan habitatnya dalam masyarakat Muslim.

Penghasut selalu muncul dari dalam dan kita memiliki daftar panjang para aktornya. 'Utsman bin 'Affan bisa disebut sebagai

tumbang adu domba besar pertama. Sebagian para penyerbu yang mengepung rumah Utsman adalah para penikmat *hoaks*, provokasi, dan korban hasut para provokator yang mengkhianati agamanya sendiri. Karakter budaya yang masih berbasis bunyi (suara) sehingga mimbar masih menjadi sumber utama pengetahuan, serta miskin literasi memungkinkan *hoaks* dan informasi provokatif mudah menyebar tanpa filter.

Daya saring mensyaratkan kemampuan seleksi yang berbasis pada pengetahuan. Sumber utama pengetahuan adalah membaca, bukan mendengar, menguping atau melihat gambar sekelas komik. Membaca mendalam dan kritis menandakan adanya jiwa investigatif, *tabayyun*, bukan sekedar konsumsi tanpa filter. Dengan itu, informasi *hoaks* akan tereduksi bahkan tereliminasi. Namun, kemampuan inilah yang absen dari umat yang besar tapi rapuh ini. Mengenakan memang! Bersiaplah, *hoaks* dan provokasi tak akan pernah henti mendera, sebab habitatnya memang di sini!

Kegemaran untuk mengonsumsi *hoaks*, provokasi, dan info tak layak konsumsi hingga perut kembung tak pernah kehilangan momentum. Menariknya, *hoaks* paling favorit adalah yang memiliki konten merendahkan agama sendiri: Islam, baik dalam tataran *beliefs* maupun praktis; sebagai *organized religion* ataupun sebagai *ummah*.

Respon terhadap *meme* klepon adalah bukti nyata dari besarnya potensi untuk menjadi korban provokasi dan hasut sekaligus refleksi dari minimnya daya seleksi untuk menentukan mana yang layak untuk dikonsumsi dan mana yang tidak. Akibatnya, sebutir klepon lebih bermakna dan fungsional daripada sebuah ranjau untuk mencabik-cabik umat ini menjadi kepingan renyah mudah berderai, dan masing-masing merasa paling benar di tengah kerapuhan inheren yang diidapnya. Bagi para penikmat *meme* klepon itu, ada kepuasan tersendiri seolah-olah dirinya bukan seorang Muslim. Memang ada

alibi, bahwa Islam yang mereka yakini dan praktikkan berbeda dengan Islam yang diyakini kaum konservatif ‘anti’ klepon itu; ada kejenuhan pada rigiditas yang dipertontonkan oleh mereka yang dicap kearab-araban. Masalahnya adalah; sudahkah dilacak siapa yang menyebarkan *meme* itu? Jika benar pembuatnya sebagaimana yang diasumsikan, layakkah untuk dijadikan konsumsi publik yang gurih dan adiktif? Aku mencoba mencari *meme* itu, kudapatkan tulisan di sudut kanan bawah, nama Abu lkhwan Aziz. Dari nama dan konten, ada indikasi pembuatnya adalah dari kelompok mereka yang dituduh kearab-araban itu. Namun, ada yang tidak biasa: ada simbol *love* atau hati pada tulisan nama itu. Sejak kapan para Salafi menggunakan simbol hati dalam komunikasi mereka? Entahlah. Aku jadi ragu bahwa mereka adalah pembuat *meme* itu.

Jika olok-olok terhadap *meme* klepon itu adalah simbol dari resistensi terhadap rigiditas, sebaiknya ubahlah fokus dan sudut pandang, insya Allah akan ditemukan bahwa kesantunan, toleransi, adaptasi dengan kultur lokal, dan saling empati masih dan tetap menjadi *mainstream* di negeri tercinta ini. Aku biasa *ngobrol* berjam-jam di warung pecel lele dengan teman Salafi yang berjenggot panjang, pakai gamis tanpa canggung. Tak ada yang aneh. Bagiku, mereka bukan “*others*”; dan sebaliknya, yang mengklaim dirinya toleran dan santun tidak semuanya “*self*”. Ada *multiple identity* yang membuat kita akan selalu melakukan redefinisi dan reidentifikasi terhadap siapa pun. Oleh sebab itu, resistensi dan penerimaan tidak seharusnya dilakukan atas dasar *stereotyping* yang peyoratif. Wallahu a’lam.



Agama dan Radikalisme





Fundamentalisme: Antara Agama dan Identitas

Irlandia Utara adalah tempat penganut Katolik dan Protestan pernah saling bunuh untuk berebut dominasi. Saat itu, garis batas antara *self* dan *other* sangat jelas. Anekdote berikut menggambarkan suasana konflik itu. Suatu ketika, seseorang berjalan di sudut kota Belfast. Tiba tiba, muncul seorang bersenjata dari balik gedung dan langsung menodongkan pistol di keeningnya: “Kamu Katolik atau Protestan?” Penodong itu menghardik. Karena identitas penodong tidak diketahui, dari pihak Katolik atau Protestan, maka salah jawaban taruhannya nyawa. Dengan gugup, akhirnya ia menjawab: “Sebenarnya saya atheis”. “Iya, atheis Protestan atau Katolik?” Penodong itu terus mencecar korbannya sambil menghardik. Anekdote yang berisi fanatisme dan fundamentalisme di kalangan Kristen ini diceritakan dalam suatu seminar di kampus oleh Dekan Fakultas Sosial Sains tempat saya belajar yang berasal dari Irlandia.

Di belahan dunia lain, Afghanistan, pemerintah yang hampir ambruk menghadapi perlawanan faksi-faksi lokal kemudian meminta bantuan pasukan Soviet. Sebagai musuh bebuyutan, Amerika Serikat tidak tinggal diam dan langsung memberikan bantuan pada kelompok oposan. Karena faksi oposan tidak tunggal, lantas faksi mana yang

harus dibantu? Pada akhirnya, putusan jatuh pada ‘faksi santri’ lulusan Deoband yang konservatif dan fanatik, dikenal kemudian dengan nama Taliban. Mengapa pilihan Amerika Serikat jatuh pada Taliban? Alasannya sangat sederhana: *The fanatics fight better*. Terbukti, Taliban berperang tanpa mengenal takut dan berhasil mengusir pasukan Soviet.

Myanmar, negeri subur yang mayoritas dihuni oleh penganut Buddha menunjukkan sisi antagonistik wajah Buddha yang teduh dan damai. Dibalut oleh jubah kebesaran, para biksu Buddha, dipimpin oleh Wirathu, bergerak secara masif mengusir warga Muslim dari negerinya. Dampaknya, puluhan ribu kaum Muslim Rohingya jadi pengungsi di berbagai negara; sebagian *stateless*. *Prejudice* yang dalam terhadap Islam telah memantik fanatisme dan identitas para biksu itu.

Di India, Masjid Babri Ayodhya yang megah dan bersejarah berubah jadi puing-puing dalam waktu singkat. Para ekstremis Hindu mengklaim bahwa lokasi masjid itu adalah tempat kelahiran Rama yang suci. Ada lebih 1000 korban dari pihak Muslim, namun sejarah melupakannya. Membangun kuil di atas puing masjid dan darah kaum Muslim bukanlah hal asing dalam sejarah. Bagi ekstremis Hindu, klaim sejarah sudah lebih dari cukup untuk melegitimasi pembunuhan dan perampasan itu.

Di Israel, kejadiannya tak jauh berbeda. Klaim sejarah melegitimasi seluruh aksi biadab yang mereka lakukan. Kekerasan kaum Yahudi tak lagi membutuhkan bukti. Sangat transparan, vulgar, dan biadab. Siapa yang salah? Di mata Rabbi Kahane, semua kesalahan ada di pundak orang Palestina, karena “*They are living in a wrong place and a wrong time*”. Lantas, kemana bangsa Palestina harus pindah? Kahane menjawab gamblang: “*I don’t care!*”

Di Balkan, penduduk Bosnia yang Muslim menjadi korban genosida Serbia yang Ortodoks. Mengapa? Di mata kaum ortodoks

itu, Muslim Bosnia telah kehilangan status *indigenous* ketika *convert* ke Islam. Mereka adalah *migrant Turkish!* Asing plus alien! Sebagai “*migrant*”, identitas mereka berbeda dengan warga ‘asli” Ortodoks. Puluhan ribu terbunuh, dan dunia melupakannya.

Dalam konflik dan kekerasan itu, apakah benar agama merupakan tertuduh tunggal yang mesti dipersalahkan? Agama sebenarnya bukanlah problem, walau ia bisa jadi *problematic*. *Extremism* pada hakekatnya adalah ‘*struggle over identity rather than over religion*’. Identitas itu ada yang bersifat nasional, seperti ultranasionalis, dan ada juga yang transnasional yang banyak dirujuk ke fundamentalis Muslim. *Extreme-right wing* kelompok Tarrant yang memuja supremasi kulit putih dan membunuh Muslim di Christchurch, pada praktiknya, termasuk transnasionalisme. *White supremacy* disatukan oleh warna kulit dan tidak dibatasi oleh garis batas administrasi negara. Tak heran, Tarrant, seorang Aussie, mendapatkan ide banal dan picik ini nun jauh di sana, di negeri nenek moyangnya: Eropa. Tak lupa, ia juga menyebut Trump sebagai “*a symbol of renewed white identity*”.

Ekstremisme tidak murni permasalahan ide. Ada kondisi yang menyebabkannya bisa tumbuh subur dengan akar tunggang yang menghunjam dalam. Dalam konteks ini, pendekatan Weberian murni untuk mengatasi *radicalism* akan sia-sia, sebab permasalahan utama bukan hanya pada tataran ide, tapi juga sosial. Penganut Weberian dan Durkhemian seharusnya berkolaborasi. Di sinilah letak masalahnya. Ada inkonsistensi. Jika pelaku seorang muslim, para pengamat tiba-tiba berubah jadi Weberian murni, sehingga tanpa bosan mereka berkuat dengan berbagai doktrin dan konsep dalam Islam yang menjadi pemicu radikalisme. Sebaliknya, jika pelaku non-muslim, mereka berubah jadi Durkhemian dengan mencari sebab-sebab dan justifikasi sosiologis ekstremisme itu. Inkonsistensi ini sudah sampai pada level memuakkan. Dalam konteks inilah, proyek deradikalisasi yang hanya menysar pada agama Islam tak lebih dari proyek dungu.

Mengapa identifikasi Islam dengan fundamentalisme sangat kuat? Selain inkonsistensi di atas, ada sebab lain: para intelektual Muslim ikut mengonsumsi dengan penuh ketulusan dan gairah komoditas seksi ini. Sebagian mereka hidup dari proyek ini dan terus mereproduksinya sebagai bagian dari aktualisasi 'keilmuan' dan manifestasi keberpihakan mereka pada apa yang mereka sebut sebagai moderasi, toleransi, dan pikiran-pikiran progresif. Persebaran atribusi fundamentalisme terhadap Islam dewasa ini adalah proyeksi dari luar dengan aktor dari dalam kaum Muslim sendiri. Mengenangkan memang! Aksi Tarrant yang terang benderang tidak akan cukup untuk mengubah pandangan mereka bahwa ekstremisme adalah permasalahan identitas sosial, bukan agama.

Dukaku yang mendalam terhadap para korban di Christchurch. Kalian telah jadi martir: mati di mata manusia, namun hidup di sisinya. (Sydney, 19 Maret 2019)





Religion in Violence

Sebagai seorang penganut agama yang berusaha sepanjang hidup untuk selalu taat pada ajaran agama yang diyakini, menjadi sekuler tentu tidak pernah menjadi pilihan. Salah satu alasannya adalah pengetahuan sekuler mengalami deficit moral untuk mentranslasikan pemahaman agama yang diperlukan oleh penganut agama. Dalam sebuah perdebatan di kelas pada tahun 2008, dosenku mengkritik Alquran dan Nabi Muhammad berdasarkan argumen “ilmiah” yang ia bangun, dan berusaha menggiring ke pemahaman bahwa Rasulullah adalah seorang penulis. Ujung-ujungnya adalah kesimpulan bahwa Alquran adalah karangan Muhammad. Sebagai satu-satunya mahasiswa Muslim, aku ‘berterus-terang’ padanya dan dengan ‘lugu’ aku mengatakan dia bisa berkata apapun tentang Alquran dan Rasulullah karena itu sebatas *intellectual exercise*. Sementara bagiku, semuanya memiliki ‘konsekuensi’ keimanan. Aku menyebut nama Muhammad dengan penuh kerinduan untuk bertemu dengannya di akhirat kelak, sementara moral sekuler menjadikannya sebatas wacana akademis. Walaupun tetap berlangsung perdebatan, namun aku tidak bisa berada dalam *frame* yang sama dengannya. Dalam tataran ini, sebagai orang yang mengenyam sistem pendidikan Barat, aku harus bisa mengambil pelajaran.

Sekulerisme telah menjadikan agama sebatas subsistem dalam kehidupan sosial, sehingga moral keagamaan yang diajarkan oleh Nabi yang mengatur seluruh dimensi kehidupan gagal untuk diterapkan. Hukum Islam lebih merupakan *ethical language*, yang berkaitan dengan dosa dan pahala. Ada konsekuensi eskatologis dari setiap perbuatan yang dilakukan, sekecil apapun itu. Inilah yang seharusnya menjadi standar moral perilaku seorang Muslim. Dalam konteks ini, ada makna yang hilang ketika, sebagai contoh, 'sin' ditranslasikan sebagai 'guilt' dalam konsep *secular knowledge*. Namun, itulah yang terjadi. Dampaknya, jika dilihat, sebenarnya perilaku kita kaum Muslim belum mencerminkan nilai Islam yang baik karena terjadinya pendangkalan makna dalam proses translasi di atas. Konsep-konsep yang kita pahami adalah konsep yang telah mengalami degradasi makna, sehingga moral kita terputus dari dimensi eskatologis. Orang yang membunuh, sebagai contoh, merasa terbebas dari kesalahan setelah menjalani hukuman penjara. Ia lupa bahwa ada dosa yang dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.

Berkaitan dengan moral keagamaan, aku meyakini sepenuhnya bahwa agama-agama yang ada di dunia ini mengajarkan kebaikan kepada pemeluknya. Lantas, mengapa ada seorang (atau lebih) pemeluk agama melakukan kekerasan? Aku percaya (lagi-lagi sebatas 'percaya') bahwa yang terjadi bukanlah *violence in religion*, tapi sebaliknya, *religion in violence*. Agama dijadikan alat justifikasi. Dalam tataran yang lebih dalam, agama mengalami komodifikasi oleh mereka yang memiliki kepentingan tertentu, termasuk hal yang dipersepsikan sebagai kepentingan keagamaan itu sendiri. Aku sepakat dengan pendapat Claude Gautier bahwa 'We find no theory of fanaticism. It is always regarded as an effect. To speak of 'fanaticism' is therefore inefficient, rather we should be reasoning in terms of 'the making of fanatics' (Kita tidak menemukan teori tentang

fanatisisme. Fanatisisme selalu berkaitan dengan efek/akibat. Oleh sebab itu, berbicara tentang fanatisisme merupakan sesuatu yang tidak efisien. Seharusnya, kita lebih memikirkan tentang apa yang menjadi penyebab seseorang menjadi fanatik). Akhirnya, bisa dilihat bahwa itu lebih merupakan '*a social and political emotion*'. Wallahu a'lam. (Sydney, 30 Agustus 2016)





Believing with Belonging

Tauhid adalah *common platform* risalah para nabi yang telah diperjuangkan selama ribuan tahun. Ada bangsa yang dimuliakan dengan tauhid, dan ada pula yang dimusnahkan Allah tanpa sisa dengan berbagai cara, seperti badai topan, banjir bandang, gempa bumi, likuifaksi, dan sebagainya. Namun demikian, sepanjang sejarah, tetap saja masih banyak yang kufur dan ingkar. Ingkar dalam pengertian yang sebenar-benarnya: dalam hati, kata, dan perbuatan. Tidak hanya itu, keingkaran itu juga diproduksi dan direproduksi dengan penuh kreativitas, kebencian, dan bahkan dalam bentuk yang sangat banal dan amoral. Sebagai contoh, pada peristiwa pembunuhan supporter Persija oleh oknum Bobotoh yang sangat-sangat biadab, karena logika apapun tidak bisa menerimanya, kalimat tauhid yang suci itu (setidaknya bagiku) disisipkan dalam rekaman pembunuhan, kemudian disebar. Polri dan beberapa saksi mata kemudian membantah sisipan itu, walau yang menyisipkan tetap bebas tak tersentuh hukum positif. Aku berharap hukum Allah akan segera menghampirinya dengan cara-Nya sendiri.

Apa sebenarnya yang diinginkan oleh pembuat video *hoaks* itu? Apakah perseteruan dua fans klub bola yang sudah mendarah daging dan boleh jadi turun temurun itu, ingin ia rekayasa dengan bumbu

baru, yaitu fanatisme agama, sehingga lebih eksplosif dan pada saat yang sama, kebencian pada Islam juga tersalurkan dengan sempurna? Aku terpaksa harus menuduh: ada Islamofobia akut, dalam, dan bersifat menular yang diderita editor video itu. *Prejudice* seringkali melahirkan fundamentalisme, termasuk fundamentalisme liberal sekuler. Ada ciri khas kaum fundamentalis yang dimiliki oleh editor video *hoaks* itu: mati akal dan rasa. Islam, sebagaimana Nasrani, Buddha, Hindu, dan agama lainnya adalah *software* bangsa ini yang harus dijaga, bukan distigmatisasi.

Dalam kasus terbaru, sebagai Muslim awam yang tidak berafiliasi dengan gerakan politik apapun, apalagi HT, *feeling* keagamaanku turut bergetar ketika kain hitam -terserah mau disebut bendera- yang bertuliskan kalimat tauhid dibakar, apalagi diiringi ritual mars kebanggaan. Ketika fanatisme dan kependiran berpadu dengan arogansi, yang lahir hanyalah aksi-aksi yang nir-empati. Sayangnya, pada saat yang sama, ada emosi keagamaan yang gagal dipahami oleh lapisan intelektual yang biasa berkutat dengan dalil-dalil itu, sehingga kemarahan sebagian mereka yang tersinggung dijawab dengan penjelasan tentang validitas normatif-historis dan atribusi politik objek yang dibakar, bukan dengan empati dan permintaan maaf. *Feeling of attachment* tidak memerlukan dalil agar disebut absah; yang diperlukan hanyalah tenggang rasa dari pihak lain. Namun, ternyata ada jarak di situ, dan masing-masing merasa benar.

Aku tidak tahu, entah sampai kapan 'milisi' sipil dibiarkan oleh negara menjalankan fungsi hukum. Jika perbuatan ini tidak dihentikan, maka kita juga tidak punya hak moral mengecam FPI yang melakukan razia di Jakarta. Harus diingat, bahwa objek *sweeping* FPI selalu mereka yang melanggar hukum namun tidak disentuh aparat, seperti diskotik namun merangkap lokasi prostitusi. Mengapa kita selalu menerapkan *double standard* dalam menilai,

yang satu dikecam dan yang lain dibela? Salah satu sebabnya adalah inkonsistensi berpikir. Dalam kasus tertentu, kita menabalkan diri sebagai seorang substantivis, namun membenci simbol tertentu dan mendukung persekusi terhadap simbol-simbol tersebut. Pada saat lain, kita berubah menjadi seorang formalis-simbolis, dan lupa dengan masalah-masalah substantif yang diidap bangsa ini. Lantas, apa yang membuat kita inkonsisten? Tanyalah hati masing-masing. Boleh jadi, akar tunggang fanatisme dan *prejudice* juga telah tumbuh subur. Entahlah... (Sydney, 26 Oktober 2018)





Agama dan Fundamentalisme

2 Agustus, *summer* di Oslo cukup hangat. Suhu di kisaran 20 derajat celcius. Untuk menikmati hangatnya mentari, saya dan seorang kolega dari Helsinki kemudian berbincang santai di halaman perpustakaan Oslo University yang cukup luas, sambil menikmati *sandwich* makan siang yang disediakan panitia. Dalam Nordic Conference in Sociology of Religion kali ini, sebagian besar topik yang disampaikan oleh para presenter berkaitan dengan Islam. Isu utama yang diangkat adalah radikalisme dan ekstremisme Islam. Sebuah isu lama namun terus direproduksi karena keseksiannya. Setiap ‘lekuk, sudut’ dan ‘lenggang-lenggoknya’ memiliki daya tarik untuk dijadikan komoditas dan dijual untuk beragam kepentingan, termasuk oleh beberapa gelintir kelompok Muslim sendiri.

Dalam Opening Session, Mark Jurgenmayer, seorang *leading scholar* yang beberapa risetnya dibiayai oleh CIA, menyampaikan panjang lebar tentang kebangkitan ekstremisme di Timur Tengah. Ia mengakui bahwa ‘*devastating-false policies*’ yang diambil AS telah meluluhlantakkan negeri Irak. Dari mulutnya, aku mendengar langsung bahwa AS bukan hanya membunuh Saddam, tapi juga membubarkan pemerintahan di Irak dan membentuk pemerintahan boneka yang sangat problematis. Militer dan sipil di era Saddam

dipecat secara massal digantikan oleh rekrutmen baru yang dilatih oleh AS. Kaum Sunni yang berkuasa di era Saddam tidak diakomodasi dalam pemerintahan baru yang didominasi oleh pengikut Syiah. Dalam konteks ini, setidaknya, ada dua masalah besar: 1. Ratusan ribu pasukan Saddam yang terlatih dan bersenjata lengkap tiba-tiba jadi pengangguran; 2. Kaum Sunni yang lama menikmati kekuasaan, tiba-tiba tersingkir. Maka, muncul kemudian resistensi. Faktanya, ISIS berasal dari kaum Sunni, yang didukung oleh sebagian pasukan *jobless* itu. Timur Tengah bergolak dan citra Islam terpuruk hingga ke dasar fondasi. Dalam ranah citra negatif, tak ada jarak dan perbedaan antara Muslim dan Islam; jika Muslim buruk, maka berarti Islam juga buruk. Sebaliknya, jika Muslim baik, citra Islam tidak mesti akan baik.

Carut marut Timur Tengah itu, kemudian menjadi beban Muslim di seluruh dunia, terutama karena efek rekayasa persepsi yang dibangun media. Muncul persepsi publik bahwa Islam itu radikal dan Muslim itu ekstremis. Ada juga yang mencoba untuk berbicara sedikit 'lebih sopan' dengan mengatakan bahwa 'tidak semua Muslim adalah teroris; namun semua teroris adalah Muslim'. Citra ini dengan cepat menyebar dan menjadi kanker ganas bagi sebagian besar Muslim. Maka, tak heran jika seorang ibu rumah tangga berhijab di Aussie, bisa ikut menanggung akibat dari perilaku ISIS yang di Timur Tengah itu, walau ia sendiri tidak mengerti jenis monster ISIS itu.

Sebaliknya, AS, sang Pahlawan Demokrasi itu, sekarang duduk manis menikmati kerja kerasnya di tanah Arab. Citra Islam dan Arab yang sangat identik dengan radikalisme dan ekstremisme berhasil dibangun dengan sempurna dan kokoh. Ironisnya, kita di Indonesia dengan lantang juga ikut berteriak-teriak mengonsumsi citra itu. Sebagai respons, muncul inisiatif bahkan antitesis untuk membedakan diri dengan apa yang disebut sebagai Islam Arab. Berbeda dengan Islam Arab yang *doyan* perang itu, Islam Indonesia adalah Islam yang

cinta damai. Kita lupa, dalam ‘kedamaian’ Islam Indonesia itulah, korupsi tumbuh subur bak jamur di musim hujan: kita biarkan tumbuh, bereproduksi, dan suatu ketika, kita akan mati keracunan bersama. Entahlah, aku juga tak tahu mana yang lebih baik: Islam Arab yang *doyan* perang itu, atau Islam negeriku yang *doyan* korupsi ini (Sydney, 19 Agustus 2018).





Islam yang Sejuk

30 Juli, suhu di Sydney masih di bawah 10 derajat. Angin dingin yang bertiup kencang membuat *real feel* lebih menggigit beberapa derajat. Kota yang terletak di selatan *hemisphere* ini memang sedang *winter*. Sore itu, jam 16.05 aku berangkat menuju Oslo yang terletak di belahan utara bumi untuk mengikuti salah satu ritual akademik: Nordic Conference 24th in Sociology of Religion 2018. Setelah 14 jam perjalanan *non stop*, pesawat *landing* di Dubai untuk transit. Jam menunjukkan pukul 12.05 tengah malam. Suhu cukup panas: 38 derajat. Jaket kulit yang kukenakan tiba-tiba terasa begitu gerah. Pori-pori kulitku terasa nyeri seperti ditusuk-tusuk jarum. Jaket kulepas. Suguhan *summer* negeri gurun ini harus kunikmati, walau hanya sesaat.

Entah yang keberapa kalinya aku terbang naik Emirat Air, namun perjalanan kali ini terasa mengesankan. Saat itu, aku berdiri antri di depan toilet pesawat. Pria bule paruh baya, berkaos merah yang duduk tepat di belakangku datang menghampiriku sambil tersenyum ramah. “*Are you a muslim?*” katanya sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman.

“*Yes, but how can you know?*” Aku balik bertanya.

“*I just saw on your screen that you listened to the Quran*”, jawabnya sambil tertawa.

Akhirnya, kami bicara ringan penuh keakraban, walau baru saling mengenal. Dia berasal dari Selandia Baru dan telah beberapa tahun *convert* ke Islam. “*Where are you travelling to?*” Aku bertanya disela-sela percakapan.

“*I am travelling to Madinah for hajj*” jawabnya sambil tersenyum. “*Subhanallah*”, kataku dalam hati, semoga hajjnya mabrur dan diberi kelancaran.

Sejak awal, aku memang punya perhatian khusus pada pria bule ini. Aku masuk ke pesawat lebih awal dan bisa menyaksikan ia menyapa banyak penumpang lainnya dengan ramah. Dalam hati, aku sempat berpikir: “*Bule ini kok aneh banget, kaya hidup di kampung Indonesia aja*”, pikirku. Ketika turun dari pesawat, ia mempersilakan orang tua lebih dulu dan menawarkan diri untuk membawakan barang-barang mereka. Dalam hati, aku merasa sangat bahagia, seorang Muslim telah menunjukkan perilaku yang sangat baik: ramah dan peduli kepada orang lain. Inilah akhlak Muslim yang sebenarnya.

Pada sisi lain, ingatkanku juga melayang pada salah satu sahabatku, seorang bule Jerman yang masuk Islam dan kami banyak menghabiskan waktu bersama ketika mengikuti *short-course* di al Manar Univesity, Tunis, dan *tour* Sahara pada tahun 2008. Ada hal yang kuanggap tak lazim pada perilakunya: ia menolak berteman dengan para bule yang lain, dengan satu alasan: mereka bukan Muslim. Pandangan subjektifku menyimpulkan, ada rigiditas dan militansi dalam caranya memahami teks dan moral agama. Di kamar hotel, kami sering berdebat sengit. Namun, ada satu hal yang sangat kuhargai dari perilakunya: curiositas yang tinggi terhadap pengetahuan agama yang baru ia anut. Ia selalu menanyakan buku-buku yang kujadikan argumen. Aku berharap, seiring waktu dan bertambahnya pengetahuan, ia semakin wise memahami ajaran agama. Pada saat yang sama, aku sebenarnya juga khawatir, sebab ia dididik oleh segelintir kelompok Muslim yang

selama ini selalu merasa paling *legitimate*, karena menganggap diri paling mendekati tuntunan para *pious predecessors*.

Agama, dalam banyak hal telah berhasil mengubah dan membentuk seseorang; pada sisi lain, seseorang juga mengubah dan membentuk agama itu agar sesuai dengan versinya. Doaku untuk mereka semua. Semoga tetap konsisten dalam Islam, dan istiqomah menebar kebaikan pada siapapun tanpa memandang perbedaan agama, bangsa, dan berbagai atribusi lainnya (Dubai, 31 Juli 2018).





Agama dan Ekstremisme

Agama, kata Will Durant, memiliki banyak arwah. Oleh sebab itu, ia tidak mudah untuk dibungkam, apalagi dimusnahkan. Ada kesetiaan tanpa batas dari para pemeluknya yang ditandai oleh kesediaan untuk mengorbankan semua yang dimiliki, termasuk nyawa sendiri. Dalam konteks ini, jaminan kebebasan beragama menjadi suatu keharusan. Dalam sejarah peradaban Islam, komitmen pada kebebasan beragama itu dipraktikkan sejak lama. Dalam suatu bincang-bincang, E. Barnett, sahabatku, seorang pengacara keturunan Yahudi Amerika mengakui fakta ini. Ia menulis sebuah novel yang menceritakan harmonisnya hubungan kaum Muslim dan komunitas Yahudi di wilayah kekuasaan Turki Ottoman, namun sayang, novelnya harus menunggu 4 tahun baru bisa terbit karena American *publishers* belum siap 'mental' untuk menerima fakta historis ini.

Mengapa belum siap mental? Menurut penerbit-penerbit itu, fakta yang diterima dan seharusnya diceritakan adalah otoritarianisme Islam, radikalisme, intoleransi, rigiditas, dan pengabaian pada HAM. Ini adalah narasi tunggal yang dikonstruksi, disebarkan, dan harus direproduksi terus-menerus melalui berbagai media. Fakta-fakta historis yang bertentangan dengan narasi tunggal ini harus ditekan agar tidak muncul, karena berpotensi menciptakan 'kebenaran tandingan'.

Hasilnya, pada saat ini, *image* radikalisme begitu dekat dengan kaum Muslim, bahkan mungkin lebih dekat dari 'habl al warid'. *Image* itu tidak hanya dikonsumsi dan diyakini oleh non-Muslim, bahkan kaum Muslim sendiri. Mereka dengan penuh kesadaran dan kebanggaan ikut menyusun 'batu bata' imej bangunan radikalisme itu, sehingga nampak semakin jelas, vulgar, dan *pervasive* di mata semua pihak.

Dalam konteks ini, tidak aneh ketika transit di Bandara Abu Dhabi dalam perjalanan menuju London, aku di-*interview* dengan sangat tidak bersahabat, hanya karena di pasporku ada stempel visa Mesir, Tunis, dan beberapa negara Arab. Ada banyak pertanyaan dan kecurigaan: mengapa mengunjungi negara-negara itu? Siapa yang membiayai? Apa yang dilakukan? Siapa yang ditemui? dan sederet pertanyaan lainnya. Di London, di daerah Tenggara dan Richmond, aku juga pernah mengalami tindakan rasial, hanya karena berkulit coklat dan berjenggot tipis. Sumpah serapah yang kudengar punya benang merah yang sama: Muslim. Sebagai sarjana yang berkuat dengan gerakan Islam, pengalaman dicurigai ini membantuku memahami psikologi mereka yang teralienasi secara sosial, dicurigai, bahkan menjadi korban diskriminasi dan kemudian menjadi radikal.

Pada sisi lain, proses radikalisasi tidak pernah berjalan secara monolitik. Dalam pengertian, ia memang berjalan lebih dominan di atas kesadaran yang diinspirasi oleh ajaran agama, namun harus ada benturan dengan realitas yang dianggap penuh pelanggaran nilai-nilai agama. Maka, senjata kaum radikal bukan hanya doktrin agama, tapi juga pelecehan terhadap nilai-nilai agama. Di sinilah pentingnya pemberantasan gerakan radikal berpijak pada nilai-nilai yang luhur, bukan mengedepankan kekuatan eksekutif dan kemudian membangun narasi kebenaran tunggal. Harus diingat bahwa, ekspresi kesetiaan personal pada agama seringkali senyap tak terpantau, berbeda dengan kesetiaan yang ditunjukkan secara kolosal, seperti *tabligh*

akbar. Oleh sebab itu, manifestasinya baru terpantau ketika muncul eksplosif yang memakan korban. Pada saat itu, jangankan orang lain, keluarga sendiri terkadang tidak mengetahui bahwa ada anggotanya yang terlibat *radicalism/ extremism*.

Pada akhirnya, ekstremisme adalah refleksi penyimpangan sosial, yang boleh jadi, penyebab dan dalangnya bukan para ekstremis itu sendiri. Bagaimanapun, tindakan ekstremisme itu tetap tidak bisa diterima, walau bisa dijelaskan secara sosiologis. Dukaku yang mendalam untuk seluruh korban. (Sydney, 10 Mei 2018).





Agama dan Modernitas

Modernitas adalah produk Barat, konsekuensi logis dari evolusi sosial mereka yang berlangsung secara *organic, bottom-up*, bukan *top down*. Narasi panjang proses modernisasi itu, dalam tataran tertentu, juga menimbulkan 'trauma' dalam masyarakat Eropa. Sebagai usaha untuk keluar dari Abad Pertengahan, reformasi agama ternyata tidak berjalan mulus, sebab diikuti oleh pecahnya perang agama, persekusi agama, dan politik. Revolusi industri yang mendorong tumbuhnya ekonomi ternyata berjalan seiring dengan eksploitasi kelas buruh; tumbuhnya nasionalisme ternyata menghasilkan produk sampingan model Hitler dan Mussolini; menguatnya kesadaran untuk menghargai universalitas hak asasi manusia ternyata berjalan paralel dengan kolonialisme dan imperialisme. Pada akhirnya, salah satu produk sah modernitas Eropa itu adalah Perang Dunia I dan II.

Rentetan sejarah panjang ini, dalam tataran tertentu, penuh darah. Satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam proses traumatis itu, agama merupakan salah satu titik sentral konflik. Atas dasar itu, pilihan pada sekularisme dalam masyarakat Barat merupakan sesuatu yang logis karena muncul dari proses internal evolusi sosial mereka. Sekularisme, dalam tataran ini adalah suatu 'konsensus' yang memungkinkan semua elemen sosial hidup damai di ruang

publik, tanpa perlu diganggu oleh sentimen-sentimen primordial yang dianggap melekat pada agama. Ruang publik yang telah disterilkan dari virus agama diklaim bersifat universal, dalam pengertian bisa diakses oleh siapa saja tanpa memandang identitas dan pada saat yang sama, juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip individualisme. Ada persamaan (*equality*) dan keterbukaan (*openness*) yang memungkinkan setiap warga negara mendapatkan hak yang sama. Dalam iklim sekuler itu, demokrasi dianggap sebagai sistem yang paling relevan, sebab bertumpu pada kedaulatan manusia, bukan 'Tuhan'. Jadi bisa dilihat bahwa sekulerisme adalah *software* demokrasi model Barat. Lantas, di mana agama?

Dalam proses itu, agama ditarik dari ranah publik, untuk selanjutnya dikungkung dalam ruang privat. Setiap warga negara yang hendak melangkah ke kakinya ke luar rumah harus meninggalkan seluruh embel-embel agamanya di depan pintu. Agama *for home use only!* Mengapa? Ada asumsi bahwa agama bersifat eksklusif yang mengakibatkan munculnya '*boundary*' antara kaum beriman dan tidak beriman. Selain itu, agama juga dituduh memiliki klaim kebenaran universal yang berpotensi melecehkan sikap toleransi, pluralisme, dan kompromi-kompromi sosial politik yang dibangun secara horizontal antar elemen masyarakat. Dan yang paling dikhawatirkan lagi, agama secara vulgar akan menghadirkan 'Tuhan' ke ruang publik yang memicu munculnya sentimen primordial dan pengabaian pada hak-hak minoritas. Hukum agama juga dianggap bersifat '*fixed*', berbeda dengan hukum demokrasi yang bisa diubah, disesuaikan, dan diperbaiki. Dengan 'dosa-dosa bawaan' itu, agama harus ditempatkan di ruang yang semestinya: privat.

Dalam konteks di atas, apakah demokrasi sekuler Barat *compatible* di masyarakat yang masih menjadikan agama sebagai *key orientating value* dalam hidup mereka? Berbeda dengan sejarah

sosial Eropa, sekulerisme adalah konsekuensi logis sejarah panjang mereka. Oleh karena itu, sekularisme memiliki akar tunggang organik yang menghujam dalam. Di negara-negara Muslim justru sebaliknya: bersifat *top-down*. Modernitas dan sekulerisme itu dikenal ketika kaum Muslim bersentuhan dengan kekuatan kolonial, yang melahirkan segelintir elite yang terpesona pada modernitas Barat dan ingin melakukan operasi implantasi untuk memaksakan modernitas itu menjadi bagian inheren dalam kehidupan umat Islam. Ironisnya, tidak seperti di Eropa, sejarah panjang modernitas ditopang oleh berbagai inovasi. Di negara-negara Muslim justru hanya berbasis pada imitasi. Attaturk adalah contoh yang paling terang dalam melakukan imitasi itu: ia mengganti huruf Arab dengan Latin; ia melarang jilbab dan gamis, diganti dengan *pants* dan topi; ia melarang jenggot dan seluruh simbol-simbol keagamaan untuk muncul ke ruang publik. Pendekatan *top-down* ini menciptakan *gap* yang dalam di antara segelintir elite yang terbaratkan, dengan mayoritas rakyat yang masih menjadikan agama sebagai marka identitas.

Gap itu bisa dilihat secara kasat mata hingga saat ini. Berbeda dengan kelompok elite yang sekuler itu, isu-isu agama dalam ruang publik bukanlah hal yang haram di tengah masyarakat yang masih agamis. Bagi mereka, agama bukanlah urusan privat sebab masih berfungsi kuat sebagai sumber pandangan moral dan makna hidup. Dalam konteks ini, maka separasi ruang publik dan privat menjadi kabur, atau malah tidak pernah eksis dalam kehidupan mereka. Dikotomi privat dan publik tampaknya hanya ada dalam pikiran segelintir elite yang telah terbaratkan itu. Rumitnya, mereka hidup dalam ruang yang sama, namun dengan *value* yang berbeda.

Pada sisi lain, individualisme dan otonomi yang menjadi salah satu karakter dasar modernitas ternyata menimbulkan efek samping yang diametral bagi agama, sebab menggiring pada munculnya

demokratisasi interpretasi teks-teks agama. Ada hostilitas pada otoritas tradisional yang sebagian besar diisi oleh para pemuka agama. Demokratisasi ini menyebabkan munculnya pluralisme dan pada saat yang sama, fragmentasi otoritas keagamaan. Otoritas keagamaan jadi runtuh, yang muncul adalah relativitas. Maka, ulama yang otoritatif pada suatu kelompok tradisional, bisa saja dilecehkan secara vulgar oleh kaum sekuler, dengan alasan bahwa mereka juga memiliki otoritas yang sama untuk menafsirkan teks agama. Klaim otoritas sepihak itu, ironisnya, hanya didasarkan pada emansipasi rasio, bukan spiritualitas yang dalam.

Pada akhirnya, tuduhan kaum sekuler bahwa setiap usaha untuk berpegang teguh pada moral agama di ruang publik adalah tindakan mempolitisasi agama, di mata kaum agamis tak lebih sebagai usaha untuk stigmatisasi agama. Bagi kelompok religius itu, imbauan untuk meletakkan agama hanya di ranah privat ibarat mencegah seorang pelaut menggunakan kompas ketika berlayar. Agama, sebagai marka identitas, tidak pernah berada di ruang privat, sebab dikotomi itu tidak pernah eksis. Aku berada dalam ranah ini. Oleh sebab itu, politik yang religius adalah pilihan yang bertanggung jawab, di dunia maupun akhirat. Maka, usaha untuk mengatur tema—atau bahkan isi—khutbah agar sesuai dengan proses demokrasi tak lebih dari unjuk keangkuhan agen demokrasi itu sendiri terhadap penganut agama. Ada *distrust* di sana. Membangun demokrasi di tengah *distrust* amatlah sulit, sesulit meninggalkan agama di depan pintu rumah ketika hendak ke luar. Entahlah. (Sydney, 15 Februari 2018).





Wirathu dan Islamofobia

Dengan nada dingin, *Wirathu* yang berjubah biksu itu menyampaikan ceramah agitatif pada pengikutnya. Beracun, bukan hanya bagi komunitas Muslim Rohingya, tapi juga bagi nilai-nilai kemanusiaan. Imaji ketakutan pada kehadiran 'others' yang tertanam sangat kuat di ubun-ubun kepalanya ia bungkus dengan justifikasi agama dan nasionalisme sempit, radikal, dan esplosif. Sebagai seorang Muslim, aku tentu saja tidak akan pernah menggeneralisasi bahwa sikap *Wirathu* adalah representasi ajaran Buddha, sebab aku juga tidak ingin sikap Bin Laden dipandang sebagai representasi ajaran Islam. Selain itu, Dalai Lama, seorang pemimpin spiritual Buddha, secara jelas menunjukkan keprihatinannya dan menuntut sikap tegas *Suu Kyi* untuk melindungi etnis Rohingya. Dalam tataran ini, aku ingin keluar dari segala kebencian antarpemeluk agama, dan pada saat yang sama, membatasi 'keruntuhan nilai-nilai kemanusiaan' yang dialami oleh etnis Rohingya dalam konteks lokalitas Myanmar.

Benih-benih ketakutan *Wirathu* sebenarnya sangat mudah ditemukan di berbagai tempat. Di Oz, ada ketakutan laten pada pertumbuhan demografis komunitas Arab Muslim yang sangat cepat dibanding kulit putih, yang dikhawatirkan akan mengubah konstelasi kekuatan ekonomi, politik, dan nilai-nilai kebudayaan *Aussie*. Namun, *concern* itu tidak meledak menjadi kebencian massif, terstruktur

apalagi genosida karena adanya komitmen pada nilai-nilai yang melandasi terbentuknya Oz sebagai suatu negara yang beradab. Oz dan banyak juga negara yang lain adalah simbol dari sisi baik nasionalisme inklusif terhadap *nation-state*, bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Myanmar, yang bisa dikatakan sebagai paradoks sebuah *nation-state*.

Secara historis, despotisme di Prancis dan Spanyol adalah anteseden dari lahirnya konsep *nation-state*; suatu konsep yang lebih berbasis dan mengedepankan nilai-nilai luhur untuk hidup bersama dalam suatu wilayah daripada mengedepankan kekuatan dan dominasi kelompok. Nasionalisme, dalam konteks *nation-state*, berbasis pada rasionalitas luhur bukan yang nirmoral. Dalam konteks itu, ujaran kebencian oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain yang mendiami kawasan yang sama sebenarnya adalah pengingkaran yang nyata terhadap prinsip dasar kelahiran *nation-state*. Namun, *Wirathu* menunjukkan itu dengan sangat jelas, vulgar, dan eksekif. Daya ledaknya semakin kuat ketika dibungkus dengan agama. Itulah yang terjadi di Myanmar: nilai luhur agama dan prinsip dasar *nation-state* dikangkangi dengan sangat jelas demi - sesuatu yang didefinisikan- sebagai kepentingan agama dan *state* itu sendiri. Alih-alih sebagai *common platform*, *state* dan nasionalisme yang sangat banal justru menjadi kekuatan penindas bagi kelompok minoritas yang tidak dikehendaki.

Nation-state dan nasionalisme bukanlah konsep yang telah jadi dan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Nasionalisme adalah representasi modernitas Barat yang paling kokoh di seluruh dunia, dan menjadi 'sakral' bagi para penganutnya yang fanatik. Dalam konteks ini, di negara kita, jargon-jargon provokatif seperti 'NKRI harga mati, ayat konstitusi lebih tinggi dari ayat kitab suci' bisa dipahami, terlepas dari apakah jargon itu tak lebih dari pepesan kosong yang sama sekali

tidak substantif, apalagi fungsional untuk kehidupan kebangsaan kita. Hanya satu yang jelas dari jargon itu: sakralitas agama telah digantikan oleh sakralitas *nation-state* dan konstitusi. Dalam konteks Myanmar, *nation-state* dan nasionalisme yang masih liar itu, sayangnya, diisi oleh pemahaman agama yang ekstrem. Radikalisme dan keruntuhan nilai-nilai kemanusiaan adalah akibat langsung dari *religious fundamentalism* yang telah berhasil menjelma menjadi *core* elemen nasionalisme Myanmar. Bertolak belakang dengan bangsa lain yang menerima para pengungsi yang sama sekali tidak mereka kenal, nasionalisme ekstremis justru mengusir Rohingya dari tanah kelahirannya dan menjadikan mereka pengungsi di berbagai wilayah yang jauh dari tanah kelahiran mereka.

Rohingya memang malang. Jangankan punya negara (*stateless*), hak untuk menyebut diri mereka sendiri sebagai Rohingnya di tanah tempat mereka lahir dan tumbuh juga sudah dicabut, atau malah tidak pernah dianggap ada oleh kekuatan yang bernama *nation-state* itu. Dulu, Marx pernah berkata bahwa '*East can't represent themselves, they must be represented*'. *Wirathu* mengubahnya menjadi lebih spesifik dan vulgar: '*Rohingya are not allowed to define themselves, they must be killed or expelled*'. *Grand-narasi* modernitas yang menjadi topeng buruk kapitalisme global, seperti *development* dan *progress* ikut menyulut api permusuhan itu. Ya, atas nama pembangunan dan kemajuan, Rohingya harus terusir. Kelompok-kelompok bisnis internasional yang mengeruk keuntungan di dalamnya hanya tutup mata. Kapitalisme primitif seperti ini memang tidak punya keberpihakan selain pada keuntungan materi. Duka Rohingya adalah hasil perselingkuhan harmonis antara radikalisme agama, nasionalisme picik dan kapitalisme primitif. Dukaku yang mendalam untuk Rohingya, bukan hanya karena mereka Muslim, tapi lebih dari itu, mereka adalah manusia sepertiku (Sydney, 11 September 2017).



Ulama Aktivistis dan Ulama Tradisional

Jika Gramsci mengatakan setiap manusia pada hakikatnya adalah seorang intelektual, hanya saja tidak setiap mereka menjalankan fungsi intelektual, maka bisa juga dikatakan bahwa setiap kita adalah ulama (dalam pengertian luas), hanya saja tidak setiap kita menjalankan fungsi keulamaan tersebut. Dalam ranah agama, dengan berpijak pada konsep Gramsci, terdapat ulama aktivis (mereka yang terlibat dalam pergerakan) dan ulama tradisional (mereka yang hanya berkuat dengan keilmuannya saja dan tidak ambil peduli dengan perubahan sosial yang terjadi di sekelilingnya). Ulama aktivis seringkali harus menggunakan retorika yang bernada 'pemberontakan' sebagai refleksi dari sikap dan keberpihakannya pada keadaan yang sedang terjadi. Tidak heran, pernyataan-pernyataan tegas dan gamblang lebih sering terdengar dari mereka. Sebaliknya, ulama 'tradisional' tetap berpegang teguh pada 'kesantunan'—apapun kondisinya—karena dianggap sebagai refleksi dari misi *rahmatan lil alamin*. Kritik pedas apalagi demonstrasi, bagi ulama tradisional, adalah sesuatu yang tabu. Apakah ada yang salah dengan kedua fungsi ulama di atas? Menurutku, tidak ada, sebab mereka saling melengkapi karena kondisi bangsa yang memang sangat kompleks.

Aku yakin, bukan terorisme dan radikalisme agama yang akan menghancurkan negeri ini, tapi ketidakadilan sosial yang menganga bagai bumi dan langit yang menggerus sendi-sendi kehidupan bangsa. Sekedar berbagi cerita untuk saudaraku di Pulau Jawa. Pernahkan mendengar cerita ini? Suatu ketika seorang transmigran Jawa, dengan mengendarai sepeda motornya, masuk ke kampung penduduk lokal berjualan es krim. Beberapa orang penduduk lokal menghampirinya dan menumpahkan es krim jualannya. Memprihatinkan memang. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah penduduk lokal radikal atau teroris? Lihatlah konteksnya. Penduduk lokal hidup dalam kemiskinan, hutan mereka habis dibagi-bagi di Jakarta oleh dan untuk para bandit ekonomi dan politik. Sementara itu, desa-desa transmigrasi dilengkapi dengan seluruh sarana yang dibutuhkan: rumah kediaman, tanah dua hektar per keluarga, sarana pendidikan dari SD hingga SMA. Ada kecemburuan dan persepsi ketidakadilan yang gagal dipahami oleh penguasa 'VOC' di Jakarta. Dalam memori penduduk kampung di atas, Indonesia adalah Jawa, sementara Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara adalah 'Indonesia lainnya'. Bagiku di Riau, milik sejatiku adalah banjir di darat dan asap di udara, sementara tanah, hasil bumi dikeruk oleh para bandit dan dibawa entah kemana. Ini hanyalah satu segi dari 'persepsi' ketidakadilan di tengah ratusan bahkan ribuan persepsi ketidakadilan lainnya.

Memori ketimpangan ini tertanam sangat dalam, dan selanjutnya mempengaruhi pandangan dan respons terhadap berbagai peristiwa yang terjadi. Di tengah kondisi itu, ada sekelompok orang yang merasa paling NKRI, paling Pancasila, dan paling menghargai perbedaan. Aku jenuh melihat klaim-klaim kosong itu!!

Tidak ada 'kesantunan' yang *applicable* di segala tempat, waktu, dan konteks. Yakinlah, bahwa negeri ini tidak akan pernah merdeka

dari penjajahan jika tidak ada ‘kemarahan’ yang digaungkan oleh para ulama aktivis. Substansi dari penjajahan bukanlah kehadiran bangsa asing, tapi eksploitasi dan keserakahan. So, siapapun yang terlibat dalam aktivitas eksploitatif-ekstraktif yang menghancurkan sendi kehidupan orang lain pada hakikatnya adalah seorang penjajah. Merespons ketidakadilan struktural dan sistemik dengan terus menerus mengedepankan kesantunan adalah refleksi dari kegagalan memahami lokalitas. Di sinilah aku berusaha untuk memahami ‘ekspresi perlawanan’ yang digaungkan oleh ulama aktivis.

Lantas, apa yang seharusnya dilakukan? Yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk memahami konteks lokal secara bijak, dan memproduksi etika dan sikap sesuai dengan lokalitas tersebut. Itulah *local wisdom*. Jadilah seorang yang dinamis, bersikap sesuai dengan konteks: menjadi garang terhadap segala bentuk ketidakadilan dan kezaliman, dan lembut dalam merespons segala kebajikan.

Suara keras para ulama aktivis adalah refleksi dari anomali sosial yang terjadi, oleh sebab itu, adalah perbuatan tanpa guna ketika kita mempertentangkan pendapat antara ulama aktivis dan ulama tradisional dalam merespons berbagai keadaan, sebab mereka berbicara atas dan untuk segmen yang berbeda. Entahlah!





Islam dan *Others*

Kehadiran *others* dalam pemikiran keagamaan bukanlah hal baru. Halbwachs (1992), murid Durkheim menulis, identitas pada fase awal Kristiani dibangun dengan mengonstruksi perbedaan terhadap agama seniornya: Judaisme. Menjadi Kristen, berarti meyakini dan menjadi pribadi yang berbeda dengan Yahudi. Bagaimana respons Yahudi ketika itu? Apakah menerima dengan senang hati disebut sebagai ‘asing’, walau lahir dari rahim yang sama? Ataukah respons mereka mirip dengan protes sebagian umat Kristiani untuk digolongkan secara teologis sebagai kafir oleh agama Islam, yang juga lahir dari tradisi yang sama—*Abrahamic traditions*? Entahlah. Yang jelas, kecenderungan membangun batas-batas antara ‘*us*’ dan ‘*other*’ dengan legitimasi teologis bukan hasil temuan baru. Semua absah dalam kerangka agama masing-masing.

Suatu ketika, tahun 2008, aku ‘*nyantri*’ dua minggu di Institut Teologi Protestan (ITP), Paris. Di asrama mahasiswa, tempat aku menginap, ditempel gambar Pulau Andalas. Pada bagian tengah pulau, yaitu Danau Toba, terdapat keterangan singkat: pusat gerakan misionaris wilayah barat Indonesia. Sebagai orang Sumatra, seorang Muslim, aku termenung menatap gambar itu. Gambar itu sangat ‘berarti’ bagiku.

Selama *nyantri* disitu, dalam suatu kesempatan, aku berdiskusi dengan dua orang sahabatku: warga Perancis, kulit putih dan calon misionaris, Aku bertanya: “Apa cita-cita Anda setelah selesai kuliah di ITP?”

Dengan penuh semangat, ia menjawab: “Aku ingin menerangi domba-domba Yesus di berbagai belahan bumi”. Tersinggungkah aku dengan jawabannya? Tentu saja tidak, sebab ia menjawab dalam kerangka teologi Kristiani yang ia yakini. Domba-domba yang tersesat adalah *others*, dan aku adalah bagian dari domba itu.

Aku bisa saja bertanya, apakah seorang Muslim yang baik, pintar, suka menolong orang, tetap lebih sesat dibanding seorang Kristiani yang korupsi, diskriminatif, dan tidak memiliki empati pada penderitaan orang banyak. Namun, aku tak menyampaikannya, sebab itu pertanyaan yang salah kaprah jika maknanya ditarik ke dalam ranah sosial politik. Membenturkan kategori teologis dengan kategori sosial bukanlah tindakan yang sepadan, karena dikonstruksi dari nilai, tujuan, dan keberpihakan yang berbeda. Secara teologis Kristiani, aku yakin bahwa Kristen yang tidak empatik lebih baik dari Muslim yang empatik, sebab *extra ecclesia nulla salus* (di luar gereja tidak ada keselamatan). Islam juga mengatakan hal yang sama: hanya Islam agama yang diterima Allah. Dalam kaca mata ini, Muslim yang mencuri dipahami lebih baik dari non-Muslim yang jujur, sebab ia berada dalam ‘rumah keselamatan’ (Islam), sementara non-Muslim yang jujur bukanlah penghuni rumah itu. Lantas, apakah aku bisa mengatakan: tidak apa-apa jahat, asal Kristen? Tidak apa-apa jahat asal Islam? Itu kesimpulan yang salah kaprah dan *over-simplifikasi*.

Apa yang membedakan identitas domba yang sesat dengan yang tidak? Definisi teologis yang sangat eksklusif. Dan semua definisi teologis bersifat eksklusif. Apakah ada definisi yang inklusif? Ada. Itulah yang dikonstruksi dan kemudian menjadi komoditas kaum

liberal. Ketika definisi teologis sangat inklusif, maka identitas religius menjadi *blur*, samar. *Religious salience* menjadi hilang, diganti oleh identitas baru. Aku bukan lagi seorang Kristen, Muslim, atau agama apapun, sebab itu tidak cukup, bahkan tidak layak untuk hidup. Yang muncul adalah (dalam konteks Islam): aku seorang Muslim demokrat, Muslim inklusif, Muslim toleran, Muslim moderat. Islam tidak lagi cukup sebagai sumber nilai, bahkan seringkali dibenturkan dengan nilai-nilai baru yang dibawa oleh modernitas. Dalam benturan itu, yang muncul dominan adalah konsep moderat, demokrat, inklusif, dan toleran. Menjadi toleran dan moderat lebih penting dari menjadi seorang Muslim!

Akhirnya, kembali ke ranah teologis, ada batasan-batasan yang harus dipahami dan disadari, sehingga terhindar dari *over-simplifikasi* dalam mengambil kesimpulan. Walau ada anggapan bahwa banyak 'pintu' menuju Tuhan, keyakinan bahwa hanya 'pintu' miliknya yang terbuka, sementara pintu lain sedang, dan akan terus tertutup, akan tetap ada dan menjadi *core* dalam teologi keagamaan. Dengan itu, *over emphasis* dalam ranah teologis bisa dipahami, dan sebaliknya, tanpa itu, tak perlu ada agama. Wallahu a'lam. (Sydney, 12 Mei 2017).





Radikalisme

Radikalisme, kata yang setiap kali kutemui, seringkali lebih membingungkan daripada menjelaskan. Dari kacamata sebagai seorang Muslim tradisional, juga sering menyesakkan. Mengapa? Aku tidak menolak bahwa memang ada radikalisme dalam Islam, Khawarij adalah salah satu contohnya. Tapi, perkembangan peradaban Islam tidak ditopang apalagi diwarnai oleh Muslim dengan tipikal Khawarij tersebut. Khawarij hanyalah kerikil yang tidak penting, namun tetap harus dijadikan pelajaran. Dalam konteks itu, agak menyesakkan membaca tuduhan radikalisme terhadap Muslim yang dilakukan secara serampangan. Ya, yang kutentang adalah penggunaannya yang sangat serampangan, tendensius, dan bahkan memuakkan karena lebih banyak didasarkan pada hasil imajinasi daripada fakta historis. Maknanya telah dikuasai dengan sangat baik oleh *regime of truth* yang berasal atau dipengaruhi kelompok tertentu. Oleh sebab itu, merekalah yang berhak untuk memberi label.

Terkadang aku termenung, bagaimana seseorang yang telah mencurahkan jiwa raganya untuk bangsa dan pernah memimpin salah satu organisasi Muslim terbesar di negeri ini, begitu mudah dicap radikal hanya karena menuntut Ahok diadili? Contoh lain, seorang profesor di salah satu kampus terkenal, dengan ringan

berkomentar, bahwa saat ini hanya NU yang menjadi benteng NKRI, sebab Muhammadiyah telah disusupi oleh kelompok radikal.

Sebagai perbandingan, ada baiknya kuceritakan salah satu kelompok 'radikal' yang sangat dibenci oleh 'publik', yaitu FPI. Suatu ketika, aku berkunjung ke rumah wakil panglima laskar, di daerah Mampang. Rumahnya kecil, di dalam satu gang yang hanya bisa dilalui oleh sepeda motor. Sedang berbincang santai, istrinya datang menghadirkan teh panas dan cemilan hangat. Di ruang tengah, anaknya yang seusia SD sedang asyik menonton konser dangdut di sebuah saluran TV swasta. Suasana yang kurasakan ketika itu sangat 'pribumi'. Sebelum aku datang, ternyata ia juga baru saja menerima seorang peneliti dari Jepang. Pengakuannya, peneliti itu telah beberapa kali berkunjung ke rumahnya. Tak jauh beda, hal yang sama kutemukan di rumah salah seorang pengurus FPI Jakarta Utara. Di rumahnya yang kecil di Warakas, kami berbincang santai. Ia bercerita, ketika terjadi tsunami di Aceh, ia minta izin pada bosnya untuk menjadi relawan ke Aceh, namun ditolak. Akhirnya, ia memutuskan berhenti. Ia yakin, ketika kembali ke Jakarta, Allah pasti akan membukakan rezeki dari jalan lain. Tiga bulan di Aceh, ia kembali ke Jakarta sebagai pengangguran. Keyakinannya benar, tak lama, ia kemudian mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Inilah salah satu gambaran orang-orang yang selama ini dianggap radikal?

Diskursus radikalisme adalah bagian dari cara kapitalisme Barat melakukan ekspansi ke wilayah Muslim. Pemahaman tentang Muslim dikonstruksi dan diproblematikasi. Islam dan Muslim menjadi '*object of knowledge*', hasilnya kemudian tidak hanya dikonsumsi Barat, tapi juga kaum Muslim sendiri. Sebagai objek pengetahuan, maka kemudian 'ditemukan' dan 'dikonstruksi' berbagai permasalahan dalam masyarakat Muslim, sebagian besar negatif. Maka, muncullah pemaknaan sepihak terhadap berbagai konsep, seperti radikal, teroris

sehingga menjadi ancaman terhadap Barat. Muslim adalah *others*; dan penggunaan istilah “Muslim radikal” untuk menjelaskan mereka adalah *others* dalam konteks negara Indonesia.

Labelisasi radikal lebih bertujuan sebagai alat kontrol sosial daripada untuk menjelaskan fakta, dan *discourse* radikalisme adalah bagian dari *production of difference*. Karena berbeda, mereka tidak berhak untuk bernapas, apalagi hidup di negeri ini. Label radikal pada suatu kelompok, dengan sendirinya adalah bagian dari cara untuk membatasi ruang sosial dan politik kelompok itu, dan bahkan mencabutnya dari akar tunggangnya sebagai Muslim Indonesia. Perbedaan tidak lagi menjadi *marker of cultural diversity*, tapi telah menjelma menjadi alat kontrol. Baik untuk dicatat, sepanjang pengetahuanku, hingga saat ini, tak ada seorangpun pelaku yang dianggap menista agama dibunuh oleh seorang Muslim, bandingkan dengan kasus Faraj Faudah di Mesir, yang dibunuh oleh seorang penjual ikan karena mencaci maki istri Nabi. Setidaknya, ini menjadi bukti bahwa radikalisme bukanlah fakta dominan di Indonesia yang harus terus menerus direproduksi demi masuknya ‘nilai-nilai’ lain.

Radikalisme tak lebih dari problematisasi yang dibangun dalam sebuah *discourse* daripada fakta yang benar-benar berurat berakar dalam masyarakat. Dalam suasana yang penuh problem itu, maka kapitalisme Barat bisa masuk dengan mulus, menawarkan *treatment*, berikut ‘obat, dosis’, dan cara penggunaannya. Dalam konteks itulah, nilai dan sistem yang datang dari Barat, mulai dari demokrasi, pluralisme, inklusifisme, sekulerisme, liberalisme, persamaan gender, persamaan HAM, dan lainnya, dikonsumsi dengan penuh gairah. Sebaliknya, segala yang dicap ‘syaria’ akan ditolak, karena ia adalah *others*. Wallahu a’lam. (Sydney, 18 April 2017).





Islam Progresif

Dalam seminar bulanan di kampus, salah seorang sahabatku, bule Aussie, memaparkan salah satu kelompok Muslim di Amerika yang tidak memisahkan saf laki-laki dan perempuan ketika salat berjamaah. Sahabatku itu menyebutnya sebagai 'Islam progresif', dengan satu alasan: mereka berani keluar dari 'pakem' yang memisahkan antara saf laki-laki dan perempuan. Ada *gender equality*! Saat itu, yang lebih menarik bagiku bukanlah fakta tentang kelompok 'Muslim progresif' di New York tersebut, tapi penggunaan kata progresif yang begitu serampangan dan bias.

Aku menyadari bahwa kategori progresif, moderat, radikal, konservatif, garis keras sebenarnya hanyalah cara untuk memilah dan mendefinisikan 'others'; progresif dan moderat adalah 'us', sementara radikal, konservatif dan fundamentalis adalah 'others'. Dua kata ini bisa dimengerti dengan memahami struktur '*regime of truth*'. Dalam struktur itu, Barat adalah *center*, dan Muslim adalah *periphery*.

Pandangan Barat tentang Islam terkonsentrasi pada aspek atau nilai-nilai Islam yang mereka tolak. Seorang Hassan Hanafi, dengan nada jengkel pernah mengkritik sikap Barat tersebut dalam suatu seminar di *Amrik*, yang menjadikan perbudakan sebagai isu utama. Pertanyaan Hanafi saat itu adalah: Kenapa kalian (Barat) menjadikan

isu-isu usang dalam Islam sebagai kajian utama? Pertanyaan yang tidak bisa dijelaskan kecuali dari kaca mata kepentingan.

Ada kecenderungan di kalangan masyarakat Barat—dan ‘mereka’ yang merasa menjadi bagian dari modernitas Barat, walau kakinya masih berpijak di lumpur Kali Ciliwung—bahwa kelompok muslim yang konsisten dengan nilai-nilai keislaman, namun nilai-nilai tersebut dianggap Barat tidak *compatible* dengan modernitas, akan diberi label radikal atau fundamentalis. Sebaliknya, yang mengedepankan nilai-nilai peradaban Barat daripada ajaran yang terdapat dalam Alquran akan dianggap progresif. Dalam konteks ini, maka kaum Muslim yang mendukung *qishas*, rajam, dan potong tangan harus ikhlas untuk disebut primitif dan biadab, sedangkan yang menolaknya karena bertentangan dengan prinsip HAM akan dianggap modern dan moderat.

Apakah aku mendukung fundamentalisme? Tergantung pada definisi siapa yang dipakai. Yang jelas, aku mendukung kembalinya para pemeluk agama pada ajaran kitab sucinya. Oleh sebab itu, aku bisa memahami pendapat Pacquiao yang menolak LGBT dengan merujuk pada Bible; aku juga menerima keputusan Sultan Brunei yang menerapkan hukum Islam di kerajaannya. Anggapan bahwa implementasi hukum Islam hanya akan menimbulkan pelanggaran HAM berat dan memakan korban hanyalah imajinasi liar orang yang tidak paham sekaligus tidak mau memahami.

Berkaitan dengan citra Islam, permasalahan utama saat ini adalah imej media jauh lebih dominan dan berpengaruh dalam mendeskripsikan Islam, jika dibanding dengan peran dan pengaruh para Islamolog. Media, dalam kaca mata Ahmed, telah menjelma menjadi ‘setan laknat’ yang nirmoral, tapi dipersenjatai dengan kebebasan pers yang luar biasa. Ironisnya, dalam konteks Indonesia, para sarjana Muslim yang notabene memiliki pengetahuan keagamaan

yang 'cukup' justru ikut mengonsumsi citra negatif Islam yang dibentuk oleh media, bahkan ikut menyebarkannya dalam sosial media.

Berita mengenai intoleransi Islam mengalahkan sisi toleran yang telah dipraktikkan selama berabad-abad oleh kaum Muslim di Nusantara. Sebagai bukti toleransi ini, baik untuk direnungkan bahwa kaum Muslim tidak pernah memandang saudaranya umat Kristiani secara peyoratif hanya karena memeluk agama yang dibawa oleh kolonial. Kenyataan yang berbeda dialami oleh kaum Muslim Balkan yang masih mendapat stigma Turki dari kaum Kristen Ortodoks, sehingga sempat menjadi korban genosida. Dalam sebuah seminar, saya terpaksa mendengar paparan seorang profesor bahwa rasio gereja dan umat Kristiani di Indonesia ternyata lebih tinggi dibanding Eropa. Sebagai Muslim, saya tidak cemas, malah bangga, sebab toleransi ternyata telah menjadi sifat inheren dalam kehidupan kaum Muslim. Fakta sosial-historis ini jauh lebih dalam dan layak untuk dipercayai dan disebar agar tumbuh optimisme kita dalam berbangsa dan bernegara, daripada ikut-ikutan menyebarkan dan mengomentari berita penolakan salat jenazah yang sangat artifisial, tidak substantif, karena bukan fatwa MUI, keputusan Majelis Tarjih, *bahtsul masail* ataupun pendapat organisasi dan ulama yang otoritatif. Wallahu A'lam. (Sydney, 13 Maret 2017).





Islam Liberal

Suatu ketika, aku ditanya oleh seseorang tentang Islam liberal (menurutku, lebih tepat menggunakan kata Muslim liberal, jika kata liberal tetap ingin digunakan). Mengapa Islam liberal lebih dekat dengan non-Muslim daripada dengan *mainstream* umat Islam? Pertanyaannya rumit, karena bersifat penilaian yang bisa jadi benar, bisa jadi juga salah. Aku tidak tahu entah siapa saja yang ia golongkan ke dalam kelompok Islam liberal itu. Boleh jadi aku juga termasuk ke dalamnya. Aku tidak ingin berandai-andai karena aku sendiri selalu diliputi ‘kecemasan’ dengan kualitas keislamanku saat ini, apakah cukup untuk dijadikan bekal menghadap-Nya.

Berkaitan dengan kategori liberal dan non liberal ini, ada satu pengalaman menarik. Suatu ketika, ketika sedang menikmati makan siang di sebuah restoran mediterania di London, Prof. Azim Nanji memperkenalkanku pada seorang intelektual Muslim Indonesia, yang dalam kategori Adian Husaini dan Hartono Ahmad Jaiz termasuk tokoh liberal. Yang mengejutkanku adalah pertanyaan beliau kepadaku: “Anda salat atau tidak?”

Saya jawab: “Salat, Prof. I am a practicing Muslim :-)”.

“Jangan lupa mengerjakan salat, terlepas itu wajib atau tidak. Terlalu banyak nikmat Tuhan yang harus kita syukuri”, ujarinya menasehatiku.

Aku menemukan suatu fakta yang kontras antara penilaian Adian Husaini dan Ahmad Jaiz dengan fakta yang kutemui. Ini sekedar menunjukkan betapa ‘bermasalahnya’ kategori dan penilaian yang bersifat sepihak.

Kembali ke pertanyaan di atas, apakah kategori liberal dan ‘mainstream-konservatif’ masih bisa digunakan, dan oleh sebab itu harus dijawab? Dalam kacamata yang lebih longgar dan ‘penuh pengecualian’ mungkin masih bisa dijawab, itupun hanya sebatas asumsi. Menurutku, pandangan hidup yang liberal adalah cara untuk ‘menikmati’ agama dalam, untuk, dan selama hidup; sedangkan konservatisme adalah cara menggunakan agama untuk akhirat. Boleh jadi, pandangan liberal adalah simbol keberhasilan untuk melepaskan diri, atau setidaknya mereduksi pengaruh ‘ancaman’ akhirat dalam hidup; sementara konservatisme adalah cara untuk ‘menghadirkan’ ancaman itu dalam hidup. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi *life style* kedua kategori di atas. *Life style* ini adalah faktor penting untuk memahami jawaban pertanyaan di atas.

Saya jadi teringat dengan kata-kata Geertz: “Jika Anda ingin mengetahui definisi suatu disiplin pengetahuan, ketahuilah dengan cara mengamati apa yang dilakukan oleh para praktisinya”. Sekarang, lihatlah cara seorang yang liberal dan konservatif hidup; hal yang dilakukannya, dan yang tidak dilakukannya. Setelah itu, mungkin akan ditemukan jawabannya. Terus terang, aku ingin berlepas diri dari dua kategori tersebut. Misi agama sebagai *rahmatan lil alamin* yang sangat kujunjung tinggi ternyata berat untuk dilaksanakan karena adanya kepentingan yang saling berkelindan, terutama antara kepentingan nafsu dan nurani yang *genuine*. *Life style* adalah ekspresi yang paling jelas untuk melihat, apakah nafsu atau nurani yang dominan. (Sydney, 27 September 2016).





Memahami Sisi Lain Fundamentalisme

Pada Kamis, 14 Januari 2016 yang lalu, kita kembali tersentak oleh ledakan bom di jalan Thamrin Jakarta. Polri dengan cepat mengumumkan pelakunya adalah kelompok Muslim garis keras yang berafiliasi ke ISIS. Ada yang menyebut mereka fundamentalis, radikal, neo fundamentalis, Islamis, bahkan teroris. Dengan cepat dan mudah, kita biasanya langsung mengecam dan mengutuk setiap peristiwa kekerasan yang mengatasnamakan agama tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah kecaman, kutukan, dan pembelaan diri dari para ulama dengan mengatakan aksi tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam bisa menyelesaikan masalah sehingga tindak kekerasan atas nama agama (baca: Islam) tidak lagi terjadi?

Secara gamblang, setiap Muslim bisa menilai bahwa aksi para aktor bom bunuh diri sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kedamaian dan kerukunan serta penghargaan pada sesama manusia, termasuk pada pemeluk agama lain. Kata *ikrah* (pemaksaan) digunakan sebanyak tujuh kali dalam al-Quran, yang paling sering dikutip adalah ayat: *la ikraha fi al-din* (tidak ada paksaan dalam beragama). Secara jelas, ini menunjukkan Alquran yang menjadi sumber utama ajaran Islam sangat menolak segala bentuk kekerasan. Namun, apakah usaha kita yang terus menerus mengekspos ke publik

bahwa Islam adalah agama yang cinta damai mampu menyelesaikan, atau sekedar mengurangi intensitas kekerasan atas nama agama, seperti pengeboman? Kekerasan terus terjadi, dan ini menandakan kecaman dan pembelaan diri dari para ulama tentang karakter damai Islam, dalam tataran tertentu, kurang efektif. Ada hal lain yang harus kita lakukan yang melampaui ‘kecaman’ dan ‘pembelaan diri’.

Islam tidak hanya sebuah agama, namun juga sebuah tatanan budaya yang penuh dinamika. Dalam tataran normatif-Qurani, Islam bersifat statis, sebab tidak seorangpun memiliki otoritas untuk mengubah isi Aquran. Namun, sebagai sebuah tatanan budaya, Islam bersifat dinamis seiring adanya pengaruh internal dan eksternal. Dalam kerangka inilah, sangat penting bagi kita, terutama negara dan seluruh aparatnya untuk memahami konteks kehidupan umat Islam secara keseluruhan. Negara perlu memahami—tidak mesti memenuhi—perasaan mereka yang terlibat dalam aksi kekerasan atas nama agama, berbagi dengan mereka dan ikut merasakan kegundahan, kekhawatiran, dan juga harapan-harapan mereka. Hasan Hanafi (2001: 1-2) menganjurkan adanya simpati yang tulus pada fenomena yang terjadi tersebut tanpa menjatuhkan vonis terlebih dahulu.

Sikap-sikap ini perlu dikembangkan lebih lanjut mengingat karakter terorisme yang penuh varian. Ada aksi teror yang perlu dihadapi dengan kekuatan senjata, namun ada juga yang perlu ditindaklanjuti dengan penghayatan dan simpati yang mendalam terhadap kerangka untuk memahami pola pikir, pemahaman, dan harapan mereka sehingga fenomena yang memiliki karakter serupa selanjutnya bisa dicegah dan diatasi. Menurut saya, Afif alias Sunakim dan Muhammad Ali, pelaku bom Thamrin, dalam tataran tertentu, bukan hanya pelaku teror bom bunuh diri di Jakarta, namun juga korban indoktrinasi yang dilakukan oleh aktor yang belum tertangkap hingga saat ini. Para aktor intelektual yang melakukan indoktrinasi tersebut ibarat bandar narkoba yang berjualan mencari pelanggan

atau korban baru. Siapapun yang sudah ‘kecanduan’ akan sangat sulit keluar dari jaringan tersebut. Para korban narkoba sangat menikmati ‘penyimpangan’ yang mereka alami, sama dengan mereka yang menjadi korban indoktrinasi yang rela mengorbankan nyawa mereka sendiri. Yang membedakan hanyalah, para pecandu narkoba adiktif pada sesuatu yang bersifat material, sedangkan Sunakim dan Ali pada hal yang lebih abstrak, yaitu gagasan.

Simpati yang mendalam perlu kita berikan bukan hanya pada korban bom, tapi juga pada pelaku dan keluarganya. Lihatlah kedukaan, keterkejutan, dan kegundahan yang mendalam keluarga Sunakim ketika mengetahui anggota keluarganya tersebut adalah pelaku terror Thamrin. Tak satupun keluarganya mendukung tindakan tersebut. Dalam tataran inilah kita melihat bahwa tindakan yang secara jelas tidak didukung oleh keluarga pelaku pengeboman itu sebenarnya tidak memiliki basis sosial. Oleh sebab itu, saksi dan pelaku yang masih hidup harus dijadikan sebagai informan, dalam kerangka untuk mengetahui harapan, kegelisahan, dan pandangan mereka pada negara dan masyarakat. Dengan itu, diharapkan sumber penyimpangan bisa terlacak.

Penggunaan kekuatan senjata yang berlebihan yang selama ini ditunjukkan oleh Densus 88 hanya akan mendorong transformasi kategori musuh di kalangan fundamentalis, dari *far enemy* (AS dan sekutunya) kepada *close enemy* (Pemerintah di negara Muslim). Dijadikannya Istana, tamu asing yang datang berkunjung, mall, Mabes Polri, dan kantor-kantor polisi sebagai target setidaknya menunjukkan adanya transformasi kategori musuh tersebut. Sebagai penutup, doaku yang tulus untuk para korban dan keluarganya, apapun agamanya. Semoga kedamaian kembali menyelimuti negeri ini. (dengan sedikit perubahan, tulisan saya ini pernah dimuat Harian Kontan Jakarta). (16 Januari 2016)



FPI dan Gerakan Pemberantasan Korupsi

Sekedar berkaca ke belakang, merupakan perkembangan yang menjanjikan ketika Habib Rizieq, pendiri sekaligus representasi Front Pembela Islam (FPI), mendeklarasikan pendirian Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI)-Pejuang pada 22 September 2011 di depan gedung KPK di Jakarta. Keterlibatan FPI dalam gerakan anti korupsi merupakan fenomena yang menarik mengingat fokus gerakan anti maksiat yang mereka usung selalu berkaitan dengan narkoba, pelacuran, minuman keras, pornografi, dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia hiburan, atau yang lebih dikenal sebagai penyakit masyarakat (pekat). Dalam kasus tertentu, mereka juga terlibat dalam protes pendirian rumah ibadah (gereja) baru yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tulisan berikut sekedar refleksi ringan mengenai kevakuman FPI dalam gerakan anti korupsi. Deklarasi yang Habib canangkan di depan KPK pada 2011 yang lalu menjadi tak berarti karena tidak ditindaklanjuti dengan gerakan nyata. Kevakuman FPI pada isu-isu korupsi yang melanda negeri ini, termasuk pada isu KPK-Polri menunjukkan FPI belum memiliki 'keseriusan' dalam memberantas korupsi.

Kevakuman FPI, atau lebih tepatnya Habib Rizieq, dalam gerakan anti korupsi memang cukup mengundang tanda tanya bagi

masyarakat, termasuk bagi beberapa orang aktivis Laskar Pembela Islam yang saya wawancarai beberapa tahun yang lalu. Bahaya korupsi sebenarnya jauh lebih besar dibanding penyakit masyarakat yang mereka berantas selama ini. Bagi para aktivis FPI, kevakuman tersebut dijawab dengan simpel: belum ada perintah dari Habib. Sentralisme peran Habib dalam FPI, walaupun dilegitimasi oleh para tokoh FPI yang lain, sangat menentukan arah dan model gerakan anti korupsi yang mereka usung.

Sebagai ranah baru, FPI memang belum memiliki *track record* dalam gerakan massif pemberantasan korupsi, sebagaimana yang mereka lakukan dalam memberantas penyakit masyarakat. Hingga saat ini, 4 tahun pascadeklarasi gerakan antikorupsi, pemberantasan korupsi masih tetap baru bagi FPI, karena mereka belum juga masuk secara penuh dalam gerakan pemberantasan korupsi. Namun, satu hal yang harus diapresiasi adalah munculnya kesadaran di kalangan FPI bahwa korupsi sudah sangat membahayakan negara.

Selain bahaya korupsi yang sangat besar bagi bangsa, apa sebenarnya faktor lain yang mendorong Habib dan FPI masuk ke ranah gerakan anti korupsi? Dalam wawancara dengan salah satu media pada 4 Januari 2010, Habib secara tegas menyatakan persetujuannya agar para koruptor dihukum mati. Dalam kaidah hukum Islam, hukuman yang berat hanya diberikan untuk *kabair* (dosa-dosa besar) seperti perzinahan dan pembunuhan. Persetujuan tegas Habib pada hukuman mati untuk para koruptor menandakan kejahatan korupsi diklasifikasikan ke dalam *kabair*. Jika tergolong ke dalam *kabair*, berarti FPI berkewajiban untuk terlibat aktif dalam gerakan pemberantasannya. Klasifikasi seperti ini penting untuk dipahami mengingat FPI—atau Habib Rizieq--selalu menggunakan bahasa agama dalam menyampaikan gagasan, terlepas dari adanya tuduhan bahwa logika-logika agama yang mereka bangun tidak murni dan sarat kepentingan.

Karena keterlibatan langsung dalam gerakan anti korupsi yang secara substantif lebih kompleks dibanding isu-isu yang berkaitan dengan penyakit masyarakat merupakan hal baru bagi FPI, maka FPI dihadapkan pada minimal tiga problem. *Pertama*, pembuktian isu korupsi jauh lebih rumit dibanding pembuktian isu yang berkaitan dengan penyakit masyarakat karena melibatkan instrumen hukum yang tidak bersih dari korupsi. Akibatnya, penentuan target korupsi yang dijadikan sasaran tembak tentu lebih problematis. Bisa saja terjadi, koruptor yang dituntut oleh Laskar Anti Korupsi FPI, ternyata kemudian divonis bebas oleh pengadilan dan menuntut balik FPI dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dalam hal ini, Habib Rizieq sebagai *central figure* dalam FPI harus lebih berhati-hati dalam menentukan sasaran tembak tersebut. Secara psikologis, saya menduga kekhawatiran ini tidak terlalu berpengaruh pada para aktivis Laskar karena adanya kepercayaan penuh pada figur Habib Rizieq yang siap bertanggungjawab dengan apapun yang dilakukan oleh para laskarnya. Catatan sejarah FPI menunjukkan Habib memang selalu bertanggung jawab pada ulah anak buahnya. Kepercayaan pada pribadi Habib inilah yang menyebabkan ia selalu dipatuhi oleh pengikutnya di tengah kecaman dari mereka yang kontra. Oleh sebab itu, gerakan anti korupsi yang diusung oleh Habib Rizieq kemungkinan akan diikuti dengan patuh oleh para pengikutnya tanpa adanya ketakutan yang berarti akan mendapat serangan balik; dalam hal ini, masalahnya bukanlah pada level FPI secara organisasi, tapi lebih pada ‘kemampuan’ Habib dalam mengidentifikasi isu-isu korupsi yang akan dilawan.

Kedua, berbeda dengan isu penyakit masyarakat yang relatif bebas unsur politik, isu-isu korupsi terutama yang berskala besar sangat kental dengan isu politik. Dalam konteks ini, FPI dalam gerakannya tentu sulit terlepas dari adanya tuduhan politisasi, terlepas dari fakta

tuduhan itu benar atau tidak. Isu korupsi yang begitu banyak menuntut FPI untuk benar-benar bersikap adil dalam pengertian mampu memberikan tekanan yang sama untuk setiap kasus. Pengabaian satu kasus tertentu dan kemudian intens pada kasus yang lain akan membuka ruang tuduhan pada FPI. Oleh sebab itu, kemampuan FPI untuk memilih jenis 'senjata' yang benar untuk masing-masing kasus akan sangat menentukan arah dan kesinambungan gerakan anti korupsi yang telah dicetuskan. Kemampuan ini juga akan sangat berdampak pada citra FPI di mata masyarakat.

Ketiga, tradisi para pengikut FPI yang lebih bertumpu pada budaya oral menjadikan mereka sebagai objek daripada subjek. Dalam artian, para laskar yang terlibat demo anti korupsi boleh jadi tidak terlibat aktif menentukan isu yang menjadi target operasi. Oleh sebab itu, akan selalu ada anggapan pihak luar bahwa Habib merupakan figur sentral yang menentukan target operasi. Habib akan selalu berada di atas bara api; siapapun yang menjadi target operasi akan selalu menggunakan isu politisasi atau adanya 'pesan sponsor' untuk membungkam gerakan anti korupsi yang dicanangkan Habib.

Akhirnya, setiap niat baik perlu didukung kecuali telah terbukti menyeleweng dalam aplikasinya. Sejarahlah yang akan melihat apakah FPI benar-benar *concern* dengan isu korupsi di negeri ini atau hanya menjadi retorika kosong yang tidak berguna. Setidaknya, selama hampir empat tahun perjalanan laskar anti korupsi ini, belum banyak hal berarti yang mereka lakukan. Gerakan pemberantasan korupsi sedang mengalami kemunduran total di negeri ini, kata Mahfud MD pada 27 Februari yang lalu di Yogyakarta. Mari kita tunjukkan keberpihakan kita pada siapapun yang mendukung pemberantasan korupsi, termasuk pada Laskar FPI yang hingga sekarang belum juga siuman. Terus terang, ada kekhawatiran bahwa setiap gerakan anti korupsi di negeri ini akan pingsan sebelum bertindak. Semoga kekhawatiran saya salah! (Sidney, 2 Maret 2015).



Osama, Taliban, dan Fundamentalisme

Puluhan ribu rakyat Amerika Serikat berpesta merayakan kematian Osama, teroris Muslim dan musuh nomor satu yang membahayakan kepentingan Amerika di seluruh dunia. Berbagai media Amerika menggunakan kata *bastard* (bangsat) untuk menyebut sang teroris. Di tengah pesta rakyat Amerika, di Pakistan yang terjadi justru sebaliknya: peledakan bom yang boleh jadi merupakan bagian dari aksi balas dendam pendukung Ben Laden. Muncul kekhawatiran bahwa kematian ini akan memicu aksi balas dendam dalam skala luas dari para pengikut Ben Laden, dan untuk itu, Barat harus meningkatkan kewaspadaan mereka.

Terlepas dari pesta kemenangan tersebut, Barat perlu mengingat bahwa peningkatan eskalasi fundamentalisme Muslim di Afghanistan berkaitan dengan *double standard* kebijakan luar negeri Barat yang diyakini secara luas oleh kaum Muslim. *Double standard* tersebut ditentukan berdasarkan kepentingan. Ketika kepentingan Barat berubah, maka boleh jadi, kelompok atau negara yang dulu menjadi sekutu dekat Barat akan berubah menjadi musuh. Itulah yang terjadi pada Taliban dan Osama. Selama Perang Dingin, Osama dan Taliban merupakan sekutu dekat Amerika Serikat. Mereka mendapat

bantuan dana dan militer secara masif dari Amerika untuk melawan Uni Soviet. Pasca keluarnya Uni Soviet dari Afghanistan pada 1989, kondisi yang terjadi di Afghanistan adalah disseminasi senjata secara masif di masyarakat. Senjata juga dijual di pasar secara terbuka. Pada saat yang sama, produksi opium juga meningkat pesat yang justru berasal dari area yang bersekutu dengan Barat. Peredaran opium membutuhkan senjata, sebagaimana yang terjadi di Kolombia. Kombinasi dari perdagangan opium dan peredaran senjata secara bebas inilah yang kemudian melahirkan kelompok-kelompok militan. Dalam kondisi ini, agak berlebihan untuk mengatakan sumber militanisme di Afghanistan tersebut hanya berasal dari doktrin Islam mengingat keuntungan ekonomi dari perdagangan obat bius sangat besar. Boleh jadi, kesetiaan pada sumber ekonomi jauh lebih kuat dibanding pada Islam.

Pilihan Barat untuk mempersenjatai kelompok militan Taliban, dimana Osama adalah bagian dari itu didasarkan pada satu alasan: *the fanatics fight better*. Kebijakan ini berdampak langsung pada konstelasi kekuatan sosial politik di Afghanistan. Penguatan kelompok militan yang menguasai senjata sisa perang melawan Uni Soviet dan penguasaan mereka pada jalur perdagangan obat bius berjalan seiring dengan pelemahan kelompok moderat dan sekuler. Barat sebenarnya sadar bahwa pilihan untuk membesarkan Taliban berarti juga membunuh demokrasi. Itulah sebabnya, kondisi Afghansitan saat ini yang dianggap sebagai *breeding ground* fundamentalisme tercipta berkat bantuan dan kebijakan Barat sendiri.

Kondisi Afghanistan yang miskin, kriminalitas yang tinggi akibat perdagangan obat bius, korban perang yang mencapai jutaan orang, struktur sosial masyarakat yang hancur akibat perbedaan loyalitas kesukuan merupakan lahan subur bagi tumbuhnya fundamentalisme. Satu hal penting lagi, ada lebih dari dua juta orang rakyat Afghanistan

menjadi korban akibat kekeringan panjang selama tiga tahun. Saat itu, bantuan internasional tidak bisa masuk ke Afghanistan karena serangan gencar Amerika Serikat pascapledakan WTC. Di sinilah Osama mendapatkan tempat hidup yang sebenarnya. Keprihatinan dan penderitaan yang sama telah menyatukan Osama dengan, terutama, kelompok militan Afghanistan. Perasaan yang sama dan musuh yang sama telah mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang sama, yang kemudian disebut sebagai terorisme oleh Barat.

Ben Laden yang pernah menjadi sekutu Barat selama bertahun-tahun telah tewas. Pertanyaan selanjutnya adalah: apakah kematian Osama tersebut akan berjalan paralel dengan kehancuran gerakan fundamentalisme Muslim? Osama bukanlah penyebab munculnya gerakan fundamentalisme. Ia hanyalah seorang inspirator. Tanpa Osama, fundamentalisme tetap akan muncul. Akarnya ada pada *double standard* Barat. Sepanjang isu ketidakadilan Barat belum terkikis di hati kaum Muslim, maka potensi kemunculan gerakan fundamentalisme akan tetap ada. Maka, untuk ke depan, yang lebih diwaspadai sebenarnya bukanlah kematian Osama, tapi dampak serangan NATO ke Libya, sebab serangan tersebut akan menjadi mesiu baru bagi Muslim militan untuk menyerang kepentingan Barat. Serangan itu juga akan menambah panjang daftar *double standard* Barat, dan itu berarti juga memperpanjang durasi perlawanan kaum militant.





Negara Islam Indonesia dan Paradoksi Sejarah Muslim

Isu, atau boleh jadi fakta, pendirian Negara Islam Indonesia (NII) masih begitu segar di kepala kita. Kenyataan ini setidaknya menunjukkan kesepakatan *founding fathers* bangsa ini yang tertuang dalam Pembukaan UUD 45 dan Pancasila belum diterima sepenuhnya oleh sekelompok masyarakat Muslim. Betapapun kecilnya jumlah para aktivis pendirian NII tersebut, fenomena ini tetap perlu dipahami lebih lanjut karena berkaitan langsung dengan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada sisi lain, kenyataan internal umat Islam juga berbeda-beda dalam memahami urgensi pendirian negara Islam. Secara umum, ada dua kategori sikap umat Islam berkaitan dengan masalah ini: menolak dan menerima. Kelompok yang menolak beralasan bahwa tidak ada format baku mengenai bentuk negara Islam dalam sejarah peradaban umat Islam. Menyikapi hal ini, mereka berpendapat bahwa cukup semangat dan ide dasar ajaran Islam saja yang diadopsi dalam konstitusi negara tanpa perlu menyebutkan secara formal bahwa negara berbentuk negara Islam. Dalam pandangan kelompok ini, negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan konstitusi UUD 45 yang secara jelas menjunjung tinggi semangat dan nilai-nilai keislaman dianggap sudah

cukup. Oleh sebab itu, pernyataan “negara berdasarkan Islam” tidak perlu lagi disebutkan secara eksplisit. Lebih lanjut, menurut kelompok ini, bentuk formal suatu negara, kerajaan ataupun republik, tidak perlu dipermasalahkan sepanjang nilai dan semangat keislaman diadopsi secara jelas dan konsekuen. Secara sederhana, kelompok ini bisa disebut sebagai penganut aliran substantivis; yang penting adalah substansi, bukan bentuk.

Kelompok kedua adalah mereka yang mensyaratkan adanya sebutan eksplisit bahwa negara berdasarkan Islam dengan konstitusi Alquran. Contoh yang paling jelas dari pandangan kelompok ini adalah kerajaan Saudi Arabia, walaupun secara substantif Alquran tidak pernah melegitimasi sistem kerajaan dengan pola kepemimpinan yang bersifat warisan. Contoh lain adalah Republik Islam Iran yang juga secara jelas mencantumkan Islam sebagai dasar negara. Bentuk kerajaan dan republik sangat berbeda, terutama dalam cara menentukan pemimpin tertinggi, namun karena kedua negara di atas secara eksplisit mengakui Islam sebagai dasar negara, maka perbedaan bentuk negara tersebut tertutupi oleh adanya klaim “keislaman” negara masing-masing. Lebih lanjut, sistem manakah sebenarnya yang lebih Islami, republik atau kerajaan? Tampaknya pertanyaan ini lebih baik dilupakan daripada dipikirkan mengingat adanya polemik yang tidak berujung mengenai bentuk negara Islam.

Kelompok-kelompok yang ingin mendirikan negara Islam dengan merujuk pada sejarah Khulafaurrasyidin, kejayaan Umayyah, dan Abbasiyah perlu mempertimbangkan lebih lanjut beberapa paradoks yang akan muncul jika fase-fase kejayaan masa lalu tersebut dijadikan sebagai tolok ukur. Paradoks tersebut berkaitan dengan: (1) Cara penentuan pemimpin tertinggi. Di era Khulafaurrasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dipilih melalui cara yang berbeda-beda; sementara di era *khilafah*

Umayyah dan Abbasiyah ditentukan melalui garis genealogis. Cara yang sebenarnya lebih dekat dengan tradisi Romawi dan Persia daripada Khulafaurrasyidin. (2) Karakteristik kepemimpinan. Di era Khulafaurrasyidin dan Umayyah, terdapat unifikasi wewenang politik dan moral keagamaan di tangan khalifah sebagai pemimpin tertinggi, sementara pertengahan era khilafah Abbasiyah ditandai dengan dibentuknya jabatan *qadli al qudlat* (grand mufti) yang berwenang memutuskan perkara keagamaan. Tradisi ini kemudian dilanjutkan oleh Dinasti Ottoman. Dalam hal ini, telah terjadi pemisahan antara wewenang politik dan moral (keagamaan). Ketiadaan referensi historis yang bersifat tunggal tentang praktik bernegara menjadikan polemik tentang ada tidaknya sistem negara dalam Islam seperti tak berujung. Akhirnya, klaim-klaim mengenai 'keislaman' suatu negara yang dianggap berlandaskan Islam selalu dipertanyakan oleh kalangan Muslim sendiri. Beberapa paradoks yang ditemukan dalam era kejayaan (*golden age*) masa lalu telah menjadikan *golden age* tersebut sebagai referensi politik daripada normatif, sehingga selalu terbuka untuk diperdebatkan. Dalam konteks ini, perlu dilihat lebih lanjut, kemana merujuknya paradigma negara yang dibangun oleh para penggagas NII.





Islamofobia

London 2008, aku berjalan sendiri menyusuri trotoar di pinggiran kota. Tiba-tiba, sekelompok anak muda dengan mobil terbuka lewat dan berhenti tepat di depanku. Tak kusangka, mulut mereka berpacu mengeluarkan berbagai sumpah serapah padaku, seorang muslim dari negara berkembang. Sangat mudah mengenali fokus kebencian mereka pada Islam dan Muslim, sebab kata-kata itu terdengar jelas. Dalam nada yang sama, coretan “Go to hell, Paki” di berbagai dinding toko dan tembok bertebaran di mana-mana. Ini adalah salah satu perilaku primitif yang masih bisa ditemukan di negara modern, Inggris. Dalam kacamata evolusi, Inggris Victoria dianggap oleh para antropolog klasik sebagai puncak evolusi peradaban manusia. Perilaku ini muncul di saat mereka sedang berada di fase puncak peradaban!

Di tahun yang sama, namun di sudut lain dari kota London, aku kembali mengalami perlakuan itu: caci maki dan sumpah serapah pedas, karena aku diduga seorang Muslim. Ketika itu, aku berjalan dengan teman Muslim keturunan India yang berjanggut lebat namun rapi. Pelakunya sama dengan kejadian pertama: sekelompok anak muda. Siapa yang menularkan kebencian dan Islamofobia ini pada anak muda? Apakah ini hasil temuan mereka sendiri, atau diproduksi

dan direproduksi secara sistematis oleh kelompok tertentu? Entahlah. Yang jelas, *white supremacy* tak pernah jadi tertuduh, karena warna kulit mereka yang putih punya kemampuan untuk ‘memutihkan’ perilaku hitam yang mereka lakukan.

Di kota yang sama, suatu ketika Archbishop of Canterbury, Rowan Williams, mengusulkan agar kaum Muslim di Inggris diizinkan untuk menggunakan hukum keluarga dalam internal keluarga mereka. Hak istimewa ini telah lama dinikmati oleh komunitas Yahudi yang menggunakan hukum Yahudi dalam keluarga mereka. Bagaimana respons masyarakat Inggris? Tak perlu pikir panjang, sebab jawabannya sudah sangat jelas: menolak dan bahkan mengecam usul Archbishop itu. Tak usah bicara demokrasi di sini jika isunya berkaitan dengan hak kaum Muslim.

Dalam mata kuliah *Sira in Classical and Contemporary Scholarship*, penjelasan profesor pada hari pertama pertemuan berkaitan dengan konsep *writer*. Menurutnya, *writer* adalah seseorang yang membuat sesuatu eksis, muncul. Aku belum *ngeh* apa maksudnya hingga menjelang akhir perkuliahan, ia bertanya: *Was the Prophet a writer?* Jika Nabi seorang pengarang, berarti Alquran adalah hasil karangannya. Beginilah cara mereka mengonstruksi pengetahuan tentang Islam secara ‘akademik’. Pertanyaannya adalah: Untuk apa mengonstruksi pengetahuan jika tidak akan menambah *mutual understanding*? Ada paradoks dalam komitmen ilmu humaniora Barat, bahwa tujuan tertinggi disiplin pengetahuan itu adalah untuk *better understanding among people*, namun mengabaikan *feeling* dan emosi keagamaan komunitas yang mereka pelajari.

Menurut Hisham Sharabi, intelektual Palestina yang mengajar di George Town University, Barat tidak kekurangan data mempelajari budaya Muslim. Akar bias dan kebencian itu justru bersumber dari perspektif dan teori yang pada dasarnya tidak ilmiah dan

tidak objektif, sebab merefleksikan suatu tendensi, keyakinan dan kepentingan (tersembunyi dan bawah sadar). Hal ini bisa diungkap dengan mendekonstruksi bahasa yang digunakan para peneliti dalam karya ilmiah mereka, cara mereka mengekspos objek-objek yang menjadi kajian, dan objek-objek yang mereka hindari dalam penelitian itu. Dalam kasus Islam, banyak tulisan para sarjana Barat hanya terfokus pada hal yang ditolak oleh kaum Muslim, bukan pada isu utama yang menjadi *core* kehidupan kaum Muslim.

Secara historis, akar *misunderstanding* ini bisa dilacak pada tiga *milestones*: *crusade*, kolonialisme, dan orientalisme. Jika Anda penggemar roti *croissant*, ingatlah bahwa pada awalnya, bentuk roti yang mirip bulan sabit (simbol Islam) itu dibuat pada era Perang Salib sebagai simbol kebencian pada Islam dan kaum Muslim. Akbar Ahmed menjelaskan, dulu, kaum Kristen Eropa membayangkan sedang ‘menyantap’ kaum Muslim saat mereka mengonsumsi *croissant* ini.

Di era kolonialisme yang kemudian melahirkan Orientalisme, Timur, khususnya Islam dan Muslim dikonstruksi dalam fakta yang jauh dari realitas sebenarnya. Orientalisme bukan hanya *intellectual exercise*, tapi juga *power exercise* dalam kondisi yang tidak seimbang: antara Barat yang *civilized, colonizer, developed* vs Timur (Islam) yang diklaim *uncivilized, colonized* dan *underdeveloped*. Pengetahuan pada era inilah yang banyak mengisi benak orang Eropa hingga saat ini. Coon, dalam *Caravans: The Story of the Middle-East* menggambarkan masyarakat Arab dipenuhi oleh anggota yang mengalami krisis, penderitaan, dan perpecahan; mereka ibarat kafilah yang berjalan sangat lamban di tengah gurun untuk mencapai destinasi, yaitu peradaban Barat. Tuduhan Macron bahwa Islam adalah agama yang sedang krisis bukanlah hal baru. Preseden historisnya bisa dilacak dalam berbagai karya orientalis. Dalam tulisan tersebut, masyarakat Arab diibaratkan seperti mosaik yang kurang harmonis dan dikuasai

oleh berbagai kontradiksi yang berasal dari struktur tribalisme, skiisme, dan paganism, yang berbeda dengan masyarakat Barat modern yang bersatu dan telah berhasil melampaui perbedaan-perbedaan sosial sebelumnya. Karya Coon ini, kata Sharabi, menyembunyikan ideologi imperialisme yang jelas, namun dibungkus dalam konsep teknis yang ‘ilmiah’.

Orientalis lainnya, Raphael Patai dalam *The Arab Mind* mengatakan bahwa, “akal Arab” membentuk struktur pasif, bukan aktif, dan bahasa Arab sebagai refleksi “rasionalitas” mereka berdiri di atas dasar emosi, *exaggeration* dan pengulangan. Inilah bentuk pengetahuan warisan orientalis pada bangsanya. Mereka tidak hanya mewariskan ‘pengetahuan’ tentang *others*, tapi juga pelecehan dan fakta distortif yang dibungkus dalam konsep ilmiah. Pada akhirnya, Islamofobia di Barat adalah barang lama, namun dibungkus dengan *packaging* baru, sesuai dengan perkembangan mutakhir. Kebalikannya, di negeri ini, Islamofobia adalah barang baru, namun dibungkus dengan *packaging* primitif. Wallahu a’lam (Padang, 27 Oktober 2020).



Islam dan Kebangsaan





Islam sebagai *Core* Elemen Bangsa

Secara historis, di negeri yang bernama Nusantara ini, Islam pada awalnya adalah sebuah entitas kultural-geografis, yang terbentuk secara gradual dan damai. Seiring perkembangan, ia berubah menjadi entitas politik dalam bentuk kerajaan-kerajaan yang berdiri sporadis di hampir seluruh pelosok negeri. Ada yang besar dan ada pula yang hanya selebar 'daun kelor'. Ketika Indonesia merdeka, Islam sebagai identitas politik masih eksis di Sebagian wilayah. Namun, dengan kesadaran sendiri kembali bertransformasi menjadi identitas kultural geografis dan harus kehilangan *political power* secara struktural sebab melebur dalam konsep negara bangsa modern yang baru terbentuk. Dalam wadah yang baru ini, Islam hanyalah salah satu elemen di antara berbagai elemen yang lain, tanpa ada privilese politik sama sekali, terlepas dari kuantitas demografis dan persebarannya. Secara politik, Islam hanyalah *juz'un* (bagian) yang membentuk *kullun* (keseluruhan) bersama elemen-elemen lain. Walaupun demikian, berbeda dengan fakta politik, ia tetap memiliki peran normatif-kultural di kalangan Muslim. Idealitas politik terkadang berbeda dengan realitas kultural.

Bagaimana perkembangannya setelah sekian tahun merdeka? Setidaknya ada dua arah perkembangan. Pada sebagian kaum Muslim,

Islam yang telah menjadi *juz'un* itu tetap berstatus *kullun*, sehingga pada saat tertentu terkadang menimbulkan ambiguitas. Sebaliknya, dalam kehidupan sebagian Muslim lainnya, proses menjadi *juz'un* itu justru terus berlangsung: tak hanya dalam konteks elemen pembentuk negara, namun juga dalam kehidupan personal. Maka, ia tak boleh muncul di ruang publik dan pada saat yang sama tidak absah untuk dijadikan referensi politik personal, dengan satu tuduhan peyoratif: politik identitas. Arah perkembangan kedua tampaknya lebih disukai secara struktural, karena diklaim lebih universal walau nirlegitimasi historis-kultural.

Untuk akselerasi menjadi *juz'un* sejati itu, dilakukan juga proses delegitimasi dan desentralisasi peran Islam melalui produksi dan reproduksi ideologi Islamofobia, yang direfleksikan dalam berbagai 'proyek', salah satunya wacana radikalisme dan fundamentalisme. Pada akhirnya, kaum Muslim sendiri terjebak pada ketidakpercayaan terhadap agamanya, dan lebih meyakini pengetahuan dominan yang diproduksi dan direproduksi oleh kekuatan struktural. Wujud ketidakpercayaan itu tampak jelas ketika identitas sebagai Muslim tidak lagi memadai, tapi harus ditambah dengan kata sifat seperti pluralis, demokrat, toleran, progresif, inklusif, dst. Wacana radikalisme, dalam tataran tertentu telah mengalami 'institusionalisasi' ke dalam *mindset* Muslim. Sebagian menerimanya dengan senang hati, sebab baginya, memang begitulah seharusnya. Hidup cukup dengan etika dan humanisme, tak perlu agama!

Aku berada di seberang pihak kedua. Mengapa? Secara historis-antropologis, jejak dan pengaruh Islam di negeri ini sudah sangat mengakar. Identitas sebagai Muslim sudah lebih dulu muncul daripada sebagai warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, identitasku sebagai seorang Muslim tidak berbeda dengan identitas kakek-nenekku yang juga seorang Muslim. Namun, sebagai warga negara, identitas

kami berbeda, sebab kakek-nenekku hidup ketika negara modern ini belum terbentuk. Dalam tataran ini, mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa justru akan mengokohkan identitas kontemporer, karena dibangun sebagai kontinuitas tradisi masa lalu. Sebaliknya, mendelegitimasi nilai-nilai Islam justru akan mencerabut memori kolektif masa lalu yang menjadi elemen pembentuk masa kini.

Berkaca ke negeri seberang, unjuk rasa di Malaysia pada 8 Desember lalu setidaknya menunjukkan keberpihakan negara-bangsa modern bisa jadi bertentangan dengan memori kolektif orang Melayu. Jika tidak disikapi dengan bijak, boleh jadi, *form* (negara-bangsa) tidak lagi *compatible* untuk mewadahi isi (bangsa). Pada akhirnya, identitas negara mungkin akan berbeda dengan identitas bangsa. Ketika ambiguitas itu terjadi, maka boleh jadi benih-benih keretakan akan mulai tumbuh, apalagi perbedaan itu disertai niat dan sikap untuk saling menegasikan. Sebagai Muslim yang sangat mencintai negerinya, aku tentu saja berharap kita tidak akan terjerembab ke dalam limbo sejarah! (Sydney, 12 Desember 2018)





Nasionalisme dan Patriotisme

Patriotisme adalah kecintaan pada tanah tempat seseorang lahir, tumbuh, dan berkembang. Dalam konteks ini, patriotisme memiliki objek yang konkret, terlihat, dan nyata; sementara nasionalisme adalah kecintaan pada bangsa yang bersifat abstrak. Kesadaran sebagai bangsa berjalan secara alami sekaligus hasil rekayasa sosial. Dalam proses pertama, nasionalisme yang natural bisa berjalan jika suatu bangsa memiliki *core* elemen pemersatu yang dominan, sehingga bisa menjadi unsur pengikat, pemersatu, dan sekaligus identitas bersama. Dalam konteks Indonesia, Mehdien secara jelas menunjukkan Islam adalah *core* elemen pemersatu Nusantara. Dengan nada yang sama, Buya Hamka juga menunjukkan fakta bahwa Islam lebih berperan dalam menyatukan Indonesia dibandingkan Pancasila.

Dengan mengatakan Islam sebagai *core* elemen nasionalisme, apakah saya rasis? Terserah Anda menilai, sebab saya hanya bicara dalam tataran historis-sosiologis, sesuai dengan fakta-fakta historis yang saya pahami. Hanya saja, satu hal yang harus dihindari adalah ketika bicara *core* elemen, bukan berarti elemen lain tidak berguna sama sekali. Semua elemen menjalankan peran masing-masing. Oleh sebab itu, dalam bingkai tenun sebagai masyarakat Nusantara,

saling menghargai setiap elemen sebagai pembentuk bangsa harus tetap dijunjung tinggi. Namun, pada saat yang sama, menolak fakta sosio-historis bahwa ada faktor dominan yang memainkan peran paling penting dalam proses itu juga merupakan suatu kerancuan dan ahistoris. Dalam hal ini, *feeling* sebagai bangsa juga harus dilandasi oleh kesadaran historis, agar proses pemaknaannya kontekstual, tidak tumbuh dari ruang kosong yang berisi imajinasi personal yang liar, bukan memori kolektif sebagai anak bangsa. Dengan kesadaran itu, hanya seseorang yang mengalami amnesia yang akan mempertentangkan Islam dan nasionalisme. Agama, dalam hal ini telah menjadi elemen penting sebagai pembentuk bangsa ini; ia menjadi salah satu identitas kaum pribumi. Kristen, Buddha, Hindu dan kepercayaan lokal termasuk di dalamnya dengan peran yang berbeda-beda sesuai dengan lokalitas tempat ia tumbuh dan berkembang.

Seorang pribumi di negeri ini adalah patriot sekaligus nasionalis, apapun suku dan agamanya. Sebagai deskripsi singkat, kuceritakan dua fakta berikut. Ayahku menjadi guru selama 42 tahun di Riau, lima kali berpindah lokasi mengabdikan. Sebagai daerah yang dikenal majemuk, para muridnya tentu saja sangat plural, salah seorang di antaranya bernama Yang Kui. Saat ini ia menjadi pengusaha kopra di kota kecamatan tempat ia tinggal. Sehari-hari, ia bergaul akrab dengan seluruh elemen masyarakat. Sebagai penganut Buddha, ia justru menjadi donatur utama masjid kecamatan; ia juga donatur pembangunan madrasah, dan selalu hadir dalam kegiatan sosial di masyarakat. Melebur dan aktif dalam masyarakat bisa dijadikan sebagai salah satu indikator bahwa ia telah menjadi elemen tempat ia tinggal, tanah tempat ia lahir dan besar. Dengan kata lain, ia adalah seorang patriot bagi daerahnya. Bagiku, ia seorang pribumi!

Pada sisi lain, dadaku sesak oleh para pengusaha yang mengemplang utang BLBI, memanipulasi pajak, terlibat dalam banyak

kasus, kemudian melarikan diri keluar negeri; setan pun tidak tahu tempat mereka bersembunyi. Indonesia, baginya tak lebih dari tempat mengeruk harta, walaupun ia lahir dan besar di negeri ini. Ia bukanlah 'pribumi', sebab hati dan pikirannya tak pernah melebur untuk negeri ini. Suatu ketika, tahun 2002, aku dan sahabatku mengikuti tur mengunjungi peninggalan Firaun di Luxor, dikoordinir oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Mesir (di Indonesia, sama dengan Kemenristekdikti). Para peserta dari Asia Tenggara hanya berasal dari Indonesia dan Malaysia, selebihnya dari Jepang, Korea, China, dan Eropa. Dalam suatu kesempatan, seorang peserta tur, diplomat China yang sedang kuliah Ekonomi Politik di Cairo University bertanya tentang kerusuhan Mei 1998. Sebagai jawaban, temanku justru menjelaskan perilaku para konglomerat yang mengemplang utang, melarikan diri ke luar negeri dan terlibat dalam berbagai praktik suap terhadap penyelenggara negara. Sambil mengangguk, ia kemudian menimpali: "Ia memang kekurangan kami, tidak tunduk pada hukum negara lain, dan tidak punya kesetiaan kecuali pada negeri leluhur". Dalam hal ini, kritik almarhum Kuntowijoyo bahwa para konglomerat Tionghoa tidak memiliki nasionalisme pada bangsa ini ada benarnya. Pasca kerusuhan Medan tahun 1998, aku membaca pengakuan seorang korban kerusuhan yang pindah ke Australia. Menurutnya, selama ini ia memang selalu memandang rendah pada pribumi. Menyesakkan memang, tapi juga tidak benar jika pengakuan itu digeneralisasi. Tetap ada 'pribumi' seperti Yang Kui, dan tetap ada 'non pribumi' seperti para konglomerat dan korban kerusuhan yang pindah ke Oz tersebut.

Pada akhirnya, aku ingin mengatakan, secara literal, pribumi bersifat askriptif. Namun, pluralitas sebagai bangsa menuntut kita untuk lebih inklusif. Oleh sebab itu, status pribumi juga '*achieved*', dilandasi oleh patriotisme dan nasionalisme yang tulus untuk negeri

ini. Entahlah, tapi yang pasti, aku adalah seorang pribumi! Tuduhan rasis dan picik tidak akan pernah mengubah pengakuanku ini (Sydney, 18 Oktober 2017)





Hoaks

Walaupun bukan penggemar dangdut--genre musik favoritku adalah keroncong--, aku melihat ada perbedaan mendasar antara dangdut pra-Inul dan pasca-Inul. Kemunculan Inul adalah *turning point* dalam dangdut: pergeseran dari titik tumpu kualitas suara ke tubuh. Erotisme tubuh lebih memiliki magnet daripada kemerduan suara. Maka muncullah berbagai jenis goyang: *ngebor*, goyang itik, goyang gergaji, dsb.

Mengapa Inul jadi *turning point*? Menurutku, ia adalah penyanyi yang pertama tampil berani dengan goyang seronok di depan publik dalam skala nasional dan disiarkan oleh media. Apakah sebelumnya tidak ada yang tampil seronok seperti Inul? Tentu saja ada, namun Inul *effect* jauh lebih besar. 'Kesuksesan' Inul kemudian diikuti dengan kemunculan penyanyi dangdut lainnya, seperti DP, Trio Macan, dan Duo Srigala, yang menggabungkan antara lirik lagu dengan erotisme tubuh. Sejak itu, publik mulai terbiasa dengan dangdut 'aliran' Inul. Apakah ada yang salah? Aku tidak bicara itu, karena *frame* moral kita berbeda-beda. Yang menjadi *stressing point* adalah, publik kita cenderung meniru. Maka, suatu aliran, kebiasaan ataupun tren akan muncul dan berkembang jika ada yang memulainya, terlepas itu baik ataupun buruk.

Bagaimana dengan *hoaks*? Aku melihatnya dalam kacamata ‘dangdut aliran Inul’, dalam pengertian ada *starting point*-nya. Tidak akan ada asap jika tak ada api. Penyakit endemik juga tidak muncul secara tiba-tiba. Fenomena *hoaks* saat ini, menurutku, adalah efek dari pilpres 2014, ketika salah satu pasangan calon sangat menguasai media sosial dan media *mainstream*, memiliki *cyber army* yang ‘*well-funded*’ dan terorganisir dengan sangat baik, diberdayakan dengan sangat efektif untuk menghancurkan lawan politiknya. Berita diputarbalikkan, cacian dan hujatan keluar begitu deras dari akun-akun palsu yang bertujuan untuk menghancurkan kredibilitas lawan politik. Publik mulai terbiasa dengan fenomena *hoaks*, dan kemudian menganggapnya ‘sah’ untuk dilakukan, karena memang tidak ada larangan dalam hukum positif saat itu. Namun, yang berpegang pada moral agama, larangannya tidak perlu diperdebatkan lagi.

Hoaks dicampur *bullying*, dua ramuan beracun yang membuat perut dan otak kita mulas, apalagi dalam dosis tinggi seperti sekarang. Kita menyaksikan, dalam konteks *hoaks* saat ini, kategori teologis yang eksklusif ditranslasikan menjadi hujatan yang pedas; kutipan damai nan bijak, namun tidak kontekstual, disebar untuk menihilkan gerakan lawan. Keduanya sama: tidak berguna. Klaim sepihak sebagai satu-satunya penjaga NKRI juga bagian dari *hoaks*! Genderang sudah ditabuh, *hoaks* sudah disebar, dan hasil sudah diraih. *Hoaks* ternyata membawa sukses! Maka efek berikutnya adalah muncul publik yang akan menempuh cara yang sama, sebab itu dianggap sah dan efektif. Itulah yang kita panen saat ini. *Hoaks* sebagai ‘aksi’ dan reaksi’ sudah sulit dibedakan. Yang jelas, *hoaks* itu buruk, cepat menyebar, dan disebar oleh mereka yang berperilaku buruk. ‘*Suu al khulqi yu’di*’ (akhlaq buruk itu menular), kata pepatah Arab kuno. Mungkin itu salah satu hikmah dari formulasi kaidah ushul fiqh: membuang yang merusak harus lebih dahulu dilakukan sebelum mengambil yang baik, *dar’u al mafasid muqaddam ‘ala jalb al mashalih*.

Hoaks adalah refleksi masyarakat yang malas berpikir plus minus etika. Masyarakat yang akalinya lebih panjang dari moralnya. Sayangnya, fenomena itu justru merasuk jauh dalam proses-proses politik; suatu proses yang sangat penting karena menentukan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Apa yang harus kita lakukan? Apapun tujuannya, aku melawan segala bentuk *hoaks*. Moral agama harus direvitalisasi. Alquran dan hadith adalah ‘model for’— meminjam istilah Geertz. Oleh sebab itu, harus menjadi rujukan bagi realitas. Kita harus kembali ke fitrah sebagai manusia yang pada dasarnya bersifat baik dan harus menyebar kebaikan.

Spirit Alquran mengajarkanku untuk mencintai dengan tulus seluruh elemen bangsa ini. Kecintaan yang tulus pada bangsa, menurutku, seharusnya membuat kita berpikir sangat dalam sebelum melakukan atau menyebarkan sesuatu. *Wallahu A'lam* (Sydney, 27 Januari 2017).





Multiple Layers of Nationalism

Minggu siang, aku sekeluarga menghadiri undangan makan siang di rumah pembimbing. Di sana, aku bertemu dengan teman-teman yang satu nasib: sedang stress menyelesaikan *thesis*. Sambil berbincang santai, salah seorang di antaranya bertanya tentang kasus Ahok. Aku memang sudah beberapa kali mendapat pertanyaan tentang kasus Ahok, baik dari dosen pembimbing ataupun teman-teman bule Ausie yang sedang studi sosiologi agama. (hingga saat ini, aku juga sudah mendapatkan puluhan email tentang kasus ini dari Mrs. S, seorang editor bahasa yang selalu mengoreksi *Englishku*). Kasus ini menjadi terkenal di Ausie, bahkan Barat, karena satu hal: penuntut Ahok—bagi Barat—adalah kelompok Islam radikal, garis keras, konservatif, atau fundamentalis. Di mata beberapa sarjana Barat, penyelesaian kasus ini akan menjadi indikator moderatisme Islam di Indonesia. Jika Ahok bebas, berarti moderatisme Islam masih memiliki basis yang kokoh, dan sebaliknya.

Dalam bincang santai tersebut, salah satu kolega yang pernah berprofesi sebagai pendeta bertanya secara lebih spesifik: bagaimana kamu mendefinisikan identitas dirimu? Apakah kamu mendahulukan identitas dirimu sebagai seorang Muslim daripada seorang Indonesia? Saya menjawab: *'I am an Indonesian Muslim, not a Muslim in Indonesia'*.

Saya kemudian balik bertanya: 'Mengapa anda mengkonfrontasikan identitas sebagai seorang Muslim dengan seorang Indonesia?' Dia hanya tersenyum.

Bagaimanapun, pertanyaan tersebut layak direnungkan: apakah kita perlu meninjau ulang identitas diri sebagai seorang Muslim, Kristiani, Buddha, Hindu, atau apapun agama kita, bahkan ateis dengan keindonesiaan? Menurutku, pertanyaan tersebut akan terjawab jika kita punya jawaban terhadap apa yang menjadi '*authentic core of our nationalism*'.

Jawaban pertanyaan di atas bersifat kompleks, karena fakta heterogenitas merupakan elemen yang membentuk kita sebagai bangsa. Nasionalisme bukan sebatas jargon yang bisa diklaim secara sepihak menjadi identitas kelompok atau golongan yang pada saat yang sama, menafikan nasionalisme kelompok lain. Definisinya seharusnya inklusif, bukan eksklusif, sehingga mampu mengakomodasi berbagai ragam elemen. Mengklaim diri ataupun kelompok sebagai paling nasionalis dan paling menghargai Bhinneka Tunggal Ika lebih merupakan refleksi arogansi dalam berbangsa daripada sikap saling memahami.

Menurutku, ada *multiplicity of nationalism*. Secara struktural, cerita ataupun sejarah nasionalisme kita adalah rentetan dari 'pembentukan' dan 'pembentukan kembali' program dan proyek kultural yang dilakukan oleh aktor-aktor sosial-politik yang digerakkan negara untuk menanamkan nasionalisme kepada warga. Secara kultural, ia adalah ingatan kolektif yang telah menghunjam dalam pada jiwa seluruh elemen bangsa. Ingatan inilah yang menggerakkan simpati dan empati antar seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke. Menjadi Indonesia berarti mengunduh ingatan kolektif tersebut ke dalam pikiran masing-masing, sehingga menjadi elemen yang *inherent*.

Dalam tataran yang paling sederhana, nasionalisme bagiku bukanlah kumpulan nilai yang didefinisikan secara ideal, tapi lebih merupakan 'sikap' yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, tuntutan dan pembangkangan seharusnya tidak dilatari oleh kebencian, tapi lebih kepada konteks '*memory recovery*' yang terganggu oleh faktor struktural yang menjalankan projek dan program kultural yang kurang bahkan tidak mempertimbangkan '*authentic core*' kebangsaan kita.

Lantas, apa jawapan *authentic core* di atas? Jika di Barat ada pertentangan jelas antara rasionalitas substantif (agama) dan rasionalitas formal (sains dan teknologi), apakah di Indonesia akan, atau telah terjadi hal yang sama? Aku berharap itu tidak terjadi, sebab menurutku, agama merupakan salah satu *core* elemen tersebut. Oleh sebab itu, projek struktural yang mengabaikan pandangan keagamaan akan menularkan virus kegelisahan pada ingatan kolektif *grass root*, dan berakibat pada munculnya pembangkangan sipil.

Sebagai salah satu *core* elemen, permasalahan agama menjadi sangat sensitif. Jadi, siapapun yang mengusik tatanan beragama pada hakikatnya ia sedang menyulut api terhadap rasa kebangsaan, tak peduli apakah ia seorang pejabat negara, ataupun *religious clerics*. Begitu juga, kebijakan-kebijakan negara yang mengabaikan perasaan keberagaman tersebut, pada hakikatnya aktor negara sedang mengabaikan *core element* kebangsaan kita. Harus diingat bahwa, 'rasa' sebagai penganut agama lebih dulu muncul dari 'rasa' sebagai seorang Indonesia. Oleh sebab itu, *feeling primordial* tersebut harus tetap dipelihara dan dihargai sebagai salah satu elemen pembentuk kita sebagai bangsa. Dalam hal ini, aku mengharapkan perilaku pejabat yang baik, 'lahir dan batin', dan pada saat yang sama, juga retorika ulama yang menyejukkan, 'lahir dan batin'. *Wallahu A'lam* (Sydney, 23 Januari 2017).



Man of the Years: HRS dan Ahok

*A*da dua 'Man of the Year' pada 2016, dan boleh jadi akan menjadi 'Man of the Multi-Year', yaitu Ahok dan Habib. Kiprah keduanya membawa implikasi yang dalam pada relasi internal umat Islam. Di tengah tensi yang meninggi antara kelompok yang dianggap radikal versus mereka yang mengklaim bijak, progresif, dan moderat, kita seolah tidak mendapatkan titik temu. Memang, yang paling susah itu berlaku adil, dalam pengertian melihat sisi positif dan negatif kedua belah pihak secara imparial dan penuh ketulusan, untuk kemudian masing-masing pihak mengambil pelajaran, baik dari sisi positif ataupun negatifnya.

Dalam tataran ini, Ahok tidak sepenuhnya buruk, sebagaimana yang dianggap oleh para penentangannya; tapi ia juga bukan *ma'shum* sebagaimana yang dipandang oleh para pendukungnya. Kukira itu adalah kodrat yang dimiliki oleh setiap manusia. Begitu juga Habib, ia tidak sepenuhnya buruk, sebagaimana yang dituduhkan oleh para Ahokers dan Jemaah Islam liberal/ moderat/ progresif (kalau masih ada istilah lain, silahkan ditambahkan sendiri). Ia juga memiliki banyak kebaikan yang telah ia lakukan sepanjang hidupnya, termasuk kiprahnya bersama FPI.

Aku teringat pada pengalaman satu dekade yang lalu. Saat itu, aku sedang berbincang dengan Habib di Masjid al Ikhlas Petamburan menentukan jadwal wawancara. Tiba-tiba, datang seorang pemuda, langsung duduk di samping saya, wajahnya tampak kusut. Ia langsung bicara ke Habib dengan logat Betawi yang kental: 'Bib, Ane mau curhat', katanya memulai percakapan. 'Ente ada masalah apa?' perhatian Habib langsung tertuju kepada pemuda itu. Aku jadi terabaikan, hiks... Pemuda itu lantas bercerita bahwa ia baru saja dipecat dari pekerjaannya dan ingin balas dendam kepada mantan bosnya. Dengan lugas, tapi penuh perhatian dan empati, Habib lantas menasehati pemuda itu bahwa dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Kita harus tawakkal dan percaya bahwa rezeki ada yang mengatur. Tetaplah dalam kebaikan dan jangan pernah melakukan balas dendam. Ada banyak nasihat Habib kepada pemuda itu. Ketika pamit, sang pemuda dengan tersenyum berkata: 'Bib, Ane akan selalu ingat nasehat Antum'. Ada relasi yang begitu cair, egaliter tanpa ada *ewuh pakewuh*.

Kelompok seperti inilah yang dibina oleh Habib selama bertahun-tahun. Jika Anda tidak setuju dengan saya yang menggunakan istilah 'bina', Anda bisa menggunakan istilah 'eksploitasi', tidak ada larangan di situ! Mereka adalah kelompok marjinal kota yang tidak merasakan manisnya kue pembangunan, namun bisa menyaksikan setiap hari kue itu dikerubungi oleh sekawanan kecil 'semut-semut' yang dalam banyak hal memiliki afiliasi moral, norma, dan keberpihakan yang berbeda dengan mereka.

Solidaritas seringkali tidak berlangsung lintas kelas, karena kepentingan kelas memang berbeda-beda. Kelas menengah kota yang sudah merasakan kenikmatan yang ditawarkan kapitalisme yang minus moral seringkali memiliki keberpihakan berbeda dengan kelas masyarakat yang setiap hari berjuang untuk mendapatkan sesuap

nasi. Kelompok pertama akan selalu bicara ‘bagaimana menikmati hidup’, sementara kelompok kedua masih dalam tataran ‘bagaimana bisa hidup’. Oleh sebab itu, isu-isu yang menjadi *concern* kedua belah pihak seringkali berbeda, bahkan bertentangan. Moral agama idealnya bisa menjadi *melting point* yang membentuk *common concern* yang bersifat lintas kelas, namun yang terjadi malah sebaliknya. Kukira, itu bukan kegagalan agama, tapi kegagalan penganutnya dalam memahami agama.

Ada kelompok yang memilah-milah ajaran agama, dan sebaliknya, ada juga yang beragama secara sangat *rigid*. Ajaran agama, apapun agamanya, hanya bisa dipahami dengan baik oleh orang yang tulus, bukan bagi yang berlindung di balik kepentingan. Ketulusan seseorang bisa dilihat dari *track record* kehidupannya: bagaimana *life style*-nya, kepada apa dan siapa ia berpihak, dan bagaimana ia memperlakukan agama dan para pewarisnya dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang begitu cepat mengecam tindakan FPI dan pada saat yang sama bungkam pada kekerasan dan intoleransi elemen yang lain sebenarnya tidak punya hak moral untuk bersuara, sebab perilakunya yang tidak imparial. Sebaliknya, yang hanya mengecam kelompok lain dan buta terhadap kemungkinan kekerasan yang dilakukan FPI, juga berada dalam posisi yang tidak netral. Maka, yang dibutuhkan adalah kejernihan berpikir dan ketulusan hati. Menjadikan orang-orang yang dihormati sebagai lelucon dan *meme* ejekan menunjukkan keberpihakan seseorang yang terjebak secara eksemis. Dalam hal ini, ia gagal memahami kedamaian agama. Salah satu karakter agama adalah ‘*washatiyyah*’, bukan ‘*inhiyaz*’ ekstrem. *Wallahu A’lam* (Sydney, 17 Jan 2016).





‘Ulama sebagai ‘Legislator dan ‘Interpreter

Ada kategori menarik yang dikemukakan Bauman (1992) mengenai peran intelektual dalam masyarakat. Pada masa ‘*classical modernity*’, peran mereka ibarat legislator; hal yang mereka kemukakan dianggap otoritatif sehingga selalu didengarkan. Keterbatasan dan disparitas akses terhadap pengetahuan merupakan salah satu sebab para intelektual mendapatkan ‘peran’ ini di masyarakat. Seiring perkembangan, pada masa ‘*late modernity*’ yang ditandai dengan semakin meratanya akses terhadap pengetahuan dan semakin terdiferensiasinya kehidupan manusia, peran para intelektual tersebut juga mengalami perubahan: menjadi sebatas penerjemah, interpreter, atau mediator.

Apakah peran ini juga berlaku dalam ranah kehidupan keagamaan? Peran ini justru tampak jelas dalam ranah kehidupan keagamaan. Ada ulama interpreter, dan ada ulama legislator. Status sebagai interpreter atau legislator adalah implikasi logis dari peran yang dijalankan dalam masyarakat.

Yang harus disadari adalah peran ini tidak bisa digeneralisasi; ia dibatasi oleh konteks ruang dan kondisi ingatan seseorang/ komunitas terhadap ajaran agama. Dalam konteks ini, pada waktu yang sama,

seorang ulama bisa saja dianggap sebagai ‘legislator’ dalam suatu komunitas Muslim, namun hanya dianggap sebatas interpreter atau mediator oleh komunitas Muslim yang lain.

Kedua kategori ini merefleksikan relasi yang berbeda antara suatu komunitas atau seorang individu dengan ulama, dan selanjutnya, juga menimbulkan pola respons yang berbeda. Contoh perbedaan pola respon ini bisa dilihat dari kasus fatwa MUI tentang penistaan agama oleh Ahok. Sebagian kalangan Muslim menganggap fatwa tersebut sebatas interpretasi yang tidak mengikat, tidak mesti dipatuhi apalagi dibela. ‘Interpretasi’ MUI tersebut bahkan ditolak dan dianggap ‘lebay’ bahkan ‘sakit’. Sementara itu, kalangan Muslim yang lain berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjalankan fatwa tersebut. Dua respon yang bertolak belakang dan dianggap benar oleh masing-masing kelompok. Hal ini disebabkan oleh kondisi dan karakter kedua kelompok yang memang berbeda.

Bagaimana karakter individu atau komunitas yang menganggap ulama tak lebih dari seorang interpreter? Dalam pikiran kelompok ini, jarak dan hirarki antara dirinya dengan ulama sudah blur. Bagi mereka, ada otonomi dalam beragama. Mereka mengakui diferensiasi seluruh cabang-cabang pengetahuan yang begitu rumit dan semakin mengarah pada sub-spesialisasi. So, bagi mereka, Anda jangan bicara dunia medis jika bukan seorang dokter; *gak* usah juga bicara ekonomi dengan segala kompleksitasnya jika bukan seorang ekonom. Bagaimana dengan ranah agama? Disinilah paradoksnya; semua merasa berhak untuk menafsirkan, walaupun basis pengetahuan dan ingatan keagamaannya mengalami amnesia. Akibat amnesia, mereka lupa bahwa agama bukan hanya intelektual *exercise*, tapi juga *feeling* dan *attachment* yang bersifat *sublime* karena terhubung dengan aspek ketuhanan.

Logika tidak bisa menjelaskan mengapa seorang Muslim gemetar mendengar azan, sementara Muslim lainnya malah mengambil bantal

untuk tidur; logika sulit menjelaskan mengapa ada seorang Muslim merinding mendengar nama Nabi Muhamamd disebut, sementara yang lain menganggapnya angin lalu. 'Ketersinggungan', dalam konteks ini, juga merupakan *feeling* yang tidak bisa dijelaskan pada seseorang yang tidak merasa memiliki. *Belief without belonging* (meminjam istilah Davie) bisa dikatakan sebagai ciri lain dari 'jemaah' ulama interpreter. Bagi Jemaah ini, 'ketersinggungan' bisa dijelaskan dalam kerangka politisasi!

Mana yang lebih baik dari dua kategori di atas? Aku tidak ingin terjebak untuk memberikan penilaian. Yang ingin kusampaikan adalah, perbedaan respon terhadap fatwa MUI didasari oleh kondisi 'sosiologis' dan 'teologis' yang berbeda antara pihak yang pro dan kontra. Progres adalah salah satu ciri modernitas barat yang ditandai dengan perubahan dan dinamika tiada henti. Dalam kondisi itu, pola hidup dan pandangan tradisional keagamaan yang terkondensasi dalam ritual dan *absolute observance* pada ajaran agama akan mengalami tantangan bahkan korosi, selanjutnya mengalami amnesia; di sini ada relasi diametral antara *progress* dengan *attachment* pada agama. Implikasinya, akan muncul Muslim yang 'percaya' pada Islam, tapi tidak merasa memiliki pada agama. Sosiolog Barat menyebutnya sebagai Muslim progresif/ moderate; dan di sudut lain, akan ada Muslim yang tetap merasa memiliki Islam, secara intelektual dan spiritual. Sebagai 'milik', ia akan 'menjaganya' dengan sepenuh hati, walau harus disebut radikal, intoleran, sumbu pendek, sakit, *lebay*, dsb. Dalam kacamata Barat, mereka disebut sebagai Muslim konservatif/ intoleran; garis keras; *Islamist*.

Apakah hanya ada dua kategori ini? Dalam kacamata Barat, tampaknya memang hanya ada dua. So, demo 212 dilihat sebagai simbol kebangkitan Islam garis keras. Oleh sebab itu, status Indonesia sebagai representasi Islam moderat akan dipertaruhkan. Benarkah

demikian? Aku tidak keberatan disebut Muslim konservatif. Namun, jauh di lubuk hati terdalam, cintaku pada seluruh elemen bangsaku, apapun suku, agama, dan golongannya tidak pernah berubah! *Wallahu A'lam* (Sydney, 8 Des 2016).





Demonstrasi 212 dan Penciptaan Equilibrium Baru

Akbar Ahmed menyebut media sebagai ‘setan laknat’, karena tidak punya keberpihakan pada moral. Apakah medsos termasuk di dalamnya? Tanyalah ke Ahmed, hanya dia yang tahu makna kata-katanya itu. Yang jelas, menurutku, tsunami medsos adalah refleksi dari adanya penyumbatan aspirasi yang tidak tertampung di media utama; refleksi adanya krisis kepercayaan; refleksi dari belum terbentuknya keseimbangan dalam arus informasi. Kondisi ini, sebagai contoh, bisa dilihat dari luasnya liputan media *mainstream* tentang sekelompok orang atau organisasi yang mengklaim sebagai pembela NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, di saat sekelompok elemen bangsa lainnya sedang berunjuk rasa menuntut penegakan hukum nasional, bukan pergantian hukum. Apakah para pendemo tsb hendak merongrong NKRI dan merusak pluralitas bangsa? Entahlah, posisi, kepentingan, dan cara berpikirlah yang menentukan persepsi itu.

Sebagai seorang Muslim, aku sangat tulus mencintai negeri dan bangsaku ini dengan seluruh elemen suku, agama, ras, dan golongan yang ada di dalamnya. Sudah lebih satu dekade aku menempuh pendidikan di luar negeri, namun tidak terbersit keinginan sedikitpun untuk menetap di negara lain. Dalam kaca mata ketulusan itulah

caraku memahami aspirasi kelompok Muslim yang berdemo. Tidak ada gunanya menyerukan persatuan dan kesatuan jika kita tidak bisa melepaskan diri dari kecurigaan dan tuduhan ketika salah satu elemen bangsa sedang menyampaikan aspirasi. Hegemoni kebenaran pada satu kelompok hanya akan menimbulkan perlawanan dari elemen lain. Ah, aku jadi teringat pada kata-kata Foucault: di mana ada dominasi, disitu akan muncul perlawanan. Gerakan demo, dalam konteks ini, menurutku, adalah bagian dari usaha untuk menciptakan keseimbangan baru. *Establishment* tidak selamanya baik, apalagi jika ditegakkan di atas pengabaian persepsi ketidakadilan dan berbagai penyimpangan. Aku khawatir, di tengah iklim demokrasi yang minus moral karena telah dibajak oleh pemilik modal dan politisi oportunist, *feeling* ketidakadilan, pada suatu waktu, akan menjadi bola liar yang sulit dikendalikan.

Menciptakan keadilan adalah hal yang paling rumit, sebab ia adalah basis makrokosmos dan mikrokosmos. Salah satu indikasi keadilan adalah keseimbangan. Langit ditegakkan atas dasar keseimbangan, dan transaksi di pasar juga didasarkan pada asas keseimbangan itu. Ketika *feeling* akan adanya 'keseimbangan' itu terganggu, maka secara naluri akan muncul reaksi. Dalam konteks sosial, keseimbangan tidak bisa dipahami tanpa dikaitkan dengan 'others'. Ada banyak *others* dalam kehidupan kita yang membuat kita tidak bisa berdiri sendiri. Seorang guru tidak bisa menuntut kesopanan dari para murid di saat sumpah serapah keluar dengan mudahnya dari mulutnya. Imbauan bijak dari kepala negara agar belajar etika sosial jadi kehilangan makna di saat ia bungkam mendengar bawahannya berkata kotor dan mengumpat di depan publik. Agak ironis, dua orang anggota parlemen berdebat sengit di Kanada hanya karena penggunaan kata 'fart' (kentut) dalam sidang, namun di saat yang sama, kita menerima dengan 'penuh pengertian' kata-kata '*taik, brengsek, nenek lu*' dan berbagai ungkapan lainnya dari mulut seorang pejabat negara.

Sebagai bangsa, marilah kita kembali memupuk kepercayaan sosial, sebab ia adalah prasyarat untuk membangun masyarakat yang demokratis. Tanpa itu, yang ada hanyalah demokrasi minus jiwa demokrat. Kepercayaan tidak bisa dibangun jika umpatan, cacian, dan penyebaran tulisan tendensius masih dengan mudah beredar tanpa pertimbangan. Aku ingin agar, sebagai contoh, kelompok kontra Ahok berhenti memakai kata 'Ahoak', sebagaimana aku juga ingin agar kelompok yang pro berhenti menggunakan tuduhan radikal, sumbu pendek dsb. Kata-kata bijak pun tidak selamanya baik jika disebarkan tanpa mempertimbangkan konteks kemunculan dan kondisi sosial politik yang sedang berkembang. Tidak ada kata-kata bijak yang berlaku untuk semua tempat, waktu, dan konteks. Satu-satunya alasan yang membuat kata-kata bijak itu bisa diterapkan untuk semua kondisi hanyalah kepentingan dan keberpihakan! *Wallahu A'lam.* (Sydney, 30 nov 2016)





Demo 212

Walaupun demo 4 November telah lewat, namun pro dan kontra tak kunjung usai. Salah seorang sahabat baikku bertanya mengenai pendapatku tentang demo itu. Secara sederhana, aku menjelaskan yang tidak ikut demo bukan berarti moderat, dan yang ikut demo bukan berarti radikal; yang menilai pidato Ahok bukan penistaan tidak mesti bijak, toleran, cinta kedamaian, sebaliknya, yang menilai itu penistaan tidak berarti picik, intoleran, dan penebar kebencian. Terlepas dari benar tidaknya Ahok menista agama, saya bahagia bahwa demo berlangsung damai, santun, dan tetap fokus pada tujuan yang telah diputuskan. Masalah adanya tuduhan politisasi agama untuk pilkada, biarlah semua yang berprasangka seperti itu mempertanggungjawabkan prasangkanya di hadapan Allah, termasuk mereka--jika memang ada--yang “benar-benar” mempolitisasi agama, ikut mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Aku sendiri sulit membayangkan jumlah massa yang begitu besar adalah korban ‘politisasi’!

Media Ausie seperti biasa selalu memandang dengan peyoratif setiap gerakan Islam. Sydney John, seperti biasa, juga tetap pada fokus ‘dagangannya’, fundamentalisme Islam, dan berkomentar dengan penuh ketidaktahuan, “Siapa donatur demo itu? Kita

harus mencarinya!” Mereka sudah terlalu lama kosong dari agama, sehingga sulit untuk mengerti bahwa ada “manusia dari planet lain” yang begitu mudah tersulut emosi keagamaanya, dan selanjutnya, rela berkorban apapun demi agamanya itu. Ada ‘*profound break*’ akibat amnesia, dan dalam kondisi itulah, mereka menjadi pengamat, pemerhati, dan penafsir Islam yang ‘otoritatif’!

Demo adalah ekspresi yang sah dalam iklim demokrasi. Jumlah yang begitu besar tentu akan menimbulkan kekhawatiran banyak pihak jika menjelma menjadi kekuatan Islam politik, di tengah ‘kecurigaan’ berbagai elemen lain terhadap kebangkitan Islam. Hal ini mungkin bagian dari suasana yang harus ‘tetap dialami’, dan entah kapan bisa kita ‘lewati’. Warisan psikologis CSIS yang melihat Islam sebagai ‘musuh’, atau ‘ancaman’ dan terejawantahkan dengan baik dalam kebijakan politik Orde Baru-pra ICMI, adalah duri dalam daging yang menjadi kanker dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Ingatan kolektif kita berisi virus-virus ini. Sayang sekali! Tuduhan-tuduhan yang tidak proporsional terhadap sesuatu yang disebut, sebagai contoh, ‘penerapan syariah, perda syariah’, dan respon yang berlebihan terhadap razia warteg di bulan Ramadan, adalah refleksi dari sifat relasi kebangsaan kita yang dibumbui dengan kecurigaan itu.

Nihilnya nilai-nilai agama sebagai landasan moral, hukum, karena dianggap sektarian, tapi sebaliknya, sesuatu yang datang dari “barat’ dianggap netral dan universal menandakan diskursus kebangsaan kita berlangsung secara tidak seimbang. Ada *regime of truth* yang menguasai wacana, dan mereka tidak memiliki akar yang kokoh dalam tataran *grassroot*, sebab akar mereka adalah kekuatan modal dan kendaraan politik yang korup dan ekstraktif. Struktur relasi seperti ini tentu akan semakin menjauhkan kita dari cita-cita kebangsaan yang telah dicetuskan oleh para pendiri bangsa.

Sebagai Muslim yang sangat mencintai seluruh elemen bangsa ini—apapun agama, etnis dan golongannya--, saya hanya ingin

mengungkapkan sebagaimana penganut agama lainnya, Muslim punya hak untuk ikut memaknai dan menentukan perjalanan bangsa ini, tanpa adanya tuduhan yang peyoratif. Sepanjang cara yang digunakan konstitusional dan demokratis, maka suara dan aspirasi mereka layak didengar, bukan ditinggal pergi.

Muslim yang mengusik kedamaian penganut agama lain, maka solusinya adalah dibawa ke jalur hukum, sebab pada esensinya ia bukanlah Muslim yang baik. Begitu jelas larangan dalam Alquran dan Hadith untuk tidak ‘menyinggung’ agama lain, karena akan berbalik pada agama sendiri. Ibarat seseorang yang menghina orang tua orang lain, tentu lazimnya akan dibalas dengan penghinaan yang sama dari pihak lain. Begitulah hukum sosial yang selalu berbalas.

Dari sisi lain, tentu saja masalah akan berbeda jika dilihat secara lebih ideal. Secara substantif, Tuhan memang tak perlu dibela, sebab Ia serba-Maha. Namun, jika konsisten dengan cara berpikir seperti ini, maka harusnya juga disadari bahwa, Tuhan sebenarnya juga tak perlu disembah, sebab Ia tak butuh siapapun. Dalam konteks ini, kita harus menjadi atheis, itu baru konsisten. Penistaan dan penyembahan tak akan memberikan dampak apapun bagi Tuhan.

Pertanyaan selanjutnya adalah: agama yang diturunkan Tuhan ini untuk Tuhan sendiri atau manusia? Jika jawabannya untuk manusia, maka kita harus membatasi permasalahan di atas dalam kerangka sosial. Pengetahuan tentang agama, termasuk Tuhan dikonstruksi secara sosial, yang diinspirasi oleh berbagai sumber. Dalam konteks Islam, sumber utamanya adalah Alquran. Oleh sebab itu, ia dianggap suci oleh ‘sebagian besar’ kaum Muslim—bukan seluruhnya—dan harus dijaga kesuciannya. Harus diakui bahwa ranah duniawi dan ukhrawi setiap orang berbeda-beda sehingga akan menentukan pola responnya dalam berbagai masalah. Alquran dalam konteks ini harus dilihat menurut pandangan manusia, bukan Tuhan. Maka

‘pembelaan’ terhadap sesuatu yang dianggap sebagai pelecehan salah satu ayatnya, sebaiknya dipahami dalam kerangka pembelaan seorang penganut agama terhadap sumber pengetahuannya yang dianggap suci tersebut. Apakah ini subjektif? Sudah pasti subjektif, sebab *feelings* keagamaan bersifat subjektif. Dalam konteks ini, masalah penistaan harus diletakkan dalam konteks relasi sosial, bukan transenden. *Wallahu a’lam*. (Sydney, 7 nov 2016)





‘Marginalisasi ‘Ulama

Aku sepakat bahwa NKRI adalah bentuk yang telah disepakati Bersama sehingga tidak perlu lagi diganggu gugat. Namun, harus diingat bahwa NKRI hanyalah ‘*casing*’, bukan *content*. Setiap elemen bangsa berusaha untuk berperan dalam memberi warna pada *casing* tersebut. Elemen yang paling dominan adalah negara, yang berbentuk *nation-state*—dalam konteks Indonesia adalah *secular nation-state*. Sebagai *casing*, isinya sangat bergantung pada aktor yang menjalankannya yang bisa dilihat dari perilaku, produk kebijakan, undang-undang, dan keberpihakannya.

Nation-state adalah representasi modernitas Barat yang paling dominan di seluruh dunia. Dengan kekuasaan negara yang begitu besar, maka negara bisa melakukan rekayasa sosial sekaligus mengontrolnya dan membuat undang-undang. Negara hadir hampir dalam setiap aspek kehidupan warga. Perpaduan antara *nation-state* dan sekulerisme mensyaratkan satu hal: pemisahan negara dari agama.

Dalam Bahasa Anwar Sadat, tidak ada agama dalam politik, dan tidak ada politik dalam agama. Apa dampaknya bagi eksistensi institusi keulamaan? Dalam dunia Muslim, ulama memiliki status penting karena berperan besar dalam bidang pendidikan dan hukum.

Mereka terlibat secara langsung dalam menciptakan dinamika sosial dan kehidupan simbolik umat Islam. Namun, status dan peran mereka kemudian memudar seiring hadir dan menguatnya institusi negara. Sekolah-sekolah negeri di Eropa pada awalnya dibangun untuk menandingi peran gereja dalam kehidupan di masyarakat, karena adanya konsensus agama tidak boleh hadir di ruang publik. Iklan gereja di bus kota London yang mengajak masyarakat agar kembali ke gereja dikritik oleh kaum sekuler dengan satu alasan: agama tidak boleh hadir di ruang publik. Akhirnya, mereka membuat iklan provokatif untuk melawan iklan gereja tsb: “*there is probably no God. Stop worrying now, and enjoy yourself!*”. Salah satu dampak modernitas yang direpresentasikan dalam kehidupan sekuler adalah munculnya generasi yang mengalami amnesia; ada ‘*profound break*’ antara masa lalu dengan masa kini. Agama adalah kehidupan pribadi sehingga harus berada di ruang privat. *Religious community* yang diikat oleh ingatan kolektif keagamaan yang sama digantikan oleh kehidupan individual yang otonom. Ada otonomi seseorang dalam beragama, bagaimanapun kualitasnya! Dalam konteks dunia Muslim, disengaja atau tidak, dampak pendirian sekolah-sekolah negeri akhirnya juga dirasakan oleh institusi ulama. Akhirnya, peran ortodoksi Islam ikut memudar dalam kehidupan sosial.

Ulama, dalam kehidupan Muslim berfungsi sebagai—meminjam istilah Hervieu-Leger--‘*lineage of belief*’, yang menjembatani ingatan masa lalu dan masa kini masyarakat Muslim. Namun, kehidupan negara yang sekuler telah mengubah itu semua. Maka perbedaan perilaku kaum Muslim, antara yang masih menghormati dan yang ‘dianggap kurang atau tidak menghormati’ ulama sebenarnya berakar dari kondisi di atas. Ada yang mengalami *profound break*, dan ada yang tidak. Praktik *recalling* (anamnesis) yang paling berpengaruh adalah ritual. Maka bisa dilihat di sini bahwa kaum Muslim sekuler kurang

memandang penting aspek ritual ini, sehingga jarak dengan masa lalu semakin melebar. Bagi Muslim tradisional, referensi pada masa lalu dalam menentukan sikap masa kini dan masa depan adalah hal biasa, karena memang tidak ada jarak antara masa lalu dan kini dalam kehidupan mereka. Sementara yang mengalami 'profound break', jarak itu telah membuatnya mengalami amnesia. Akhirnya, institusi keagamaan di matanya tak ada bedanya dengan LSM. *Wallahu a'lam!* (Sydney, 14 Oktober 2016)





Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Aku sudah sering mendengar pernyataan pejabat pemerintah bahwa Pancasila adalah ideologi yang tepat untuk mengatasi radikalisme; Pancasila adalah ideologi yang sangat cocok untuk konteks Indonesia yang plural. Aku sepakat dengan ini! Namun, masih ada pertanyaan: Pancasila versi siapa? Harus diingat bahwa Pancasila bukanlah *'acting agent'* yang bisa menafsirkan dirinya sendiri; ia hanyalah *'payung'* yang menaungi berbagai penafsiran. Ada kontestasi makna dan pemaknaan di situ.

Sebagai contoh, beberapa elemen umat Islam menuntut agar perzinahan dihukum, karena bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila. Namun, ada elemen lain yang menolaknya, dengan alasan HAM; menurut mereka, Pancasila menjunjung tinggi HAM! Harry Tanoe berusaha dengan penuh gairah menyelenggarakan kontes Miss Universe di Indonesia. Alasannya boleh jadi juga merujuk kepada nilai-nilai Pancasila. Sebagian kaum Muslim yang sangat khawatir dengan dampaknya pada kerusakan moral bangsa menolak kontes tersebut, juga dengan merujuk pada nilai-nilai Pancasila. Keprihatinan dan kekusaranku—hampir pada level eksplosif—pada ketidakdilan sosial di negeri ini, juga didasari oleh nilai-nilai

Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keacuhan pengelola negara terhadap fenomena ini boleh jadi juga didasari atas penghayatan mereka terhadap Pancasila! Pancasila versi mereka!

Entahlah, sekarang adalah masa, ketika Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI tak lebih dari jargon. Makna nyata jargon yang paling mudah adalah: sesuatu yang diucapkan berbeda dengan yang dilakukan. Damai dan langgeng negeriku! (Sydney, 4 feb 2017)





UAS sebagai Tokoh Adat Melayu

Pertengahan tahun 1998, sepucuk surat tiba di rumahku, Tembilahan. Sampai saat ini, surat itu masih disimpan ayahku. Pengirimnya, seorang calon mahasiswa al Azhar Cairo yang berasal dari Air Molek: Abdul Somad. Isinya sederhana: sebagai sesama anak Melayu Riau dan lulus pada tahun yang sama ke Cairo, ia mengajakku untuk berangkat bersama ke Jakarta, sebelum terbang ke Cairo. Takdir berkata lain, karena ada urusan ijazah di Ponorogo, kami tidak bisa berangkat bersama, walau akhirnya Allah pertemuan di Cairo, terutama dalam wadah Kelompok Studi Mahasiswa Riau (KSMR).

Abdul Somad itu, sekarang lebih dikenal sebagai UAS, seorang da'i yang juga memangku gelar adat Melayu: Datuk Seri Ulama Setia Negara. Gelar adat ini, menurut Lembaga Adat Melayu Riau adalah yang pertama ditabalkan pada ulama. Prosesinya dihadiri ribuan orang, termasuk berbagai tokoh penting dan perwakilan berbagai kerajaan yang pernah eksis di Riau dan menjadi *core* elemen legitimasi lembaga adat itu. Ada legitimasi dan pengakuan dalam penabalan gelar adat itu. Maka, penerimanya bisa dikatakan sebagai representasi kultural budaya Melayu. Selama gelar itu melekat pada dirinya, akan sulit dipisahkan antara dirinya sebagai personal dan

sebagai representasi budaya. T tutur katanya, gaya canda dan cara berdakwah sarat dengan budaya Melayu; pengetahuannya tentang ceruk kampung, lekuk dan bukit di tanah Melayu dianggap cukup; wawasannya tentang sejarah Melayu juga dianggap mumpuni, dan itu terekspresi jelas dalam berbagai ceramahnya. Atas dasar itu, ia ditabalkan sebagai Datuk Seri Ulama Setia Negara.

Gelar adat adalah simbol. Makna suatu simbol tidak inheren melekat pada objeknya, tapi dilekatkan oleh pemberi simbol. Makna simbol selalu bersifat kolektif, bukan personal. Dalam hal gelar adat, jelas sekali gelar itu disematkan oleh Lembaga Adat Melayu, dan maknanya dipahami dengan baik oleh mereka yang hidup dalam budaya Melayu Riau. Dalam gelar itu, ada *feeling of attachment* dan marwah bagi orang Melayu. Karena 'muatannya', setiap usaha pihak eksternal yang mendegradasikan makna gelar adat itu akan menimbulkan konsekuensi kultural tersendiri. Akan ada sentimen dan sensibilitas yang terganggu dan menimbulkan ketidaknyamanan. Saat ini, sentimen primordial itu telah mulai disulut. "Setia Negara" ternyata bisa berjalan paralel dengan "Anti-NKRI"! dan itu diteriakkan dengan lantang, disebar dengan tulisan, dan dipaksakan dengan arogan. Aku tidak tahu, apinya akan segera membesar atau segera padam, meninggalkan abu yang beterbangan ke berbagai arah dan mengotori banyak lokasi.

Negeri yang bernama Indonesia ini tidak bisa hanya dijaga berbekal mulut besar dan kuantitas yang jumbo. Dibutuhkan daya nalar untuk mengerti dengan seluk beluk budaya, *feeling* dan *social memory* berbagai suku yang menopang berdirinya negeri ini. Daerah yang dihisap sejak sebelum merdeka hingga saat ini, memiliki persepsi berbeda terhadap republik ini dengan mereka yang menikmati 'hasil jaranan' itu. Ada perbedaan '*fixed points*' yang dialami setiap daerah yang mempengaruhi ingatan sosial mereka, dan pada akhirnya

membuat pemaknaan itu akan terus berbeda. Ada nuansa perbedaan, walau diikat oleh ikrar persatuan. Dalam konteks itu, menabalkan diri sebagai '*national sheriff*' yang punya otoritas tunggal mendefinisikan kesetiaan seorang warga terhadap negara tak lebih sebagai unjuk kependiran daripada kebijaksanaan. Berhentilah! Untuk menjaga *feeling* sebagai sesama anak bangsa, moral seharusnya lebih panjang dari 'akal'; tenggang rasa dan pengertian lebih besar daripada mulut. Dengan itu, kita akan tetap bersama dalam keindonesiaan yang berbeda ini. (Sydney, 2 September 2018).





Nalar Melayu

Nalar tradisional Melayu mengatakan, jika ada asap, berarti ada api. Kausalitas dalam nalar Melayu berhenti di sini: di ranah natur. Natur adalah tempat mereka bergantung yang terefleksi dari pola hidup keseharian: sebagian masih ada yang dalam fase ‘mencari dan mengumpulkan’, sebagian besar lainnya pada fase subsisten dan pertanian. Ketiga fase ini berbeda secara evolusi, namun tetap bertumpu pada ranah yang sama: natur. Dalam konteks ini, tidak mengherankan jika pepatah lama tersebut berhenti pada ranah natur.

Kedekatan antara kultur dan natur dalam kehidupan orang Melayu bisa dilihat dari berbagai sisi. Dari sisi ekonomi, filosofi hidup mengajarkan agar menghindari model produksi yang bertumpu pada akumulasi produksi. Rezeki pagi cukup dikais pagi; dan rezeki petang dikais petang. Tak ada ruang untuk melakukan ekstraksi dan eksploitasi alam. Ketika para drakula kapitalis yang nirmoral itu datang, keadaan berubah seratus persen. Untuk melihat betapa nirmoralnya perilaku ekonomi, para kapitalis yang membakar hutan secara massif, bisa dibandingkan dengan yang dilakukan kakekku ketika berada di hutan. Tiap kali menjumpai pohon yang dililit akar atau rotan yang membekas dalam di kulit pohon, kakekku selalu membersihkan batang pohon-pohon itu. Ada kecintaan yang tulus

pada alam sebagai refleksi terima kasih atas kebaikannya. Dalam kondisi itu, membakar, ekstraksi, dan eksploitasi SDA secara berlebihan adalah *unthinkable, impossible!*

Kawasan Melayu berubah cepat dengan masuknya kapitalisme global yang menghisap apapun yang bisa mereka hisap: tanah, air, hutan, sungai, laut, dan manusianya. Para kapitalis mendirikan berbagai industri penghisap dengan kapasitas yang terus meningkat sepanjang tahun. Ironisnya, pada fase industri yang sangat bertumpu pada model ekonomi ekstraktif ini, batas nalar Melayu tetap tidak berkembang: hanya asap dan api. Secara kultural, hal ini bisa dipahami mengingat kapitalisme global yang masuk ke ranah mereka adalah parasit yang bukan bagian dari natur dan kultur Melayu; mereka adalah drakula yang berlingung di balik segala macam investasi.

Fase industri yang dibawa oleh para investor bukanlah hasil evolusi masyarakat Melayu. Oleh sebab itu, Orang-orang Melayu tidak mampu memberikan respon yang sepadan terhadap bencana pembangunan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi ekstraktif tersebut. Batas nalar mereka terlalu dangkal. Jikapun dalam, masih dikumur-kumur di mulut, belum disemburkan dan diikuti dengan ‘haku’ yang marah karena harus menanggung bencana masif pembangunan. Nalar Melayu juga belum menggiring ke arah pikiran kreatif murni yang bisa mendatangkan manfaat ekonomi bagi mereka dengan memikirkan, ada apa “dibalik” asap? Di tengah iklim ekonomi yang mendorong kreativitas, aku ingin mendengar cara orang Melayu mengubah bencana asap menjadi uang. Caranya, tawarkan wisata asap! Ajak para elit politik lokal dan pusat yang bersekongkol dengan para drakula investor tersebut untuk menikmati jerebu itu. Beri mereka kesempatan seluas-luasnya untuk menghirup sedalam-dalamnya sampai paru-paru dan hidung lebih kotor dari *sneakers* yang mereka pakai!

Paparan asap tebal selama berbulan-bulan di atas Pulau Sumatra adalah indikasi nyata bahwa skala pembakaran sudah berada di luar batas kemampuan alam untuk melakukan pemulihan. Dalam skala global, kerusakan hutan sebenarnya bukanlah khas Indonesia, tapi terjadi di seluruh negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Benang merah kerusakan itu adalah: selalu berkaitan erat dengan pasar global, atau *global capitalism* yang eksploitatif.

Di tengah bencana massif ini, masihkan kita menghamba kepada para drakula investor itu? Sebagai perbandingan, Keesing mengungkap fakta menarik di Amerika: bahwa daerah yang tidak mengadakan insentif untuk sektor pertambangan, perkebunan dan model ekonomi ekstraktif lainnya karena iklim yang tidak cocok, kelangkaan sumber daya atau letaknya yang marjinal relatif lebih makmur dibanding daerah yang memiliki pusat pertambangan dan perkebunan. Kapitalisme, dalam banyak kasus memang lebih banyak membawa kutukan daripada berkah. Puluhan tahun bertanam sawit, status sebagai eksportir CPO tak pernah berubah sehingga sangat minim nilai tambah. Tidak hanya itu, kehadiran mesin industri para kapitalis juga menyedot masyarakat ke dalam sistem ekonomi uang, namun yang dinikmati hanya yang berputar di pinggiran dengan menjadi buruh pabrik. Mungkin penghasilan bertambah, namun mereka juga harus membayar mahal dengan rusaknya sistem tradisional komunitas mereka, disertai meningkatnya kesenjangan antara kenaikan kebutuhan material dan kemampuan untuk membelinya.

Dalam konteks di atas, mari stop deforestasi, sebab multiefeknya sangat massif: banjir di darat dan asap di langit. Ini semua berdampak pada sektor pertanian, kehutanan, irigasi, transportasi, perumahan, lingkungan, Kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Nilai ekonomis hutan seharusnya tidak hanya dilihat dari seberapa banyak bahan

mentah yang bisa disediakan hutan untuk sektor industri, tapi juga dari sisi perannya dalam menjaga sistem ekologi sehingga manusia terhindar dari banjir dan konflik dengan binatang. Sekarang, saatnya untuk berubah menjadi penganut *deep ecology*. *Shallow enviroentalism* terbukti cacat secara moral, dan banyak mudharat secara faktual.

Akhirnya, memang benar bahwa dibalik asap pasti ada api; dan dibalik api ada misteri. Apa misteri itu? Struktur ekonomi-politik yang tak terlihat atau sesuatu yang nyata tetapi tak tersentuh. Ranah ini dipenuhi banyak labirin yang saling melindungi karena kegemaran yang sama: menghisap!





Trust sebagai Software

Suatu ketika, setelah gagal mencapai kesepakatan dengan pemerintah, serikat buruh transportasi London melakukan mogok kerja. Sekedar informasi, ada dua juta *commuter* perhari yang menggunakan transportasi publik. Boris Johnson yang ketika itu menjabat walikota London menyiapkan truk-truk militer untuk membantu mobilitas warga yang terdampak mogok. Selain itu, ia juga berkeliling ke stasiun-stasiun utama menemui langsung warganya, menyampaikan permintaan maaf yang dalam karena pemerintah gagal mencapai kata sepakat dengan serikat pekerja. Saya tidak mendengar ada caci maki kepada pemerintah dari warga kota, sebab mereka tahu dan percaya bahwa pemerintah telah melakukan yang terbaik. Pada sisi lain, pemerintah juga turun langsung meminta maaf atas kejadian tersebut demi menjaga *trust* di mata rakyat. *Trust vertical* tetap terjaga karena sikap dan perilaku penyelenggara negara yang bertanggungjawab.

Masih di kota yang sama. Suatu ketika sore pulang kuliah, aku berpapasan dengan seorang ibu tua yang membawa barang belanja yang cukup banyak. Ia nampak cukup kelelahan. Aku kemudian mendekat dan menawarkan bantuan. Ia langsung tertawa gembira dan memintaku mengantarkan barangnya ke apartemen. Kami tidak

saling kenal; kulit juga berbeda warna: aku berkulit coklat dan ia kulit putih; aksen English juga berbeda jauh: aku belepotan dan ia *native*. Namun, tidak ada kecurigaan sama sekali. Mengapa? Ada *trust* yang kuat secara horizontal antar sesama anggota masyarakat.

Trust adalah *software* dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara vertikal, *trust* dibangun oleh penyelenggara negara yang baik dan bertanggungjawab; secara horizontal, ia dibangun oleh para warga negara yang baik melalui berbagai cara sehingga terinstal di setiap kepala mereka. *Trust* yang muncul melalui rekayasa kata dan fakta tidak akan pernah bertahan lama. Sangat rapuh! Sebab berdiri di atas bangunan keropos penuh karat.

Trust adalah hasil dari akumulasi perbuatan baik yang dilakukan secara konsisten dengan penuh ketulusan, bukan demi pencitraan; sebaliknya, *distrust* tidaklah muncul secara tiba-tiba, tapi efek dari akumulasi perbuatan buruk pada level struktural dan kultural. Rumah tangga yang dilandasi *distrust* akan berakhir pada perceraian atau perselingkuhan; persahabatan yang dilandasi *distrust* akan berujung pada perpisahan. Kehidupan bermasyarakat yang dilandasi *distrust*, akan digerogeti saling curiga yang tidak berujung. Kehidupan berkebangsaan yang minus *trust* tapi surplus *distrust* akan menjadi bencana nasional. *Distrust* membuat para warga yang dekat secara geografis itu, menjadi jauh secara psikis.

Distrust adalah refleksi dari hilangnya keseimbangan dalam masyarakat, sehingga perbuatan baik seringkali tidak bermakna, dan musibah tidak menimbulkan empati. Mengapa? Ada jarak psikis yang sangat jauh antarwarga negara yang tidak bisa dijematani oleh kecanggihan teknologi informasi. Untuk melihat signifikansi *trust* ini dalam kehidupan, pemerintah di negara maju berusaha secara kontiniu mempertahankan dan memperkuatnya. Tiga hakim London yang tertangkap kamera sedang menonton film dewasa saat jam istirahat lebih memilih berhenti dari pekerjaannya untuk menjaga

trust masyarakat terhadap lembaga peradilan. Jacinda Ardern, PM Selandia Baru berpidato penuh empati dengan memakai kerudung merespons penembakan di Christchurch. Kepada para korban, ia dengan spontan berkata: “Kalian adalah kami”. Negara hadir dan masuk ke dalam relung warga. Itulah sebabnya, *trust* yang memang telah berakar menjadi semakin kokoh.

Dalam tragedi Wamena, harus disadari bahwa respon dengan kualitas yang sama tidak muncul dari pejabat negara kita. Apologi negara karena gagal menjaga keselamatan warga menjadi sesuatu yang sangat mewah dan langka. “Kevakuman” inilah yang menimbulkan *distrust* yang dibumbui oleh berbagai spekulasi liar. Persepsi absennya imparialitas dalam penegakan hukum menambah kayu bakar pada api yang telah tumbuh itu. Isu toleransi, intoleransi, dan ujaran kebencian yang lebih bersifat politis daripada substantif memperbesar ruang kosong yang memungkinkan *distrust* tumbuh subur.

Dalam kondisi itu, puji dan caci muncul tiada henti, sehingga pihak ketiga sangat potensial untuk masuk. Keluarga yang memiliki *mutual trust* yang kokoh memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk bertengkar dan pecah; sebaliknya, konflik keluarga memungkinkan WIL dan PIL masuk. Dalam skala yang lebih besar, bisa dikatakan bahwa ideologi yang dianggap bertentangan dengan semangat kebangsaan hanya bisa tumbuh di tengah ketidakpercayaan yang mendalam bagi warga negara terhadap pemerintah. Maka, cara terbaik mengatasi isu-isu radikalisme adalah dengan menghadirkan negara yang adil dan mengayomi di hati warga. Di tengah demokrasi yang dibajak oleh kaum borjuis, politik yang memihak rakyat adalah satu-satunya pilihan. Mungkinkah? entahlah (Padang, 14 Oktober 2019).





Yusuf

Setiap Senin malam, saya punya aktivitas baru: menemani anak menonton serial Yuzarsif (Nabi Yusuf) di saluran Thawaf TV. Yusuf adalah nabi yang berasal dari Bani Israel yang lahir di daerah Kan'an. Kisahnya diceritakan al Quran dengan sangat apik: mulai dari kehidupannya di keluarga yang menjadi anak kesayangan ayahnya, Nabi Ya'qub, hingga menjadi anak yang dibenci oleh saudaranya yang lain. Akar kebencian ini adalah kecemburuan: Yusuf lebih disayangi oleh ayahnya daripada yang lain. Akhirnya, ia menjadi korban konspirasi jahat saudaranya: ia dijual sebagai budak ke kafilah yang lewat. Ia tiba di Mesir dengan status sebagai budak; ia adalah barang yang dimiliki dan dikuasai oleh tuannya, bukan lagi seorang pribadi yang merdeka.

Yusuf dimiliki oleh pembesar nomor dua di Mesir saat itu sehingga ia hidup di istana. Di sinilah mulainya petaka yang membawanya ke penjara. Istri sang pembesar, Zulaikha, jatuh cinta kepada Yusuf. Seperti apa cinta Zulaikha kepada Yusuf? Sulit dicari perbandingannya. Kedalaman cinta Qais kepada Laila belum sebanding dengan cinta Zulaikha kepada Yusuf. Jika Qais cemburu kepada debu-debu yang bisa menempel erat di sandal Laila, Zulaikha lebih dari itu: ia cemburu pada Entitas yang kepada-Nya Yusuf tiap malam bersimpuh dan

sujud. Siapa “Sosok” itu? Mengapa ketika setiap getaran jiwa rakyat Mesir saat itu melantunkan dendang cinta yang dalam kepada Yusuf, ia justru duduk bersimpuh melampiaskan tangis, keluh kesah dan munajatnya pada Sosok itu? Singkat cerita, cinta Zulaikha yang dalam ternyata menggiringnya keluar melewati batas cinta itu; ia akhirnya ‘menemukan’ Maha Pencinta yang disembah Yusuf. Maha Pecinta yang sempat ia cemburui.

Episode kehidupan Yusuf mengisahkan banyak krisis di berbagai level: keluarga, istana hingga negara. Seluruh krisis ini merupakan satu keberlanjutan yang tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki relasi kausal yang berurutan. Klimaks krisis itu adalah terjadinya kemarau panjang selama tujuh tahun yang menyebabkan keringnya Sungai Nil. Peran terpenting Yusuf sebenarnya terletak pada peran vitalnya selama tujuh tahun masa krisis kekeringan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat itu, lahan pertanian banyak dikuasai oleh segelintir elit. Tak hanya itu, elit ekonomi-politik itu juga memiliki banyak budak. Letak kecerdasan Yusuf adalah kemampuannya menjadikan fase krisis sebagai momentum untuk melakukan reformasi ekonomi dan sosial. Melalui wewenangnya sebagai bendahara kerajaan, ia melakukan politik “diskriminatif” ketika memberikan bantuan. Kaum relijius borjuis dan para tuan tanah harus membayar mahal untuk mendapatkan sekarung gandum; sebaliknya, rakyat jelata mendapatkannya secara gratis. Ketika para elit borjuis itu kehabisan uang untuk membeli gandum, Yusuf menjadikan lahan pertanian dan budak yang mereka miliki sebagai alat tukar untuk mendapatkan gandum. Akhirnya, para budak dan lahan pertanian luas yang sebelumnya dikuasai oleh para elit ekonomi politik itu banyak yang beralih ke tangan negara.

Karena krisis yang panjang, para elit borjuis itu kehabisan modal. Semua harta yang mereka miliki: uang, tanah, dan budak telah

tergadai untuk membeli gandum yang mahal agar bisa bertahan hidup. Akhirnya mereka berubah jadi rakyat jelata yang *kere*. Saat itulah yang ditunggu Yusuf. Para budak yang telah dibayarkan oleh para elit borjuis kepada negara itu kemudian dimerdekakan oleh Yusuf, dan lahan pertanian yang luas milik para tuan tanah itu kemudian ia bagi-bagi secara merata kepada para budak yang baru merdeka. Ini adalah reformasi agraria tersukses sepanjang sejarah melalui momentum krisis yang mendera Mesir. Pesan penting yang disampaikan Yusuf adalah: pada saat krisis, berpihaklah kepada rakyat jelata walaupun harus bersikap diskriminatif, karena mereka adalah sokoguru suatu bangsa. Yusuf menjadikan masa krisis sebagai momentum untuk merampas kekayaan para elit pemodal, kemudian mendistribusikannya kepada rakyat.

Durasi krisis yang panjang selama tujuh tahun sebenarnya merefleksikan dalamnya jurang kesenjangan antara kaum borjuis dan proletar saat itu. Butuh tujuh tahun untuk merampas secara alamiah akumulasi harta di tangan mereka. Ketika proses ‘perampasan’ akumulasi harta itu berakhir, ditandai dengan bangkrutnya para tuan tanah dan pemilik budak itu, krisis kekeringan pun berakhir.

Kekeringan ini bisa dipahami secara literal, namun tidak menutup kemungkinan untuk dipahami secara metaforik. Ketika lahan subur luas terbentang namun bukan milik rakyat, pada hakikatnya rakyat sedang mengalami “kekeringan”. Selain itu, perjalanan sejarah menunjukkan redistribusi lahan pertanian kepada rakyat jelata memerlukan kekuatan struktural, bukan kultural. Jika kita menggunakan perspektif Yusuf, fase ‘kekeringan’ yang menyebabkan krisis ini seharusnya dijadikan momentum untuk melakukan redistribusi kekayaan. Namun, di sinilah liciknya kaum borjuis-kapitalis itu: mereka menempatkan boneka di ranah struktural yang tidak hanya mencegah terjadinya redistribusi *capital*, tapi malah

menyamun kekayaan negara sebagai infus bagi perusahaan mereka yang sedang sekarat.

Kekeringan dan krisis pangan di Mesir pada era Yusuf merupakan cara Allah untuk menciptakan keseimbangan baru. Terkadang, krisis adalah mekanisme alamiah untuk menciptakan kembali keseimbangan sosial, ekonomi, dan politik. Ironisnya, di negeri ini, fase krisis justru menjadi momentum negara untuk mempertahankan borjuasi ekonomi, ditandai dengan paket deregulasi yang menguntungkan para pemodal, disertai berbagai insentif pajak dan penyertaan modal dalam skala massif. Skandal Century dan BLBI merupakan contoh nyata bagaimana para kapitalis dan bonekanya menjadikan krisis sebagai *vacuum cleaner* kekayaan negara untuk memenuhi tembok raksasa mereka yang tidak pernah berhenti mencerna setiap butir makanan yang masuk. Betapa malangnya negeri ini!





Lebanon

Lebanon, negeri mungil nan jelita itu kembali terkoyak, bukan yang pertama, tapi untuk yang kesekian kalinya. Ledakan ribuan ton amonium nitrat meluluhlantakkan pelabuhan, menyisakan lubang dengan luas ratusan meter, memanggang belasan gedung bertingkat, merenggur ratusan nyawa, dan ribuan korban luka.

Lebanon tidak hanya cantik jelita, namun juga saksi sejarah perkembangan peradaban manusia. Dahulu kala, negeri yang terletak di kawasan pantai Laut Mediterania itu, bersama Palestina, dikenal dengan nama Kan'an, yang berarti daerah dataran rendah. Kondisi geografis, berupa perpaduan hutan yang lebat, pantai dan laut yang luas menghampar menuntut bangsa itu untuk bersahabat dengan alam. Maka, dalam sejarah, mereka juga dikenal sebagai ahli pembuat kapal plus pelaut yang ulung. Selama ratusan tahun, armada dagang mereka menguasai Laut Tengah. Yunani yang buta huruf akhirnya jadi terpelajar setelah belajar angka dari mereka pada abad ke-7 SM. Ketika itu, nama lain Lebanon adalah Phoenicia.

Sebelum runtuh, Phoenicia terpecah akibat konflik internal. Efek dari konflik itu, salah seorang putri kerajaan bernama Aleesha, dengan dibantu pamannya yang setia melarikan diri ke kawasan yang sekarang bernama Tunisia, masih di tepi Laut Tengah, dengan kondisi

geografis mirip Lebanon: laut yang luas menghampar dengan warna yang biru bening. Di Tunisia inilah, Aleesha mendirikan kerajaan baru: Carthago. Selama berabad-abad, Carthago kemudian dikenal juga karena armada dagangnya. Berjam-jam aku duduk bermenung di reruntuhan kerajaan kuno terkenal ini. Anganku mencoba menembus relung waktu masa lalu Carthago ini. Terletak di tepi pantai, sisa-sisa bangunan kuno, dengan batu bata yang besar dan kokoh tampak masih jelas terlihat. Hanya kerajaan besar yang mampu meninggalkan puing berusia ribuan tahun, sehingga bisa dikenal oleh umat manusia yang datang beberapa millennium kemudian, dari negeri yang berjarak ribuan mil di salah satu ujung Asia.

Pada abad ke-6 SM, seorang princes bernama Europe hidup di salah satu kota tua Lebanon, Tyre. Hekateus kemudian membuat peta dunia, dan mengabadikan nama sang putri, Europe, untuk menyebut kawasan yang berbahasa Greek. Jika putri ini tidak pernah lahir, mungkin tidak akan dikenal nama Eropa dalam sejarah. Kawasan lainnya menurut Hekateus adalah Asia. Dua kawasan yang berbeda, namun sebutannya berasal dari tanah yang sama. Aechilus adalah tokoh penting lainnya yang berperan dalam pembentukan konsep Asia. Herodotus kemudian menambahkan satu lagi: Afrika.

Sekali lagi, Lebanon adalah negeri tua, saksi perjalanan sejarah panjang umat manusia. Akumulasi 'kue lapis' peradaban itu menjadikan Lebanon dan Beirut sebagai negeri dan kota yang berbeda. Pada saat ini, Beirut dikenal sebagai ibukota intelektual dan kebudayaan di Timur Tengah. Dari rahimnya, lahir banyak pemikir, penyair, dan seniman, mulai dari Philip K. Hitti yang dikenal dengan karya-karya intelektualnya yang telah menjadi buku klasik, Gibran sang penyair Cinta, Majda Rumi sang penyanyi pop, hingga Nawal Zughbi sang penyanyi "dangdut".

Hitti, Gibran, Majda Rumi, dan Zughbi adalah refleksi dari evolusi sejarah panjang itu. Kedalaman dan keluasan pemikiran Hitti tak

mungkin lahir dari padang gersang pengetahuan; keagungan syair-syair cinta Gibran hanya bisa dilacak akarnya dari tanah leluhur yang kaya, dinamis dan romantis; lagu-lagu dan aransemen music Rumi yang elegan dan berkelas, dan lirik populer ‘dangdut’ Zughbi yang merakyat adalah representasi dari variasi sekaligus stratifikasi *taste* orang-orang Lebanon.

Lebanon sangat dekat di hatiku. Beberapa jam setelah terjadi ledakan, sebuah video ledakan yang dipenuhi emoji duka masuk ke WA-ku. Pengirimnya, sahabatku di Sydney, keturunan Lebanon. Ketika membaca WA itu, ingatanku secara refleks melayang ke wajah dosenku yang diselimuti ekspresi duka yang dalam. Ia adalah korban selamat pembantaian di kamp pengungsi Shubra dan Shatila. Namun, belasan keluarganya tewas mengenaskan di tangan pasukan Sharon. Memori keluarga dan bangsanya yang terbunuh itu kemudian membentuk labirin duka mendalam di hatinya, tergambar jelas di wajahnya yang mulai keriput.

Suzan, seorang perempuan tua di Sydney, juga keturunan Lebanon dan penganut Kristen Maronite yang taat, suatu ketika bercerita kepadaku. Keluarganya bermigrasi ke Sydney saat ia masih remaja untuk menghindari perang saudara yang pecah antara Muslim dan Kristen. Ia telah memiliki anak dan cucu, semua lahir di Aussie. Ia bercerita sangat mencintai Aussie, namun Lebanon tak akan pernah lekang dari hatinya. Hingga saat ini, ia masih belum mengerti mengapa relasi Muslim dan Kristiani yang sangat baik berujung pada perang saudara, sehingga memaksanya untuk bermigrasi. Ia masih mengenang masa kecil indah di Beirut, ketika ibunya berangkat ke pasar, dan ia selalu dititipkan ke tetangganya yang Muslim. Semua saling mencintai dan menghormati, namun berujung perang, sesalnya.

Semoga duka Lebanon cepat berlalu. Aku percaya bahwa usia sejarah yang panjang memberikan daya *resiliens* yang kuat pada mereka. Dukaku yang dalam untuk para korban.

PROFIL PENULIS

Andri Rosadi. Lahir dan besar di Tembilahan, Riau. Setelah menamatkan pendidikan dasar di SDN 016 Simpang Gaung, ia melanjutkan studi di SMPN 01 Tembilahan Hulu. Setelah tamat, ia melanjutkan studi ke Pondok Pesantren Walisongo, Ngabar, Ponorogo selama hampir setahun, kemudian pindah ke Pondok Modern Gontor di kota yang sama. Pengabdian pasca alumni Gontor ia jalani di Pesantren Nurul hakim Medan. Selama mengabdikan, ia juga sempat mengenyam kuliah di IAIN Sumatra Utara di Fakultas Syariah selama 2 semester. Studi di Medan ia tinggalkan karena mendapatkan beasiswa al Azhar ke Cairo. Di kampus tua ini, ia memilih jurusan Kebudayaan Islam. Selama studi di Cairo, ia aktif berorganisasi di Masika ICMI, PCIM Mesir dan juga Lembaga Kajian al Mizan.

Setelah menamatkan studi di Cairo, ia pulang ke tanah air melanjutkan studi di UGM Yogya jurusan Antropologi, beasiswa dari SYLFF, Tokyo Foundation. Selama studi S2 itu, ia juga mendapatkan grant Fellows Mobility Program di American University in Cairo selama dua bulan untuk penyelesaian thesis. Setelah mendapatkan gelar master di UGM, ia mengambil program master kedua di ISMC London. Sebagai mahasiswa asing, ia mengikuti Program English for Academic Purpose di SOAS selama dua bulan sebagai prasyarat sebelum mengikuti perkuliahan. Selama dua tahun di London, ia sempat mengikuti dua program short-course di The Protestant Institute of Theology, Paris dan di al Manar University, Tunis.

Program S3 ia selesaikan di School of Social Sciences and Psychology, Western Sydney university, dengan beasiswa Australia

Award Scholarship. Selama studi di Sydney, ia berkesempatan membentangkan hasil risetnya di Adelaide dan Oslo, Norwegia.

Menikah dengan Ivo Fauziah, ia dikaruniai tiga orang putra: Rafif Maududi, Qodri Ramadhan dan Wafa Ahdi Abdullah. Sejak tahun 2010, ia mengabdikan sebagai dosen di UIN Imam Bonjol, Padang hingga Agustus 2022. Sejak September 2022, ia pindah ke Prodi sosiologi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hingga saat ini. Ia bisa dihubungi melalui email rosadi96@yahoo.com.

ke MERANTAU SYDNEY

Perjalanan Mengejar Mimpi
di Harbour City

Australia termasuk salah satu destinasi impian para traveler Indonesia dan mancanegara. Benua ini tidak hanya tempat untuk menuntut ilmu dan mengais rezeki, melainkan juga menjadi tujuan wisata yang populer. Australia menyimpan pesona yang menarik: alamnya indah, unik, dan memiliki ciri khas tersendiri.

Sydney, merupakan salah satu kota terbesar di Australia dan menjadi Ibu Kota Negara Bagian New South Wales. Kota ini masuk nominasi World's Most Livable Cities karena memenuhi kriteria penting dalam keamanan, pendidikan, kebersihan, rekreasi, stabilitas politik-ekonomi, dan transportasi publik.

Buku ini merupakan pengalaman personal penulis ketika hidup di Sydney antara tahun 2015 sampai 2019. Di dalamnya termuat banyak renungan yang mencakup berbagai hal dengan fokus utama bertumpu pada isu-isu keislaman, kebangsaan, dan modernitas.

masa kini

Jl. Sorowajan Baru, Gg Muria No. 8
Banguntapan, Bantul, DIY 55198
e-mail: pustakamasakini@gmail.com
Kontak 0812-2550-0440

ISBN 978-623-5306-09-4

